

LAPORAN PEREKONOMIAN

Provinsi Nusa Tenggara Barat



Mei 2025



LAPORAN PEREKONOMIAN

Provinsi Nusa Tenggara Barat

MEI 2025



VISI Bank Indonesia

Menjadi bank sentral terdepan dengan tata kelola kuat yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging markets untuk Indonesia maju



MISI Bank Indonesia

1. Mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran Kebijakan Bank Indonesia.
2. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan.
3. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan Pemerintah serta mitra strategis lain.
4. Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran Kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural Pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain.
5. Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional.
6. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di tingkat daerah.
7. Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan melalui penguatan organisasi, sumber daya manusia, tata kelola dan sistem informasi yang handal, serta peran internasional yang proaktif.



Nilai – Nilai Strategis

Nilai-nilai strategis Bank Indonesia adalah: (i) kejujuran dan integritas (*trust and integrity*); (ii) profesionalisme (*professionalism*); (iii) keunggulan (*excellence*); (iv) mengutamakan kepentingan umum (*public interest*); dan (v) koordinasi dan kerja sama tim (*coordination and teamwork*) yang berlandaskan keluhuran nilai-nilai agama (religi).

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkenan-Nya buku “Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) edisi Mei 2025” dapat dipublikasikan. Buku ini menyajikan asesmen perkembangan perekonomian Provinsi NTB pada triwulan I 2025 serta prospek perekonomian di tahun 2025. Asesmen mencakup: perkembangan ekonomi makro daerah; keuangan pemerintah; inflasi; stabilitas keuangan daerah, pengembangan akses keuangan dan UMKM; penyelenggaraan sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah; ketenagakerjaan dan kesejahteraan; serta prospek perekonomian daerah.

Secara ringkas, Perekonomian NTB pada triwulan I 2025 berkontraksi sebesar -1,47% (yoy). Dari sisi permintaan, kontraksi ekonomi NTB pada triwulan I 2025 disebabkan oleh kontraksi ekspor sebesar -41,05% (yoy). Meski demikian, kontraksi ekonomi yang lebih dalam tertahan oleh peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga serta konsumsi pemerintah yang tetap tumbuh positif seiring momentum Ramadan dan pencairan THR ASN menjelang HBKN Idulfitri.

Provinsi Nusa Tenggara Barat pada triwulan I 2025 mengalami inflasi sebesar 1,15% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya (1,28%; yoy). Inflasi tahunan utamanya bersumber dari Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya yang mengalami inflasi sebesar 10,46%(yoy) dengan sumbangan sebesar 0,59% (yoy). Di sisi lain, kenaikan inflasi yang lebih tinggi relatif tertahan oleh Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga yang mengalami deflasi dari triwulan sebelumnya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi positif atas terbitnya publikasi ini, yaitu BPS, DJPB, BPKAD, OPD Tingkat Provinsi dan Kab/Kota, BUMN, Perbankan, serta asosiasi dan pelaku usaha. Kami berharap Laporan Perekonomian Provinsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pengambil kebijakan, pemerhati ekonomi, dan masyarakat yang membutuhkan. Masukan dan saran konstruktif kami harapkan untuk perbaikan ke depan.

Mataram, Mei 2025

**KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

ttd

Berry A. Harahap

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
Daftar Grafik	viii
Indikator Ekonomi dan Moneter	x
Ringkasan Eksekutif	xii

BAB I

Perkembangan Ekonomi Makro Regional

1.1	Kondisi Umum	2
1.2	PDRB Sisi Permintaan	3
1.2.1	Konsumsi	3
1.2.2	Investasi	4
1.2.3	Net Impor	4
1.3	PDRB Sisi Penawaran	5
1.3.1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6
1.3.2	Pertambangan dan Penggalian	7
1.3.3	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7
1.3.4	Konstruksi	8

BAB II

Keuangan Pemerintah

2.1	Gambaran Umum Perkembangan Keuangan Pemerintah	12
2.2	APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat	12
2.2.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat	12
2.2.2	Belanja Daerah APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat	13
2.3	APBD Gabungan 10 Kabupaten/Kota Nusa Tenggara Barat	14
2.3.1	Pendapatan Daerah APBD Gabungan Kabupaten/Kota	15
2.3.2	Belanja Daerah APBD Gabungan Kabupaten/Kota	16
2.4	APBN di Nusa Tenggara Barat	18
2.4.1	Anggaran Belanja APBN	18
2.4.2	Realisasi Belanja APBN di Nusa Tenggara Barat	19

BAB III

Perkembangan Inflasi

3.1	Perkembangan Inflasi IHK Gabungan Kota di Provinsi NTB Triwulan I 2025	22
3.1.1	Inflasi Berdasarkan Kelompok	22
3.2	Inflasi Kota Pantauan di Provinsi Nusa Tenggara Barat	25
3.2.1	Disagregasi Inflasi Kota Mataram	25
3.2.2	Disagregasi Inflasi Kabupaten Sumbawa	26
3.2.3	Disagregasi Inflasi Kota Bima	27
3.3	Tracking dan Proyeksi Inflasi	27
3.3.1	Tracking Inflasi Triwulan II 2025	27
3.3.2	Proyeksi Inflasi Keseluruhan Tahun 2025	28
3.4	Program Pengendalian Inflasi Daerah	28
	Boks 1 : Diskon Tarif Listrik	29

BAB IV

Analisis Stabilitas Keuangan Daerah

4.1	Perkembangan Kinerja Perbankan di Provinsi NTB	32
4.1.1	Perkembangan Penyaluran Kredit	32
4.1.2	Perkembangan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK)	34
4.1.3	Perkembangan Penyaluran Kredit Secara Spasial	35
4.1.4	Perkembangan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK)	36
4.2	Perkembangan Sektor Korporasi Provinsi NTB	36
4.2.1	Sumber Kerentanan dan Kondisi Sektor Korporasi	36
4.2.2	Perkembangan Kredit Korporasi di Provinsi NTB	37
4.2.3	Perkembangan DPK Korporasi di Provinsi NTB	37
4.3	Perkembangan Sektor Rumah Tangga Provinsi NTB	38
4.3.1	Sumber Kerentanan dan Kondisi Sektor Rumah Tangga	38
4.3.2	Perkembangan Kredit Rumah Tangga di Provinsi NTB	39
4.3.3	Perkembangan DPK Rumah Tangga di Provinsi NTB	40
4.4	Perkembangan Pembiayaan UMKM Provinsi NTB	40
4.4.1	Penyaluran Kredit UMKM di Provinsi NTB	40
4.4.2	Penyaluran Kredit UMKM Secara Spasial	42

BAB V

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran

5.1	Transaksi Pembayaran Tunai	46
5.2	Transaksi Pembayaran Non-tunai	48
5.2.1	Transaksi Real Time Gross Settlement (RTGS)	48
5.2.2	Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)	49
5.2.3	Transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)	49
5.2.4	Perkembangan Elektronifikasi dan Keuangan Inklusif	51
5.3	Transaksi KUPVA BB dan PJP LR	54

BAB VI

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

6.1	Ketenagakerjaan	58
6.1.1	Angkatan Kerja	58
6.1.2	Penduduk Bekerja	59
6.2	Kesejahteraan	60
6.2.1	Jumlah Penduduk Miskin	60
6.2.2	Tingkat Ketimpangan (Rasio Gini)	61
6.2.3	Indeks Pembangunan Manusia	62
6.2.4	Nilai Tukar Petani	63
	Boks 2 : Upah Buruh Rendah: Tantangan Struktural & Jalan Menuju Kesejahteraan Inklusif	64

BAB VII

Prospek Perekonomian

7.1	Kondisi Perekonomian Global & Domestik	70
7.2	Prospek Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTB Tahun 2025	71
7.3	Prospek Inflasi Provinsi NTB Tahun 2025	73

Daftar Tabel

Tabel 1.1	Pertumbuhan PDRB NTB - Sisi Permintaan (% ,yoy)	2	Tabel 5.1	Data <i>outflow-inflow-nettflow</i> Ramadan dan Idul Fitri (RaFi)	46
Tabel 1.2	Pertumbuhan PDRB NTB - Sisi Penawaran (% ,yoy)	6	Tabel 6.1	Kondisi Ketenagakerjaan Provinsi NTB (ribu orang)	58
Tabel 2.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan APBD Pemprov NTB	13	Tabel 6.2	Komponen Indeks Pembangunan Manusia Berdasarkan Kabupaten/Kota di NTB	62
Tabel 2.2	Anggaran dan Realisasi Belanja APBD Pemprov NTB	14	Tabel 7.1	Pertumbuhan PDB Dunia	70
Tabel 2.3	Anggaran dan Realisasi Pendapatan APBD Pemerintah Kabupaten/Kota di NTB	15	Tabel 7.2	Outlook Pertumbuhan Ekonomi Sisi Penggunaan	72
Tabel 2.4	Anggaran dan Realisasi Belanja APBD Pemerintah Kabupaten/Kota di NTB	17	Tabel 7.3	Outlook Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha	73
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Belanja APBN di NTB	19			
Tabel 3.1	Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Bulanan	22			
Tabel 3.2	Komoditas Utama Penyumbang Deflasi Bulanan	22			
Tabel 3.3	Inflasi Tahunan Kab/Kota di Provinsi NTB	22			
Tabel 3.4	Inflasi Tahunan Provinsi NTB Berdasarkan Kelompok	23			
Tabel 3.5	Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Kelompok Mamin Tembakau	24			
Tabel 3.6	Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	24			
Tabel 3.7	Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar RT	25			
Tabel 3.8	Inflasi Tahunan Kota Mataram Berdasarkan Kelompok	26			
Tabel 3.9	Inflasi Tahunan Kabupaten Sumbawa Berdasarkan Kelompok	26			
Tabel 3.10	Inflasi Tahunan Kota Bima Berdasarkan Kelompok	27			
Tabel 4.1	Pengelompokan Kredit Berdasarkan Nilai Tw-I 2025	34			

Daftar Grafik

Grafik 1.1	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTB Secara Triwulanan	2	Grafik 2.6	Proporsi Anggaran Pendapatan Daerah Spasial Kabupaten/Kota di NTB	16
Grafik 1.2	Pertumbuhan Ekonomi Balinusra dan Nasional	2	Grafik 2.7	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota di NTB sampai dengan Triwulan I 2025	16
Grafik 1.3	Perkembangan Kinerja Kredit dan Perekonomian	3	Grafik 2.8	Proporsi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten/Kota di NTB	17
Grafik 1.4	Perkembangan Outflow dan Perekonomian	3	Grafik 2.9	Rasio Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota di NTB	17
Grafik 1.5	Indeks Penghasilan	3	Grafik 2.10	Proporsi Anggaran Belanja Daerah Spasial Kabupaten/Kota di NTB	18
Grafik 1.6	Konsumsi Listrik Rumah Tangga	3	Grafik 2.11	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota di NTB sampai dengan Triwulan I 2025	18
Grafik 1.7	Perkembangan Belanja Pemerintah	4	Grafik 2.12	Perkembangan APBD Kabupaten/Kota di NTB	18
Grafik 1.8	Perkembangan SKDU Konstruksi	4	Grafik 3.1	Inflasi Tahunan Provinsi NTB dan Nasional	22
Grafik 1.9	Perkembangan Kredit Investasi	4	Grafik 3.2	Andil Inflasi Kelompok Mamin Tembakau Per Subkelompok	24
Grafik 1.10	Perkembangan Ekspor	5	Grafik 3.3	Andil Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya Subkelompok Perawatan Pribadi Lainnya	24
Grafik 1.11	PMI Manufaktur Negara Mitra Dagang Utama	5	Grafik 3.4	Andi Inflasi Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar RT	25
Grafik 1.12	Perkembangan Komponen Impor	5	Grafik 3.5	Perkembangan Inflasi Tahunan Kab/Kota Pantauan di Provinsi NTB	25
Grafik 1.13	Produksi Gabah Giling Kering (GKG)	6	Grafik 3.6	Inflasi Tahunan Triwulan I 2025 Kab/Kota Pantauan di Provinsi NTB	25
Grafik 1.14	Produksi Jagung Pipilan Kering dengan Kadar Air 14% (JPA KA 14%)	6	Grafik 4.1	Perkembangan Indikator Perbankan Provinsi NTB	32
Grafik 1.15	Rata-rata Curah Hujan	7	Grafik 4.2	Pangsa Penyaluran Kredit di Wilayah Balinusra	32
Grafik 1.16	Nilai Tukar Petani dan Komponennya	7	Grafik 4.3	Pangsa Penghimpunan DPK di Wilayah Balinusra	32
Grafik 1.17	Perkembangan Kredit Pertambangan	7	Grafik 4.4	Pangsa Kredit Perbankan Provinsi NTB Berdasarkan Jenis Penggunaan	33
Grafik 1.18	Perkembangan Kondisi Investasi Sektor Pertambangan	7	Grafik 4.5	Pertumbuhan Kredit Perbankan Provinsi NTB Berdasarkan Jenis Penggunaan	33
Grafik 1.19	Perkembangan Penjualan Kendaraan Bermotor	8	Grafik 4.6	Pangsa Kredit Perbankan Provinsi NTB Berdasarkan Sektor Ekonomi	33
Grafik 1.20	Perkembangan Kredit Perdagangan	8			
Grafik 1.21	Survei Konsumen	8			
Grafik 1.22	Survei Pedagang Eceran	8			
Grafik 1.23	Volumen Penjualan Semen	8			
Grafik 1.24	Perkembangan Kredit Konstruksi	9			
Grafik 2.1	Proporsi Pagu Belanja Pemerintah di Provinsi NTB Tahun 2025	12			
Grafik 2.2	Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah di Provinsi NTB s.d. Triwulan I 2025	12			
Grafik 2.3	Perkembangan Derajat Otonomi Fiskal APBD Provinsi NTB	13			
Grafik 2.4	Proporsi Komponen Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota di NTB	16			
Grafik 2.5	Derajat Otonomi Fiskal Kabupaten/Kota di NTB (berdasarkan anggaran)	16			

Grafik 4.7	Pertumbuhan Kredit Perbankan Provinsi NTB Berdasarkan Sektor Ekonomi	33
Grafik 4.8	Perkembangan DPK Perbankan Provinsi NTB Per Jenis Instrumen	34
Grafik 4.9	Perkembangan DPK Perbankan Provinsi NTB Per Nasabah	34
Grafik 4.10	Perkembangan Deposito Perbankan Provinsi NTB Per Jangka Waktu	34
Grafik 4.11	Perkembangan Giro Perbankan Provinsi NTB Per Kelompok Nilai	34
Grafik 4.12	Perkembangan Tabungan Perbankan Provinsi NTB Per Kelompok Nilai	35
Grafik 4.13	Perkembangan Penyaluran Kredit Kab/Kota di Provinsi NTB	35
Grafik 4.14	Pangsa Penyaluran Kredit Kab/Kota di Provinsi NTB Tw-I 2025	35
Grafik 4.15	Perkembangan Penghimpunan DPK per Kab/Kota di Provinsi NTB	36
Grafik 4.16	Pangsa Penghimpunan DPK Kab/Kota di Provinsi NTB Tw-I 2025	36
Grafik 4.17	Perkembangan PMI Negara Mitra Dagang Utama	36
Grafik 4.18	Perkembangan Ekspor Tambang NTB	36
Grafik 4.19	Perkembangan Likuiditas dan Rentabilitas Korporas	37
Grafik 4.20	Perkembangan Kredit Korporasi Berdasarkan Sektor	37
Grafik 4.21	Pangsa Kredit Korporasi Berdasarkan Sektor	37
Grafik 4.22	Perkembangan DPK Korporasi Berdasarkan Instrumen	38
Grafik 4.23	Pertumbuhan DPK Korporasi Berdasarkan Golongan Korporasi	38
Grafik 4.24	Perkembangan Likuiditas Korporasi	38
Grafik 4.25	Indeks Penghasilan & Ketersediaan Tenaga Kerja Saat Ini	38
Grafik 4.26	Likert Scale Tingkat Upah	39
Grafik 4.27	Perkembangan Inflasi Tahunan Provinsi NTB	39
Grafik 4.28	Perkembangan Kredit Rumah Tangga di Provinsi NTB	39
Grafik 4.29	Pangsa Kredit Rumah Tangga Menurut Penggunaan	39
Grafik 4.30	Perkembangan Kredit Pemilikan Rumah (KPR)	40
Grafik 4.31	Perkembangan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)	40

Grafik 4.32	Perkembangan DPK Perseorangan & Non Perseorangan Provinsi NTB	40
Grafik 4.33	Perkembangan DPK Perseorangan Berdasarkan Instrumen	40
Grafik 4.34	Pertumbuhan Kredit UMKM di Provinsi NTB	41
Grafik 4.35	Pangsa Kredit UMKM Terhadap Total Kredit	41
Grafik 4.36	Perkembangan Pangsa Kredit UMKM Sektoral	41
Grafik 4.37	Pertumbuhan Kredit UMKM Secara Sektoral	41
Grafik 4.38	Perkembangan NPL Kredit UMKM	42
Grafik 4.39	Perkembangan Suku Bunga Kredit UMKM	42
Grafik 4.40	Pangsa Penyaluran Kredit UMKM Per Kab/Kota di Provinsi NTB	42
Grafik 4.41	Perkembangan Pertumbuhan Kredit UMKM di Kab/Kota Utama	42
Grafik 5.1	Perkembangan Nominal <i>Inflow</i> , <i>Outflow</i> , dan <i>Net Outflow</i> Uang Kartal	46
Grafik 5.2	Perkembangan <i>outflow</i> dan <i>inflow</i> mingguan	46
Grafik 5.3	Data <i>outflow</i> Ramadan dan Idul Fitri (RaFi)	46
Grafik 5.4	Perkembangan pemusnahan dan rasio terhadap <i>inflow</i> dalam nominal	47
Grafik 5.5	Pangsa Pemusnahan UTLE, prosentase dalam bilyet	47
Grafik 5.6	Prosentase rasio pemusnahan uang UPB dan UPK	47
Grafik 5.7	Kegiatan kas keliling	47
Grafik 5.8	Perkembangan <i>net flow</i> di wilayah Kas Titipan Bima dan Sumbawa (minus menunjukkan <i>outflow</i>)	47
Grafik 5.9	Data Perkembangan penyerapan UTLE di wilayah kerja Kas Titipan	47
Grafik 5.10	Pangsa <i>outflow</i> berdasarkan wilayah layanan kas	48
Grafik 5.11	Pangsa <i>inflow</i> berdasarkan wilayah layanan kas	48
Grafik 5.12	Temuan uang palsu	48
Grafik 5.13	Sumber laporan uang palsu	48
Grafik 5.14	Perkembangan Transaksi RTGS	48
Grafik 5.15	Perkembangan Transaksi SKNBI	49
Grafik 5.16	Perkembangan Transaksi BI-FAST	49
Grafik 5.17	Jumlah Kartu Kredit	49
Grafik 5.18	Perkembangan Volume Transaksi Kartu Kredit	49

Grafik 5.19 Perkembangan Nominal Transaksi Menggunakan Kartu Kredit	50
Grafik 5.20 Perkembangan Volume Transaksi Kartu Kredit	50
Grafik 5.21 Jumlah Kartu kredit	50
Grafik 5.22 Perkembangan Nominal Transaksi Kartu Kredit	50
Grafik 5.23 Jumlah Akun UE	51
Grafik 5.24 Perkembangan Volume UE	51
Grafik 5.25 Perkembangan Nominal Transaksi UE	51
Grafik 5.26 Perkembangan Jumlah Merchant QRIS	52
Grafik 5.27 Perkembangan Transaksi QRIS di Provinsi NTB	52
Grafik 5.28 Perkembangan Transaksi KUPVA BB	54
Grafik 5.29 Pangsa Transaksi Beli KUPVA BB	54
Grafik 5.30 Pangsa Transaksi Jual KUPVA BB	54
Grafik 5.31 Perkembangan Transaksi PJP LR	55
Grafik 6.1 Indeks Ketersediaan Tenaga Kerja	58
Grafik 6.2 Indeks Penghasilan	58
Grafik 6.3 Indeks Perkiraan Ketersediaan Lapangan Kerja	59
Grafik 6.4 Indeks Prakiraan Penghasilan	59
Grafik 6.5 Pangsa Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Usaha	59
Grafik 6.6 Perkembangan Pangsa Tenaga Kerja Berdasarkan Kegiatan Utama	59
Grafik 6.7 Pertumbuhan Jumlah Penduduk Bekerja Berdasarkan Status Pekerjaan Utama (Februari 2025)	60
Grafik 6.8 Pertumbuhan Jumlah Penduduk Bekerja Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Februari 2025)	60
Grafik 6.9 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi NTB	60
Grafik 6.10 Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan	60
Grafik 6.11 Indeks Kedalaman Kemiskinan	61
Grafik 6.12 Indeks Keparahan Kemiskinan	61
Grafik 6.13 Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita di Wilayah Perkotaan	61
Grafik 6.14 Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita di Wilayah Pedesaan	61
Grafik 6.15 Tingkat Ketimpangan di Balinusra	61
Grafik 6.16 Tingkat Ketimpangan Spasial di NTB	62

Grafik 6.17 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi NTB Tahun 2024	62
Grafik 6.18 Perkembangan Nilai Tukar Petani	63
Grafik 6.19 Komponen Nilai Tukar Petani	63
Grafik 7.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi NTB	71
Grafik 7.2 Indeks Keyakinan Konsumen	71
Grafik 7.3 Realisasi Pengadaan Semen	71
Grafik 7.4 Produksi Konsentrat Tembaga	72
Grafik 7.5 Proyeksi Inflasi Provinsi NTB	73
Grafik 7.6 Harga Emas Global	74

Indikator Ekonomi dan Moneter

Provinsi Nusa Tenggara Barat

INDIKATOR	2023			2024				2025
	II	III	IV	I	II	III	IV	I
EKONOMI DAERAH								
PDRB - Harga konstan (Rp Miliar)	25.267,00	26.480,34	26.862,53	26.497,6	28.061,06	28.126,79	26.729,55	26.108,53
- Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.860,94	6.076,74	5.095,05	5.378,07	6.163,94	6.215,28	5.235,14	5.930,41
- Pertambangan dan Penggalian	3.721,25	4.173,38	5.556,42	5.362,25	5.433,13	4.926,60	4.620,81	3.746,04
- Industri Pengolahan	969,73	1.451,06	1.225,98	1.022,18	1.065,46	1.495,04	1.256,50	1.276,63
- Pengadaan Listrik, Gas	32,61	29,94	28,35	29,57	34,16	32,75	32,96	33,03
- Pengadaan Air	19,68	20,60	21,05	19,93	19,97	19,94	21,18	20,44
- Konstruksi	2.553,06	2.776,30	2.771,29	2.708,87	2.556,13	2.766,53	2.853,43	2.667,69
- Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.825,47	3.675,63	3.671,75	3.700,02	4.010,33	3.989,25	3.903,49	3.894,00
- Transportasi dan Pergudangan	1.494,86	1.503,05	1.477,27	1.432,13	1.560,66	1.571,81	1.525,63	1.460,06
- Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	392,80	402,14	391,03	384,76	432,76	449,35	419,42	396,95
- Informasi dan Komunikasi	761,53	766,13	774,87	770,56	774,82	800,73	799,76	796,81
- Jasa Keuangan	862,62	929,90	1.063,76	1.013,99	1.023,40	1.030,47	968,98	1.022,73
- Real Estate	818,39	829,74	818,76	831,73	843,94	859,27	863,80	854,47
- Jasa Perusahaan	48,70	48,79	49,94	50,82	51,35	51,52	52,42	53,29
- Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.402,42	1.283,46	1.369,59	1.280,46	1.487,57	1.309,71	1.498,92	1.369,54
- Jasa Pendidikan	1.286,36	1.293,43	1.282,57	1.268,86	1.311,24	1.331,97	1.344,26	1.306,23
- Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	588,86	590,44	626,10	624,52	628,78	631,11	656,27	639,48
- Jasa lainnya	628,16	629,62	638,74	618,80	663,43	645,45	676,58	640,72
Pertumbuhan PDRB (yoy %)	(1,54)	1,58	3,66	4,75%	11,06	6,22	(0,50)	(1,47)
Pertumbuhan PDRB tanpa Sektor Pertambangan (yoy %)	4,11	5,91	4,72	3,01%	5,02	4,00	3,74	5,81
FISKAL DAERAH (Provinsi + Kab/Kota)								
Realisasi Penerimaan Daerah (Rp Milliar)	8.598,11	15.457,00	30.970,72	4.232,73	8.606,96	25.544,38	25.625,99	4.425,69
Realisasi Belanja Daerah (Rp Milliar)	7.490,07	18.287,57	48.721,07	2.955,13	7.563,32	25.682,72	24.516,15	3.666,24
- Belanja Pegawai	3.742,63	2.292,56	8.126,18	1.443,09	3.743,43	10.109,22	9.813,61	2.063,74
- Belanja Barang	2.092,99	2.211,95	6.704,19	461,33	2.151,76	7.890,17	7.716,95	917,39
- Belanja Modal	391,74	1.897,76	2.937,61	59,529	402,93	3.360,99	2.951,19	110,78
- Belanja Bantuan Sosial	158,14	377,28	927,76	4,53	57,52	68,18	62,97	3,01
INFLASI								
Indeks Harga Konsumen	113,94	114,82	115,97	106,74	106,08	105,87	107,04	107,97
- Kota Mataram	113,90	114,63	115,79	106,56	111,46	105,97	107,00	107,92
- Kota Bima	114,08	115,48	116,59	105,84	107,00	106,46	107,23	106,94
- Kabupaten Sumbawa				106,27	104,26	105,55	107,01	108,37
Laju Inflasi Tahunan (yoy %)	2,99	2,29	3,02	3,63%	2,12	1,77	1,28	1,15
- Kota Mataram	3,04	2,19	3,04	3,44%	2,93	1,97	1,92	1,51
- Kota Bima	2,80	2,66	2,91	3,10%	2,39	2,49	2,33	1,13
- Kabupaten Sumbawa				4,06%	0,95	1,27	0,08	0,68

INDIKATOR	2023			2024				2025
	II	III	IV	I	II	III	IV	I
STABILITAS SISTEM KEUANGAN								
Total Aset (Rp Miliar)	67.483,00	73.706,00	75.770,00	78.885,17	78.362,18	81.125,51	82.867,13	85.318,63
Dana Pihak Ketiga (Rp Miliar)	39.655,00	41.409,00	42.147,00	44.659,90	46.848,56	47.683,78	44.430,50	45.258,56
- Giro (Rp Miliar)	8.586,00	9.814,00	9.555,00	12.584,25	12.592,52	12.979,85	8.672,42	10.407,07
- Tabungan (Rp Miliar)	20.651,00	20.508,00	21.863,00	20.633,21	23.042,69	23.217,45	24.212,10	23.567,19
- Deposito (Rp Miliar)	10.418,00	11.087,00	10.729,00	11.442,43	11.213,35	11.486,47	11.545,98	11.284,29
Kredit (Rp Miliar) - berdasarkan lokasi proyek	73.616,87	83.366,51	88.986,96	93.730,37	93.048,36	93.203,57	98.491,04	105.415,00
- Modal Kerja	30.010,52	32.699,04	35.828,77	39.137,29	37.193,60	37.596,84	44.673,74	47.284,00
- Investasi	16.219,74	22.319,37	23.981,46	24.895,07	25.106,72	23.876,67	21.453,24	25.376,00
- Konsumsi	27.386,60	28.348,10	29.176,72	29.698,08	30.748,04	31.730,06	32.364,06	32.754,00
Total Kredit UMKM (Rp Miliar)	19.823,00	20.611,00	21.281,00	21.671	21.928,11	22.559,93	22.581,00	22.655,47
Loan to Deposit Ratio (%)	141,35	147,91	149,29	148,22	137,99	140,42	155,09	157,92
NPL (%)	1,32	1,23	1,14	1,40	1,72	1,85	2,01	2,25
SISTEM PEMBAYARAN								
Nominal Transaksi RTGS (Rp miliar)	7.671,01	7.101,55	8.948,64	7.542,93	9.108,33	9.434,28	8.874,22	7.206,25
Volume Transaksi RTGS (lembar)	3.780,00	4.677,00	4.286,00	3.584,00	3.809,00	4.546,00	4.526,00	4.063,00
Rata-rata Harian Nominal Transaksi RTGS (Rp miliar)	142,05	131,51	165,72	139,68	168,67	174,71	164,34	133,45
Rata-rata Harian Volume Transaksi RTGS (ribu lembar)	70,00	86,61	79,37	66,37	70,54	84,19	83,81	75,24
Nominal Kliring (Rp miliar)	3.082,35	3.519,16	3.512,95	2.840,45	2.897,17	3.275,50	3.424,33	2.564,00
Volume Kliring (ribu lembar)	57,05	62,25	66,12	49,92	53,24	56,34	64,07	46,12
Rata-rata Harian Nominal Kliring (Rp miliar)	57,08	65,17	65,05	52,60	53,65	60,66	63,41	47,48
Rata-rata Harian Volume Kliring (lembar)	1,06	1,15	1,22	0,92	0,99	1,04	1,19	0,85
KESEJAHTERAAN								
Nilai Tukar Petani	112,75	118,08	122,81	123,87	119,81	119,36	121,44	124,99
Tingkat Pengangguran Terbuka (% Feb'25)	3,70	2,80	2,80	3,30%	3,30	2,73	2,73	3,30
Tingkat Kemiskinan (% Sept - Mei'25)	13,85	13,85	13,85	13,85	12,91	12,91	11,91	11,91
Gini Rasio (% Sept - Mei'25)	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38

Sumber: Bank Indonesia, diolah

Ringkasan Eksekutif

Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

Perekonomian Nusa Tenggara Barat (NTB) Barat pada triwulan I 2025 berkontraksi sebesar -1,47% (yoy)

Perekonomian NTB pada triwulan I 2025 mengalami kontraksi -1,47% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi triwulan sebelumnya. Dari sisi permintaan, kontraksi ekonomi NTB pada triwulan I 2025 disebabkan oleh kontraksi ekspor sebesar -41,05% (yoy). Dari sisi penawaran, kontraksi ekonomi NTB pada triwulan I 2025 disebabkan oleh kontraksi LU Pertambangan sebesar -30,14% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi triwulan sebelumnya yang sebesar -16,84% (yoy).

Meski demikian, kontraksi ekonomi yang lebih dalam tertahan oleh peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga serta konsumsi pemerintah yang tetap tumbuh positif seiring momentum Ramadan dan pencairan THR ASN menjelang HBKN Idulfitri. Lebih lanjut, akselerasi kinerja LU Pertanian yang tumbuh 2,75% (yoy) pada triwulan IV 2024 menjadi 10,28% (yoy) pada triwulan I 2025 seiring dengan berlangsungnya masa panen raya komoditas padi dan jagung juga turut menahan kontraksi yang lebih dalam.

Kuangan Pemerintah

Kinerja keuangan pemerintah di Provinsi NTB mengalami penurunan pada triwulan I 2025 yang tercermin dari persentase realisasi pendapatan APBN, APBD Provinsi NTB dan APBD Kabupaten/Kota masing-masing sebesar 17,90%, 14,58% dan 17,90%.

Secara nominal, realisasi pendapatan gabungan Pemerintah Pusat (APBN) dan Provinsi NTB (APBD) triwulan I 2025 mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Adapun persentase realisasi pendapatan terhadap pagu anggaran tahun 2025 untuk APBN, APBD Provinsi NTB, dan APBD Kabupaten/Kota masing-masing sebesar 17,90%, 14,58% dan 17,90%. Sementara secara spasial, realisasi pendapatan Kabupaten/Kota terhadap pagu anggaran tahun 2025 tertinggi adalah Kabupaten Sumbawa Barat (29,68%) dan terendah Kabupaten Lombok Barat (6,25%). Di sisi lain, realisasi belanja gabungan Pemerintah Pusat dan Provinsi NTB (termasuk kabupaten/kota) pada triwulan I 2025 tercatat mengalami kenaikan, dengan realisasi sebesar Rp10.078,98 miliar atau 18,89% dari target. Secara spasial, persentase realisasi penyerapan belanja tertinggi adalah Kabupaten Lombok Timur (21,58%), sedangkan terendah yaitu Kabupaten Lombok Barat (6,84%).

Perkembangan Inflasi Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Barat pada triwulan I 2025 mengalami inflasi sebesar 1,15% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya (1,28%; yoy). Tekanan inflasi utamanya bersumber dari Kelompok Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya.

Gabungan Kota Perhitungan Inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada triwulan I 2025 mengalami inflasi sebesar 1,15% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya (1,28%; yoy). Inflasi tahunan utamanya bersumber dari Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya yang mengalami inflasi sebesar 10,46% (yoy) dengan sumbangan sebesar 0,59% (yoy).

Pada triwulan II 2025, tekanan inflasi diperkirakan meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya seiring dengan masuknya periode libur sekolah serta berakhirnya masa panen sub-round I yang berpotensi meningkatkan tekanan pada kelompok pangan strategis dan transportasi. Lebih lanjut, untuk keseluruhan tahun 2025, inflasi diperkirakan tetap terkendali dan berada dalam rentang sasaran 2,5±1%.

Stabilitas Keuangan Daerah dan Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Kinerja sistem keuangan Provinsi NTB pada triwulan I 2025 masih tetap kuat, didorong pertumbuhan kredit investasi yang terakselerasi sebesar 99,07%. Perkembangan positif tersebut turut didukung oleh risiko yang terjaga, tercermin dari NPL yang masih berada pada threshold <5%. Penyaluran kredit perbankan di Provinsi NTB mencapai Rp71,47 triliun pada triwulan I 2025, atau tumbuh 7,97% (yoy), melandai dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 9,51% (yoy).

Stabilitas keuangan daerah Provinsi NTB pada triwulan I 2025 terpantau tetap kuat, tercermin dari kinerja penyaluran kredit yang tumbuh serta NPL yang masih terjaga.

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Aliran uang kartal di Provinsi NTB pada triwulan I 2025 tercatat net outflow Rp0,02 triliun. Transaksi melalui sistem Real Time Gross Settlement (RTGS) di Provinsi NTB tercatat sebesar Rp8,8 triliun dengan capaian volume sebesar 4.063 transaksi pada triwulan I 2025.

Sementara itu, transaksi melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) pada periode laporan mencapai 46.123 Dokumen Keuangan Elektronik (DKE) dengan nominal mencapai Rp2,6 triliun. Lebih lanjut, penggunaan kanal pembayaran QRIS di wilayah Nusa Tenggara Barat terus tumbuh hingga triwulan I 2025. Dilihat dari jumlah merchant, per Maret 2025 terdapat 363.016 merchant QRIS di Provinsi NTB atau tumbuh 105% (yoy).

Sejalan dengan peningkatan kondisi perekonomian di Provinsi NTB pada triwulan I 2025, nominal transaksi non-tunai dan QRIS mengalami kenaikan.

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) Nusa Tenggara Barat (NTB) menurun dari 3,30% pada Februari 2024 menjadi 3,22% pada Februari 2025 yang dikontribusikan oleh penurunan TPT Perkotaan sebesar -0,46% (ptp). Sejalan dengan itu, tingkat kemiskinan di Provinsi NTB mengalami penurunan yang dikontribusi oleh penurunan tingkat kemiskinan di daerah perkotaan dan pedesaan. Tingkat kemiskinan di Provinsi NTB mengalami penurunan dari 12,91% pada Maret 2024 menjadi 11,91% pada September 2024.

Nilai Tukar Petani pada Maret 2025 meningkat 1,68 (ptp) dari Desember 2024, didorong oleh kenaikan indeks yang diterima petani (it) dan indeks yang dibayar petani (lb). Secara sektoral, peningkatan tersebut didorong oleh kenaikan tanaman hortikultura hingga 38,77 (ptp).

Kondisi ketenagakerjaan berdasarkan data Februari 2025 mengalami perbaikan sejalan dengan penurunan TPT

Ekonomi Provinsi NTB pada tahun 2025 diperkirakan akan tumbuh positif pada rentang 2,1% - 2,9% (yoy).

Tekanan inflasi Provinsi NTB pada tahun 2025 diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 namun tetap terkendali.

Prospek Perekonomian Daerah

Ekonomi Provinsi NTB pada tahun 2025 diperkirakan akan tumbuh positif pada rentang 2,1% - 2,9% (yoy). Namun demikian ekonomi tanpa tambang diperkirakan tumbuh 6,2% - 7,0%. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTB didorong oleh mulai beroperasinya smelter yang mendorong industri pengolahan di Provinsi NTB. Sejalan dengan hal tersebut, tetap positifnya konsumsi RT turut mendorong kinerja perekonomian provinsi NTB sejalan dengan kenaikan tingkat upah, aktivitas perekonomian yang terus membaik serta tingkat inflasi yang terkendali.

Lebih lanjut, tekanan inflasi Provinsi NTB pada tahun 2025 diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan tahun 2024, namun tetap terkendali. Meningkatnya tekanan inflasi terutama didorong oleh penyesuaian harga komoditas dibandingkan tahun sebelumnya (cth. Gabah & harga jual eceran rokok) serta potensi peningkatan permintaan pangan utama. Volatilitas harga komoditas global turut mendorong tingkat inflasi lebih tinggi di tahun 2025. Bank Indonesia bersama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus melakukan sinergi dan koordinasi intensif, serta mengoptimalkan langkah-langkah pengendalian melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Provinsi NTB.







01

Perkembangan Ekonomi Makro Regional

- Perekonomian NTB pada triwulan I 2024 mengalami kontraksi -1,47% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi triwulan sebelumnya -0,5% (yoy) dan lebih rendah dibandingkan pertumbuhan wilayah Balinusra 3,12%, yoy) dan Nasional (4,87%, yoy). Dari sisi permintaan, kontraksi ekonomi NTB pada triwulan I 2025 disebabkan oleh kontraksi ekspor sebesar -41,05% (yoy). Meski demikian, kontraksi ekonomi yang lebih dalam tertahan oleh peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga serta konsumsi pemerintah yang tetap tumbuh positif seiring momentum Ramadan dan pencairan THR ASN menjelang HBKN Idulfitri.
- Dari sisi penawaran, kontraksi ekonomi NTB pada triwulan I 2025 disebabkan oleh kontraksi LU Pertambangan sebesar 30,14% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi triwulan sebelumnya yang sebesar 16,84% (yoy). Meski demikian, kontraksi ekonomi yang lebih dalam tertahan oleh akselerasi kinerja LU Pertanian dari tumbuh 2,75% (yoy) pada triwulan IV 2024 menjadi 10,28% (yoy) pada triwulan I 2025. Akselerasi kinerja LU Pertanian seiring dengan berlangsungnya masa panen raya komoditas padi dan jagung.

1.1 KONDISI UMUM

Kinerja ekonomi NTB pada triwulan I 2025 kembali mengalami kontraksi. Dari sisi permintaan, kontraksi ekonomi NTB dikontribusikan oleh kontraksi ekspor dan investasi. Meski demikian, kontraksi yang lebih dalam tertahan oleh peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah yang tetap tumbuh positif. Dari sisi penawaran, kontraksi ekonomi NTB diakibatkan oleh kontraksi LU Pertambangan dan LU Konstruksi, serta perlambatan LU Perdagangan dan LU Transportasi. Meski demikian, kontraksi yang lebih dalam tertahan oleh akselerasi kinerja pertumbuhan LU Pertanian.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada triwulan I 2025 mengalami kontraksi -1,47% (yoy), lebih dalam dibandingkan kontraksi triwulan sebelumnya yang sebesar 0,50% (yoy) (Grafik 1.1). Kinerja tersebut lebih rendah dibandingkan kinerja ekonomi Wilayah Balinusra (3,12%, yoy) dan Nasional (4,87%, yoy) (Grafik 1.2). Meski demikian, kinerja ekonomi NTB tanpa tambang tercatat tetap tumbuh kuat dan positif seiring masuknya masa panen komoditas tanaman pangan, serta momentum Ramadan dan HBKN Idulfitri. Ekonomi nontambang NTB tercatat tumbuh 5,57% (yoy) pada triwulan I 2025, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya, serta kinerja ekonomi Balinusra dan Nasional pada periode yang sama.

Kontraksi ekonomi NTB pada triwulan I 2025 dikontribusikan oleh kontraksi ekspor dan investasi (Tabel 1. 1). Kontraksi ekspor disebabkan oleh berakhirnya relaksasi ekspor konsentrat tembaga

pada Desember 2024. Kontraksi investasi seiring dengan masuknya fase akhir pembangunan pembangkit listrik dan pembatasan pembangunan proyek fisik pemerintah. Meski demikian, perlambatan yang lebih dalam tertahan oleh peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga seiring momentum Ramadan dan HBKN Idulfitri.

Secara sektoral, kontraksi ekonomi NTB pada triwulan I 2025 disebabkan oleh kontraksi LU Pertambangan dan LU Konstruksi. Kontraksi LU Pertambangan seiring pertambangan tembaga yang masih memasuki tahap awal Fase 8 Tambang Batuan Hijau dengan kadar logam lebih rendah sehingga produksi konsentrat tembaga mengalami penurunan. Lebih lanjut, kontraksi LU Konstruksi seiring berakhirnya konstruksi swasta bernilai signifikan pada triwulan sebelumnya dan penundaan proyek konstruksi pemerintah di tengah realokasi anggaran. Meski demikian, LU Perdagangan tetap tumbuh positif seiring berlangsungnya momentum Ramadan dan HBKN Idulfitri yang mendorong kebutuhan bahan pokok dan meningkatkan mobilisasi masyarakat. Adapun LU Pertanian tercatat tumbuh positif dan terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya seiring masuknya masa panen raya komoditas padi dan jagung.

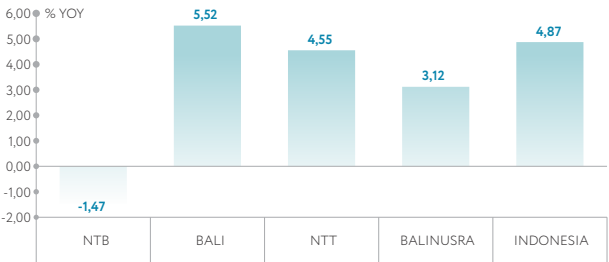
Meskipun mengalami kontraksi, penyaluran kredit di Provinsi NTB tetap tumbuh positif dan meningkat. Berdasarkan lokasi proyek, penyaluran kredit perbankan mengalami peningkatan dari tumbuh 10,68% (yoy) pada triwulan IV 2024 menjadi 12,47% (yoy) pada

Grafik 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTB Secara Triwulanan



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Balinusra dan Nasional



Sumber: BPS, diolah

Tabel 1.1 Pertumbuhan PDRB NTB - Sisi Permintaan (% yoy)

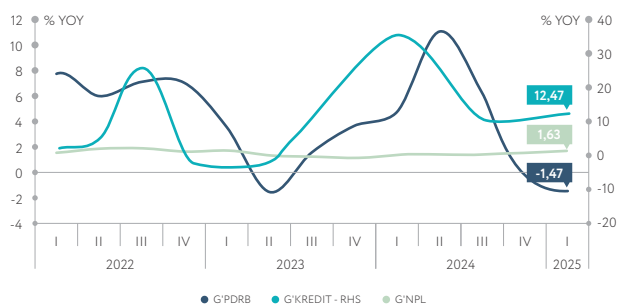
KOMPONEN PENGELUARAN	2023	2023	2024				2024	2025
	IV		I	II	III	IV		I
Konsumsi Rumah Tangga	5,16	4,01	5,14	5,05	4,41	3,25	4,45	4,18 ▲
Konsumsi LNPRT	14,68	6,12	18,79	13,69	12,84	1,03	11,26	-1,09 ▼
Konsumsi Pemerintah	2,70	1,72	13,21	2,94	1,08	4,43	5,17	4,15 ▼
Investasi	7,74	8,98	7,79	2,32	(0,11)	2,78	3,11	-1,67 ▼
Perubahan Inventori	(3.484,41)	2,84	336,94	(93,40)	(101,14)	-215,38	326,29	305,96 ▲
Ekspor Barang dan Jasa	4,93	(10,79)	1,14	92,20	14,26	-41,43	5,77	-41,05 ▲
Impor Barang dan Jasa	6,90	(1,65)	8,03	24,43	15,54	-23,56	3,87	-22,43 ▲
PDRB	3,66	1,80	4,75	11,06	6,22	-0,50	5,30	-1,47 ▼

Sumber: BPS Provinsi NTB

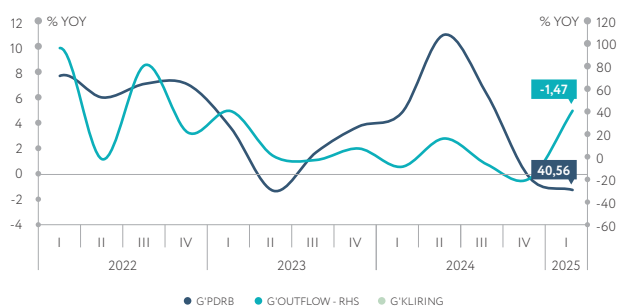
▲ Lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya

▼ Lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya

► Sama dengan triwulan sebelumnya

Grafik 1.3 Perkembangan Kinerja Kredit dan Perekonomian

Sumber: Laporan Bank Umum dan BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 1.4 Perkembangan Outflow dan Perekonomian

Sumber: Bank Indonesia dan BPS Provinsi NTB, diolah

triwulan laporan (Grafik 1.3). Peningkatan tersebut didorong peningkatan kinerja kredit investasi khususnya di sektor pertambangan dan konstruksi yang menunjukkan sinyal perbaikan ekonomi ke depan.

Lebih lanjut, momentum Ramadan dan HBKN Idulfitri mendorong peningkatan kebutuhan uang. Hal tersebut tercermin dari peningkatan kinerja *outflow* uang dari kontraksi -19,09% (yoy) pada triwulan IV 2024 menjadi tumbuh 40,56% (yoy) pada triwulan laporan (Grafik 1.4). Peningkatan tersebut sejalan dengan peningkatan konsumsi rumah tangga dan ekonomi nontambang yang mengindikasikan bahwa konsumsi masyarakat tetap baik di tengah kontraksi ekonomi.

1.2 PDRB SISI PERMINTAAN

Perekonomian NTB pada triwulan I 2025 kembali mengalami kontraksi yang dikontribusikan oleh kontraksi ekspor dan investasi. Meski demikian, perlambatan yang lebih dalam tertahan oleh kinerja konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah yang tetap tumbuh positif.

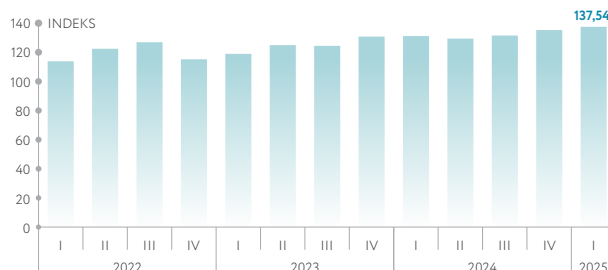
1.2.1 Konsumsi

Pada triwulan I 2025, kinerja konsumsi mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Konsumsi tercatat tumbuh 4,05% (yoy) pada triwulan I 2025, meningkat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang sebesar 3,41% (yoy). Peningkatan tersebut didorong oleh peningkatan kinerja

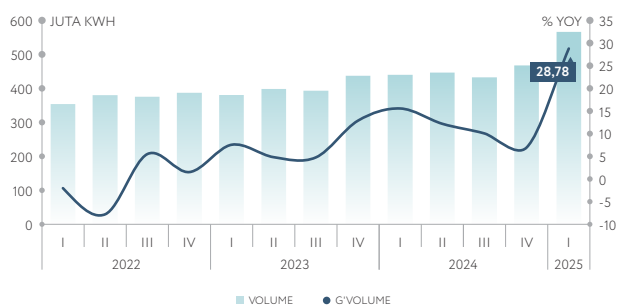
konsumsi swasta seiring momentum Ramadan dan HBKN Idulfitri yang mendorong peningkatan kebutuhan konsumsi masyarakat. Adapun konsumsi pemerintah tercatat tumbuh positif meskipun relatif melambat dibandingkan triwulan sebelumnya seiring pemblokiran sementara beberapa akun anggaran kementerian dan lembaga.

1.2.1.1 Konsumsi Swasta [Rumah Tangga & LNPRT]

Konsumsi swasta pada triwulan I 2025 tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan laporan, konsumsi swasta tumbuh 4,03% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan IV 2024 yang sebesar 3,19% (yoy) (Tabel 1.1). Peningkatan konsumsi swasta NTB ditopang oleh akselerasi kinerja konsumsi rumah tangga. Pada triwulan laporan, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,18% (yoy) dan lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 3,25% (yoy). Peningkatan kinerja konsumsi rumah tangga sejalan dengan peningkatan konsumsi kebutuhan pokok seiring momentum Ramadan dan HBKN Idulfitri. Hal tersebut ditopang peningkatan optimisme masyarakat yang tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen Bank Indonesia yang mengalami peningkatan dari rata-rata 135,24 pada triwulan IV 2024 menjadi rata-rata 137,54 triwulan laporan (Grafik 1.5). Lebih lanjut, kebijakan diskon tarif listrik 50% pada periode Januari s.d. Februari 2025 turut memberikan stimulus konsumsi yang tercermin akselerasi konsumsi listrik rumah tangga dari 6,96% (yoy) pada triwulan IV 2024 menjadi 28,78% (yoy) pada triwulan laporan (Grafik 1.6).

Grafik 1.5 Indeks Penghasilan

Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia

Grafik 1.6 Konsumsi Listrik Rumah Tangga

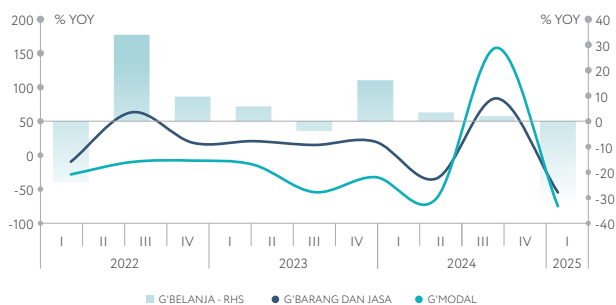
Sumber: PLN

Di sisi lain, kinerja konsumsi Lembaga Nonprofit Rumah Tangga (LNPR) pada triwulan I 2025 mengalami penurunan. Pada triwulan I 2025, konsumsi LNPR mengalami kontraksi -1,09% (yoy) setelah tumbuh 1,03% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Kontraksi kinerja konsumsi LNPR disebabkan oleh normalisasi pasca Pemilu dan Pemilu pada tahun 2024.

1.2.1.2 Konsumsi Pemerintah

Berbeda dengan konsumsi swasta, konsumsi pemerintah pada triwulan I 2025 relatif tetap dengan kecenderungan melambat. Pada triwulan laporan, kinerja konsumsi pemerintah tercatat tumbuh 4,15% (yoy), relatif melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 4,43% (yoy) (Tabel 1.1). Perlambatan kinerja konsumsi pemerintah disebabkan oleh kebijakan pembatasan belanja pemerintah, khususnya belanja perjalanan dinas belanja barang non operasional, pembatasan pengeluaran untuk kegiatan seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, seminar, dan FGD. Hal tersebut tercermin dari penurunan kinerja komponen belanja barang dan jasa serta belanja modal (Grafik 1.7). Meski demikian, konsumsi pemerintah tetap tumbuh positif seiring dengan pencairan tunjangan hari raya ASN menjelang HBKN Idulfitri.

Grafik 1.7 Perkembangan Belanja Pemerintah

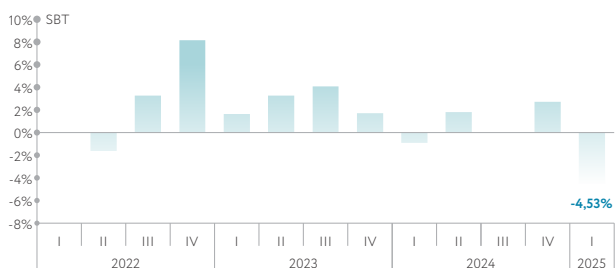


Sumber: DJPb dan BPKAD Provinsi NTB, diolah

1.2.2 Investasi

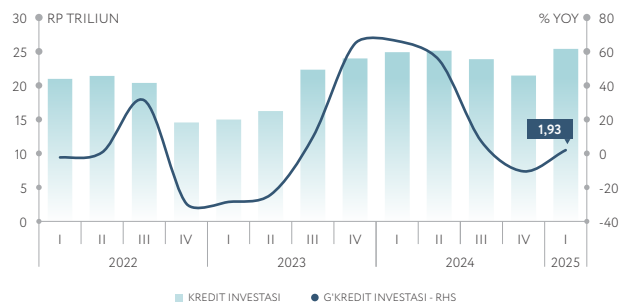
Kinerja pembentukan modal tetap atau investasi di NTB tercatat mengalami kontraksi pada triwulan I 2025. Investasi tercatat mengalami kontraksi -1,67% (yoy) pada triwulan I 2025, setelah tumbuh 2,78% (yoy) pada triwulan sebelumnya (Tabel 1.1).

Grafik 1.8 Perkembangan SKDU Konstruksi



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 1.9 Perkembangan Kredit Investasi



Sumber: Laporan Bank Umum (Lokasi Proyek)

Kontraksi investasi diakibatkan oleh berakhirnya proyek swasta bernilai signifikan (PLTMG Sumbawa 2 di Kab. Sumbawa dan PLTU Lombok FTP2 di Kab. Lombok Timur) dan penundaan investasi proyek fisik pemerintah seiring konsolidasi anggaran di awal tahun. Hal tersebut tercermin dari saldo bersih tertimbang (SBT) survei kepuasan dunia usaha (SKDU) Bank Indonesia yang menunjukkan penurunan kegiatan usaha sektor konstruksi. Pada triwulan I 2025, realisasi SBT sektor konstruksi tercatat sebesar -4,52%, lebih rendah dibandingkan realisasi triwulan sebelumnya yang sebesar 2,72% (Grafik 1.8). Meski demikian, kontraksi investasi yang lebih dalam tertahan oleh kinerja penyaluran kredit investasi yang mengalami peningkatan (Grafik 1.9). Pada triwulan I 2025, penyaluran kredit investasi tercatat tumbuh 1,93% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi -10,54% (yoy).

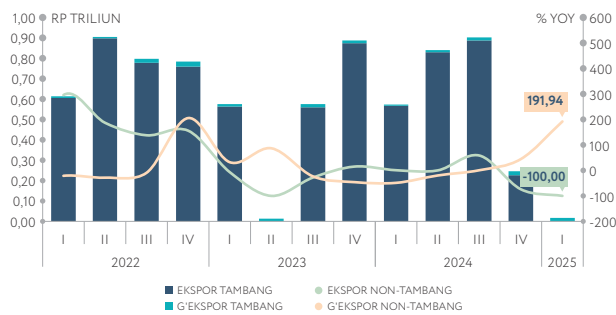
1.2.3 Net Impor

Neraca perdagangan NTB pada triwulan I 2025 mengalami net impor Rp3,18 triliun, lebih rendah dibandingkan net impor triwulan sebelumnya yang sebesar Rp3,29 triliun. Seiring dengan hal tersebut, net impor tumbuh 64,51% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 107,64% (yoy). Peningkatan net impor pada triwulan berjalan disebabkan oleh kontraksi ekspor barang dan jasa akibat berakhirnya relaksasi izin ekspor konsentrat tembaga dan produksi peleburan (*smelter*) tembaga yang di bawah target. Impor barang dan jasa juga tercatat mengalami kontraksi yang relatif lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya seiring inflasi yang lebih terjaga sehingga mendorong peningkatan impor barang konsumsi.

1.2.3.1 Ekspor Barang dan Jasa

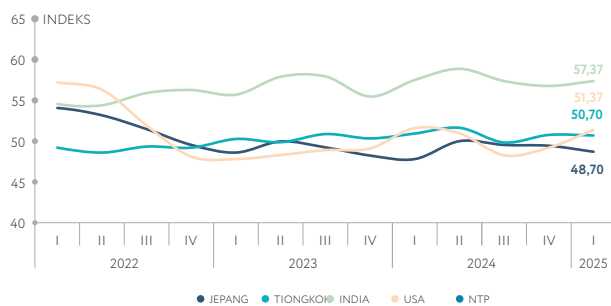
Ekspor barang dan jasa pada triwulan I 2025 mengalami kontraksi sebesar -41,05% (yoy), relatif tetap dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi -41,43% (yoy) (Tabel 1.1). Kontraksi tersebut diakibatkan berakhirnya relaksasi ekspor konsentrat pada Desember 2024. Hal tersebut tercermin pada ketiadaan ekspor tambang pada triwulan I 2025, setelah mencatatkan nilai ekspor sebesar USD226,64 juta pada triwulan sebelumnya (Grafik 1.10).

Grafik 1.10 Perkembangan Ekspor



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 1.11 PMI Manufaktur Negara Mitra Dagang Utama



Sumber: Trading Economics

Meski demikian, kontraksi ekspor yang lebih dalam tertahan oleh akselerasi kinerja ekspor nontambang. Pada triwulan I 2025, ekspor nontambang tercatat tumbuh 191,94% (yoy), terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 44,45% (yoy) (Grafik 1.10). Akselerasi kinerja nontambang didorong oleh akselerasi kinerja penjualan ekspor komoditas mutiara (HS2 71) yang menjadi produk ekspor nontambang unggulan NTB seiring faktor cuaca yang lebih baik sehingga terjadi peningkatan hasil panen mutiara. Ekspor komoditas HS2 71 tumbuh mencapai 72,79% (yoy) pada triwulan I 2025, setelah terkontraksi 26,77% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Lebih lanjut, data BPS menunjukkan terdapat ekspor komoditas kendaraan dan bagiannya (HS 87) ke Malaysia senilai USD2,06 juta pada Maret 2025.

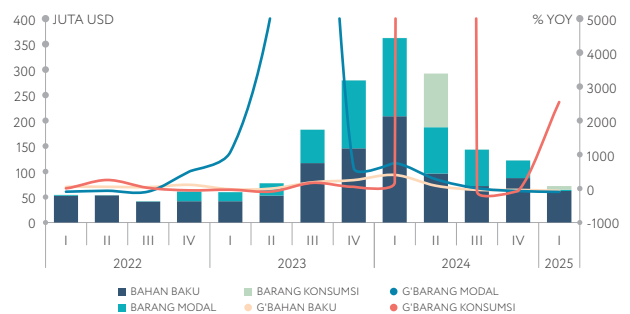
Ke depan, kinerja ekspor barang dan jasa diperkirakan mengalami perbaikan seiring produksi smelter yang akan lebih baik. Berdasarkan rilis, PT Amman Mineral Internasional (AMMAN), smelter di Kab. Sumbawa Barat dapat menghasilkan 220 ribu ton katoda tembaga, 527 ribu ons emas batangan, dan 1.800 ribu ton perak batangan dalam periode satu tahun. Lebih lanjut, penyerapan lebih lanjut, penjualan produk *smelter* diperkirakan tetap terjaga seiring dengan PMI Manufaktur negara mitra dagang utama yang tetap kuat (Grafik 1.11). Pada triwulan laporan, kapasitas produksi smelter baru sebesar 48% pada masa *commissioning test* dan ditargetkan mulai beroperasi penuh pada awal tahun 2026.

1.2.3.2 Impor Barang dan Jasa

Sejalan dengan ekspor, impor barang dan jasa turut mengalami kontraksi pada triwulan I 2025. Impor barang dan jasa tercatat terkontraksi -22,43% (yoy) pada triwulan I 2025, relatif lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi -23,55% (yoy). Perbaikan impor didorong oleh akselerasi kinerja komponen impor barang konsumsi. Pada triwulan I 2025, impor barang konsumsi tercatat tumbuh 75,41% (yoy) setelah mengalami kontraksi -72,24% (yoy) pada triwulan sebelumnya (Grafik 1.12). Peningkatan impor tersebut didorong oleh impor beras (HS2 10) dari Pakistan dan Myanmar guna memenuhi kebutuhan cadangan beras pemerintah untuk bantuan sosial.

Disisi lain impor bahan baku dan barang modal tercatat mengalami kontraksi yang lebih dalam. Pada triwulan I 2025, impor bahan baku dan barang modal tercatat mengalami kontraksi masing-masing sebesar -70,26% (yoy) dan -94,08% (yoy) (Grafik 1.10). Kontraksi tersebut lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya akibat berakhirnya proyek konstruksi bernilai signifikan, seperti PLTMG Sumbawa 2 dan PLTU Lombok FTP2.

Grafik 1.12 Perkembangan Komponen Impor



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

1.3 PDRB SISI PENAWARAN

Dari sisi penawaran, penurunan kinerja perekonomian NTB pada triwulan I 2025 berkontribusi oleh kontraksi LU Pertambangan dan LU Konstruksi seiring penurunan produksi tembaga dan berakhirnya proyek bernilai signifikan. Meski demikian, penurunan yang lebih dalam tertahan oleh peningkatan kinerja LU Pertanian seiring masuknya panen raya komoditas padi dan jagung. Lebih lanjut, LU Perdagangan dan LU Transportasi juga tercatat tetap tumbuh positif seiring momentum Ramadan dan HBKN Idulfitri.

Tabel 1.2 Pertumbuhan PDRB NTB - Sisi Penawaran (% yoy)

KOMPONEN PENGELUARAN	2023	2023	2024				2024	2025
	IV		I	II	III	IV		I
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,45	2,05	(4,13)	5,17	2,28	2,75	1,54	10,28 ▲
Pertambangan dan Penggalian	(0,26)	(10,39)	12,48	46,00	18,05	-16,84	11,66	-30,14 ▼
Industri Pengolahan	4,16	2,51	2,44	9,88	3,03	2,49	4,19	24,89 ▲
Pengadaan Listrik, Gas dan Produksi Es	(0,17)	5,04	6,50	4,76	9,37	16,29	9,08	11,66 ▼
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,00	1,85	4,47	1,49	(3,20)	0,61	0,77	2,54 ▲
Konstruksi	5,09	10,87	9,46	0,12	(0,35)	2,96	2,93	-1,52 ▼
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,72	6,94	3,79	4,83	8,53	6,31	5,87	5,24 ▼
Transportasi dan Pergudangan	7,82	8,14	4,63	4,40	4,57	3,27	4,21	1,95 ▼
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,81	8,97	3,97	10,17	11,74	7,26	8,37	3,17 ▼
Informasi dan Komunikasi	6,53	4,88	8,16	1,75	4,52	3,21	4,34	3,41 ▲
Jasa Keuangan dan Asuransi	10,31	(1,20)	5,34	18,64	10,82	-8,91	5,71	0,84 ▲
Real Estate	1,99	4,40	3,89	3,12	3,56	5,50	4,02	2,73 ▼
Jasa Perusahaan	3,35	7,40	4,95	5,45	5,61	4,98	5,24	4,84 ▼
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,17	0,55	8,71	6,07	2,05	9,44	6,56	6,96 ▼
Jasa Pendidikan	5,17	5,12	4,16	1,95	2,98	4,81	3,47	2,94 ▼
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,68	6,03	6,37	6,78	6,89	4,82	6,19	2,39 ▼
Jasa lainnya	7,84	6,50	5,21	5,61	2,51	5,92	4,81	3,54 ▼
PDRB	3,66	1,80	4,75	11,06	6,22	-0,50	5,30	-1,47 ▼

Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

▲ Lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya ▼ Lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya ► Sama dengan triwulan sebelumnya

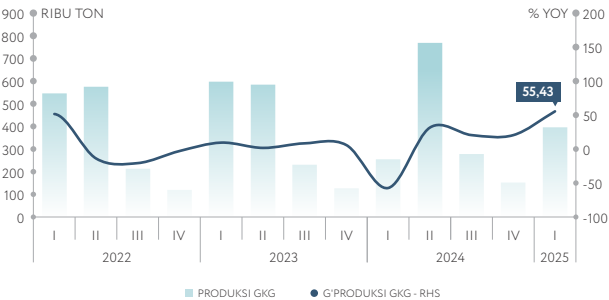
1.3.1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Kinerja LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan tercatat tumbuh mencapai 10,28% (yoy) pada triwulan I 2025 (Tabel 1.2). Kinerja tersebut merupakan pertumbuhan paling tinggi sejak tahun 2011. Akselerasi kinerja LU Pertanian pada triwulan laporan didorong oleh momentum panen raya komoditas padi dan jagung secara bersamaan. Berdasarkan data Dinas Pertanian Provinsi NTB, produksi gabah giling kering tercatat tumbuh 55,43% (yoy) pada triwulan I 2025 dan lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 20,45% (yoy) (Grafik 1.13). Sejalan dengan itu, produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14% juga tercatat tumbuh mencapai 84,08%, terakselerasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang hanya 16,74% (yoy) (Grafik 1.14). Lebih lanjut, kondisi cuaca yang lebih baik seiring rata-rata curah hujan yang lebih tinggi dibandingkan tahun

sebelumnya (Grafik 1.15) setelah berakhirnya El Nino menjadi faktor *base effect* yang mendorong akselerasi kinerja sektor pertanian pada triwulan laporan.

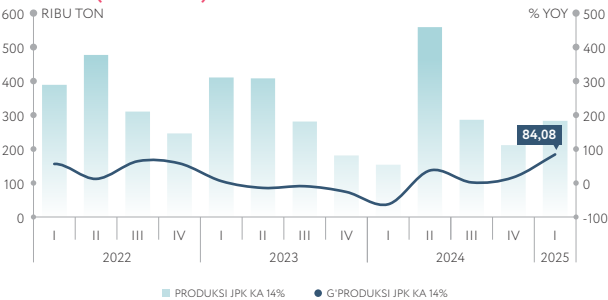
Lebih lanjut, peningkatan kinerja LU Pertanian juga tercermin dari peningkatan nilai tukar petani (NTP). Pada triwulan I 2025, NTP tercatat sebesar 125,53, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 122,03 (Grafik 1.16). Peningkatan tersebut didorong oleh peningkatan nilai tukar petani hortikultura (NTPH) dan nilai tukar nelayan (NTN) di tengah peningkatan harga komoditas yang mendorong peningkatan indeks yang diterima oleh petani. Adapun nilai tukar perkebunan rakyat (NTPR) dan nilai tukar peternakan (NTPT) tercatat relatif stabil dibandingkan triwulan sebelumnya. Di sisi lain, nilai tukar

Grafik 1.13 Produksi Gabah Giling Kering (GKG)



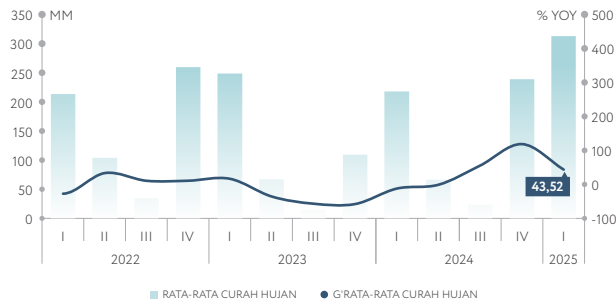
Sumber: Disatn Provinsi NTB, diolah

Grafik 1.14 Produksi Jagung Pipilan Kering dengan Kadar Air 14% (JPA KA 14%)



Sumber: Disatn Provinsi NTB, diolah

Grafik 1.15 Rata-rata Curah Hujan



Sumber: BMKG Provinsi NTB, diolah

padi dan palawija (NTPP) tercatat mengalami penurunan akibat penurunan harga pada momentum masa panen padi dan jagung, sehingga mendorong penurunan indeks yang diterima petani.

1.3.2 Pertambangan dan Penggalian

LU Pertambangan dan Penggalian kembali mengalami kontraksi -16,84% (yoy). Pada triwulan I 2025, LU Pertambangan mengalami kontraksi -30,14% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar -16,84% (yoy) (Tabel 1.2). Pada periode laporan, pertambangan tembaga memasuki tahap awal Fase 8 Tambang Batuan Hijau dengan kadar logam lebih rendah sehingga produksi konsentrat tembaga mengalami penurunan. Selain itu, curah hujan yang lebih tinggi seiring masuknya musim hujan pada triwulan laporan turut menjadi faktor penghambat produksi tembaga yang menggunakan tambang *open pit*.

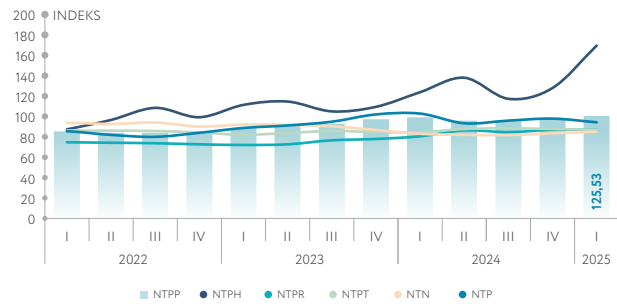
Meski demikian, penurunan kinerja LU Pertambangan ke depan diperkirakan akan lebih baik. Hal tersebut tercermin dari kinerja penyaluran kredit sektor pertambangan yang tercatat mengalami peningkatan dari tumbuh 13,39% (yoy) pada triwulan IV 2024 menjadi 21,42% (yoy) pada triwulan laporan (Grafik 1.17). Sejalan dengan itu, perkembangan kondisi investasi di sektor pertambangan juga tercatat mengalami peningkatan. Berdasarkan Survei Kegiatan Dunia Usaha Bank Indonesia, saldo bersih tertimbang (SBT) kondisi investasi di sektor pertambangan tercatat meningkat dari 2,50% pada triwulan IV 2024 menjadi 26,69% pada triwulan laporan (Grafik 1.18). Hal tersebut seiring dengan penambangan Fase 8 yang lebih dalam dan mengandung bijih mineral dengan kadar lebih tinggi. Lebih

Grafik 1.17 Perkembangan Kredit Pertambangan



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik 1.16 Nilai Tukar Petani dan Komponennya



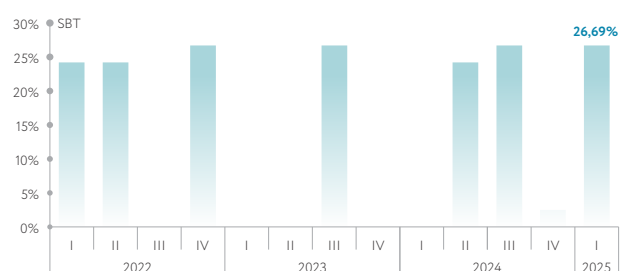
Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

lanjut, berdasarkan laporan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN), salah satu perusahaan tambang tembaga dan emas di Provinsi NTB, total cadangan mineral Fase 8 sekitar 460 juta ton akan memperpanjang usia tambang hingga tahun 2030. Ke depan, permintaan terhadap tembaga global akan mengalami peningkatan seiring peningkatan adopsi teknologi rendah karbon yang menjadikan tembaga sebagai bahan baku utama, seperti kendaraan listrik dan infrastruktur energi terbarukan.

1.3.3 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

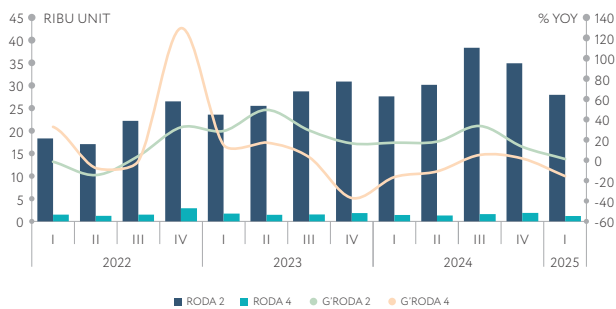
Pada triwulan I 2025, LU Perdagangan tercatat tetap tumbuh positif meskipun melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Berdasarkan data BPS, LU Perdagangan tumbuh 5,24% (yoy) pada triwulan I 2025, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 6,31% (yoy) (Tabel 1.2). Perlambatan kinerja LU Perdagangan diakibatkan oleh penurunan kinerja perdagangan besar, khususnya penjualan kendaraan bermotor. Berdasarkan data Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda Provinsi NTB), penjualan kendaraan roda 2 pada triwulan I tercatat tumbuh 1,19% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 13,14% (yoy) (Grafik 1.19). Sejalan dengan itu, penjualan kendaraan roda 4 tercatat mengalami kontraksi -15,61% (yoy) pada triwulan laporan, setelah tumbuh 1,63% (yoy) pada triwulan IV 2024. Lebih lanjut, perlambatan kinerja LU Perdagangan tercermin dari kinerja penyaluran kredit sektor perdagangan yang mengalami perlambatan dari tumbuh 7,14% (yoy) pada triwulan IV 2024 menjadi 3,05% (yoy) pada triwulan laporan (Grafik 1.20).

Grafik 1.18 Perkembangan Kondisi Investasi Sektor Pertambangan



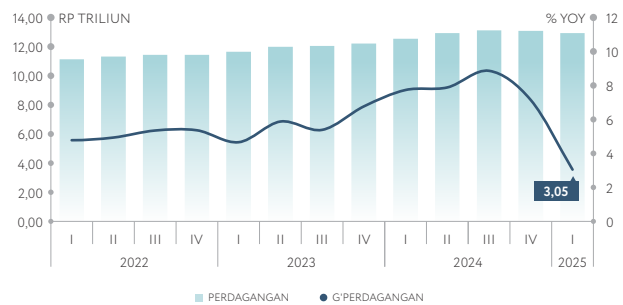
Sumber: Bank Indonesia

Grafik 1.19 Perkembangan Penjualan Kendaraan Bermotor



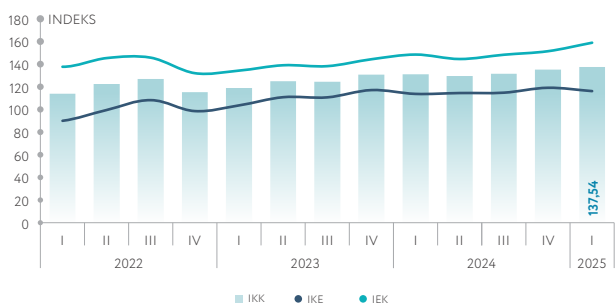
Sumber: Bappenda Provinsi NTB

Grafik 1.20 Perkembangan Kredit Perdagangan



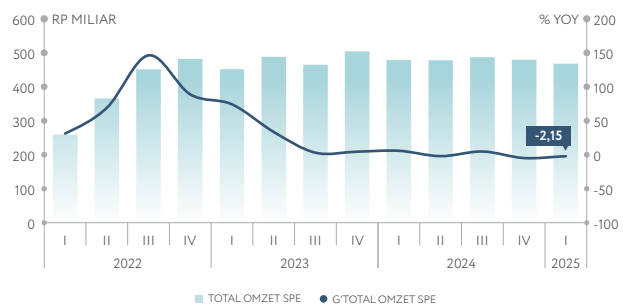
Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik 1.21 Survei Konsumen



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 1.22 Survei Pedagang Eceran



Sumber: Bank Indonesia, diolah

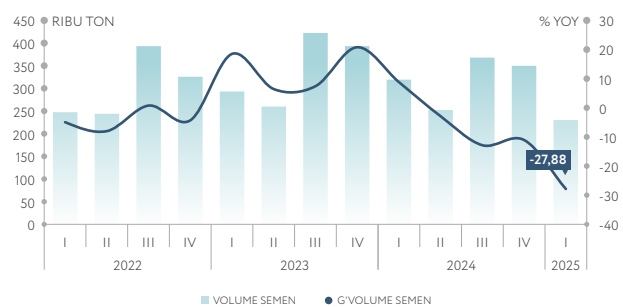
Meski demikian, perlambatan LU Perdagangan yang lebih dalam tertahan oleh optimisme masyarakat yang tetap terjaga seiring momentum Ramadan dan HBKN Idulfitri. Berdasarkan Survei Konsumen Bank Indonesia, optimisme masyarakat tetap terjaga yang tercermin dari indeks keyakinan konsumen yang sebesar 137,54 pada triwulan I 2025, lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 135,24 (Grafik 1.21). Optimisme tersebut sejalan dengan Survei Pedagang Eceran yang menunjukkan perbaikan kinerja omzet. Pada triwulan I 2025, omzet penjualan eceran tercatat mengalami kontraksi -2,15%, lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar -4,88% (Grafik 1.22).

1.3.4 Konstruksi

Kinerja LU Konstruksi mengalami kontraksi seiring berakhirnya proyek swasta yang bernilai signifikan dan penundaan pembangunan proyek fisik pemerintah. Pada triwulan I 2025, LU Konstruksi tercatat mengalami kontraksi sebesar -1,52% (yoy) setelah tumbuh 2,96% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Kontraksi tersebut diakibatkan oleh berakhirnya pembangunan beberapa proyek bernilai signifikan yakni PLTMG Sumbawa 2 dan PLTU Lombok FTP2. Lebih lanjut, berdasarkan instruksi Kementerian Keuangan kepada Dinas Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), pelaksanaan proyek fisik di daerah mengalami penundaan seiring penurunan anggaran sebesar 50%.

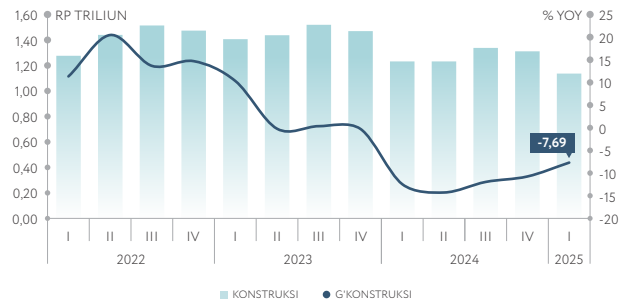
Lebih lanjut, penurunan kinerja LU Konstruksi tercermin dari kinerja volume penjualan semen yang mengalami kontraksi lebih dalam dari -11,07% (yoy) pada triwulan IV 2024 menjadi -27,88% pada triwulan laporan (Grafik 1.23). Meski demikian, penurunan kinerja LU Konstruksi yang lebih dalam tertahan oleh kinerja penyaluran kredit konstruksi yang mengalami perbaikan dari kontraksi 10,75% (yoy) pada triwulan IV 2024 menjadi kontraksi 7,69% (yoy) pada triwulan laporan (Grafik 1.24).

Grafik 1.23 Volumen Penjualan Semen



Sumber: Asosiasi Semen Indonesia

Grafik 1. 24 Perkembangan Kredit Konstruksi



Sumber: Laporan Bank Umum (Lokasi Proyek)



02

Keuangan Pemerintah

Secara nominal, realisasi pendapatan gabungan Pemerintah Pusat (APBN) dan Provinsi NTB (APBD) triwulan I 2025 mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Adapun persentase realisasi pendapatan terhadap pagu anggaran tahun 2025 untuk APBN, APBD Provinsi NTB, dan APBD Kabupaten/Kota masing-masing sebesar 17,90%, 14,58% dan 17,90%. Sementara secara spasial, realisasi pendapatan Kabupaten/Kota terhadap pagu anggaran tahun 2025 tertinggi adalah Kabupaten Sumbawa Barat (29,68%) dan terendah Kabupaten Lombok Barat (6,25%). Di sisi lain, realisasi belanja gabungan Pemerintah Pusat dan Provinsi NTB (termasuk kabupaten/kota) pada triwulan I 2025 tercatat mengalami kenaikan, dengan realisasi sebesar Rp10.078,98 miliar atau 18,89% dari target. Secara spasial, persentase realisasi penyerapan belanja tertinggi adalah Kabupaten Lombok Timur (21,58%), sedangkan terendah yaitu Kabupaten Lombok Barat (6,84%).

2.1 Gambaran Umum Perkembangan Keuangan Pemerintah

Pada tahun 2025, anggaran belanja Pemerintah secara agregat di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalami sedikit penurunan. Anggaran belanja Pemerintah tercatat sebesar Rp53.340,53 miliar, turun -1,42% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp54.106,71 miliar. Berdasarkan Grafik 2.1, komposisi anggaran belanja Pemerintah didominasi oleh anggaran Pemerintah Pusat sebesar Rp27.249,39 miliar (pangsa 51,09%), kemudian diikuti oleh anggaran gabungan 10 Kabupaten/Kota di NTB (APBD Kabupaten/Kota) sebesar Rp19.872,96 miliar (pangsa 37,26%) dan anggaran Pemerintah Provinsi NTB (APBD Provinsi) sebesar Rp6.218,18 miliar (pangsa 11,66%).

Lebih lanjut, kinerja realisasi belanja Pemerintah di wilayah NTB tercatat meningkat. Sampai dengan triwulan I 2025, realisasi total belanja Pemerintah di NTB mencapai Rp10.078,00 miliar atau meningkat 21,82% (yoy) dibandingkan triwulan I 2024 yang sebesar Rp8.272,59 miliar. Hal tersebut didorong oleh realisasi belanja APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, dan belanja APBN yang masing-masing meningkat sebesar 52,12% (yoy), 59,49% (yoy) dan 7,82% (yoy).

Sejalan dengan itu, persentase realisasi belanja pemerintah terhadap pagu pada triwulan I 2025 tercatat meningkat (Grafik 2.2). Persentase realisasi anggaran belanja hingga triwulan I 2025 adalah sebesar 18,89%, lebih tinggi dibandingkan triwulan I tahun sebelumnya sebesar 15,29%. Kenaikan persentase ini didorong oleh capaian belanja APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota

yang masing-masing mengalami peningkatan. Capaian belanja APBD Provinsi meningkat dari 8,59% pada triwulan I 2024 menjadi 14,24% pada triwulan laporan. Adapun capaian belanja APBD Kabupaten/Kota pada triwulan I 2025 tercatat 13,99%, lebih tinggi dibandingkan triwulan I tahun sebelumnya yakni sebesar 8,63%. Di sisi lain, realisasi belanja APBN meningkat dari 21,92% pada triwulan I 2024 menjadi 23,53% pada triwulan laporan.

2.2 APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat

APBD Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB pada tahun 2025 tercatat lebih rendah dibandingkan tahun 2024. APBD Pemprov NTB terdiri dari anggaran pendapatan daerah sebesar Rp6.186,03 miliar atau turun -8,19% (yoy), serta anggaran belanja sebesar Rp6.218,18 miliar yang juga terpantau turun -8,27% (yoy). Secara keseluruhan tahun 2025 APBD Pemprov NTB diperkirakan mengalami defisit sebesar Rp32,15 miliar. Penetapan pagu APBD yang defisit tersebut diimbangi oleh pembiayaan daerah yang mengalami surplus dengan nilai nominal yang sama.

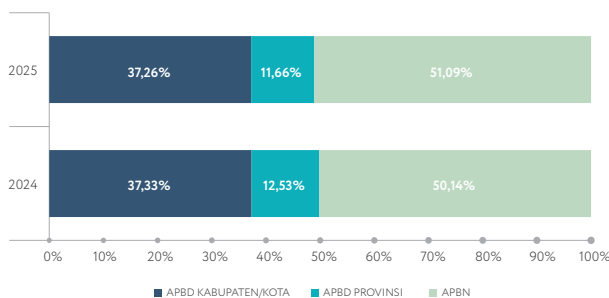
2.2.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat

2.2.1.1 Anggaran Pendapatan Daerah

Pada APBD tahun 2025, pagu anggaran pendapatan daerah Pemprov NTB ditetapkan lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya (Tabel 2.1). Penurunan pagu anggaran terjadi pada pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar -23,98% (yoy), sementara pos Pendapatan Transfer dianggarkan naik 0,90% (yoy). Adapun pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami kenaikan target menjadi Rp210,10 miliar pada tahun 2025, setelah pada tahun sebelumnya tidak dianggarkan. Pos PAD mengalami penurunan dari Rp3.305,83 miliar pada APBD Perubahan tahun 2024 menjadi Rp2.513,23 miliar pada APBD tahun 2025. Turunnya anggaran tersebut didorong oleh penurunan target pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah masing-masing sebesar -18,77% (yoy), -4,06% (yoy), dan -89,50% (yoy). Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp1.614,95 miliar, turun dibandingkan target pada APBD Perubahan tahun 2024 yang sebesar Rp3.305,83 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh mulai berlakunya opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Meskipun menurut UU tersebut terdapat peluang tambahan dari opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), namun kontribusinya diperkirakan belum signifikan dalam jangka pendek untuk menaikkan jumlah pendapatan pajak. Adapun target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada APBD Provinsi tahun 2025 naik sebesar 9,61% (yoy).

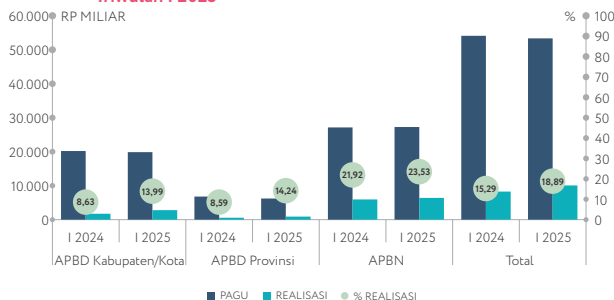
Di sisi lain, pos Pendapatan Transfer ditargetkan sedikit naik dari Rp3.431,93 miliar pada APBD Perubahan tahun 2024 menjadi Rp3.462,70 miliar pada APBD tahun 2025. Peningkatan tersebut terjadi pada pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang tumbuh 0,94% (yoy). Kenaikan yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan Pendapatan Transfer Antardaerah yang ditargetkan turun -30,48% (yoy).

Grafik 2.1 Proporsi Pagu Belanja Pemerintah di Provinsi NTB Tahun 2025



Sumber: DJPb dan BPKAD Provinsi NTB, dialah

Grafik 2.2 Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah di Provinsi NTB s.d. Triwulan I 2025



Sumber: DJPb dan BPKAD Provinsi NTB, dialah

Tabel 2.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan APBD Pemprov NTB

URAIAN	Pagu APBD Provinsi NTB		% Perubahan	Realisasi APBD Provinsi NTB				Pertumbuhan Realisasi Tw I 2025 (% YOY)
	2023	2024		Realisasi Tw-I 2024		Realisasi Tw-I 2025		
	(Rp Miliar)	(Rp Miliar)		(Rp Miliar)	% Pagu	(Rp Miliar)	% Pagu	
Pendapatan Daerah	6.737,76	6.186,03	-8,19	966,34	14,34	901,88	14,58	-6,67
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3.305,83	2.513,23	-23,98	116,49	3,52	176,00	7,00	51,09
Pajak Daerah	1.988,20	1.614,95	-18,77	115,56	5,81	171,78	10,64	48,64
Retribusi Daerah	795,58	763,29	-4,06	0,02	0,00	0,73	0,10	3.047,75
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	80,90	88,67	9,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD Yang Sah	441,15	46,32	-89,50	0,90	0,20	3,50	7,55	286,81
Pendapatan Transfer	3.431,93	3.462,70	0,90	849,85	24,76	725,87	20,96	-14,59
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.427,67	3.459,73	0,94	849,67	24,79	725,68	20,98	-14,59
Pendapatan Transfer Antardaerah	4,27	2,97	-30,48	0,19	4,35	0,19	6,54	4,46
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	0,00	210,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00	208,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: BPKAD Provinsi NTB, diolah

2.2.1.2 Realisasi Pendapatan Daerah

Realisasi pendapatan daerah Pemprov NTB tercatat menurun secara nominal dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Hingga triwulan I 2025, realisasi pendapatan daerah Pemprov NTB mencapai Rp901,88 miliar atau turun -6,67% (yoy) dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp966,34 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan pada realisasi Pendapatan Transfer yang mengalami kontraksi -14,59% (yoy) dari realisasi Rp849,86 miliar pada triwulan I 2024 menjadi Rp725,87 miliar pada triwulan laporan. Kontraksi yang lebih dalam tertahan oleh kenaikan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar 51,09% (yoy) dari Rp116,49 miliar pada triwulan I 2024 menjadi Rp176,00 miliar pada triwulan laporan. Meskipun mengalami penurunan secara nominal, persentase realisasi pendapatan terhadap pagu APBD tetap meningkat dari 14,34% pada triwulan I 2024 menjadi 14,58% pada triwulan laporan.

Lebih lanjut, Derajat Otonomi Fiskal (DOF) APBD Provinsi NTB pada triwulan I 2025 tercatat sebesar 19,52%, relatif mengalami peningkatan dibandingkan triwulan I tahun sebelumnya yang sebesar 12,05% (Grafik 2.3). Hal tersebut disebabkan oleh pangsa

realisasi Pendapatan Transfer terhadap realisasi Pendapatan Daerah pada triwulan I 2025 relatif mengalami penurunan, yakni sebesar 80,48% dari sebelumnya sebesar 87,95% pada triwulan yang sama tahun 2024. Sejak 2022 tren DOF APBD Provinsi NTB mengalami peningkatan, sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang mengarahkan peningkatan kemandirian fiskal daerah.

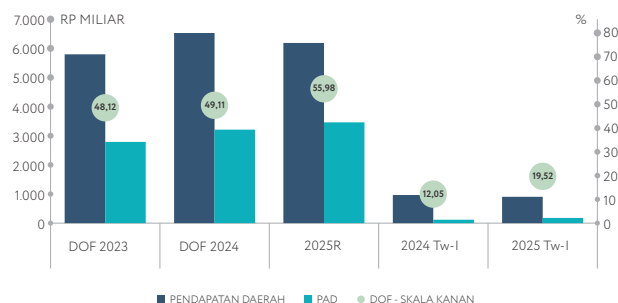
2.2.2 Belanja Daerah APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat

2.2.2.1 Anggaran Belanja Daerah

Anggaran belanja daerah Pemprov NTB tahun 2025 tercatat lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya (Tabel 2.2). Penurunan pagu anggaran belanja didorong oleh penurunan pada Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Transfer yang masing-masing terkontraksi sebesar -10,63% (yoy), -32,62% (yoy), dan -18,59% (yoy). Belanja operasi dianggarkan sebesar Rp4.643,94 miliar pada APBD 2025 dari sebelumnya sebesar Rp5.196,47 miliar pada APBD Perubahan 2024. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial yang masing-masing turun sebesar -18,54% (yoy), -25,97% (yoy), -59,08% (yoy), dan -41,63% (yoy). Belanja Barang dan Jasa mengalami penurunan menjadi Rp1.991,35 miliar pada APBD 2025 dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.444,61 miliar. Adapun Belanja Pegawai tercatat dianggarkan naik 3,88% (yoy) dari Rp2.397,76 miliar pada APBD Perubahan 2024 menjadi Rp2.490,70 miliar pada APBD 2025.

Lebih lanjut, kenaikan anggaran belanja daerah terjadi pada pos Belanja Tak Terduga (BTT). Belanja Tak terduga tercatat mengalami peningkatan dari Rp2,48 miliar pada APBD Perubahan 2024 menjadi Rp370,85 miliar pada APBD 2025 atau naik sebesar 14.866,02% (yoy). Peningkatan ini guna menangani keadaan seperti

Grafik 2.3 Perkembangan Derajat Otonomi Fiskal APBD Provinsi NTB



Sumber: BPKAD Provinsi NTB, diolah

Tabel 2.2 Anggaran dan Realisasi Belanja APBD Pemprov NTB

URAIAN	Pagu APBD Provinsi NTB		% Perubahan	Realisasi APBD Provinsi NTB				Pertumbuhan Realisasi Tw I 2025 (% YOY)
	2023	2024		Realisasi Tw-I 2024		Realisasi Tw-I 2025		
	(Rp Miliar)	(Rp Miliar)		(Rp Miliar)	% Pagu	(Rp Miliar)	% Pagu	
Belanja Daerah	6.778,91	6.218,18	-8,27	582,26	8,59	885,71	14,24	52,12
Belanja Operasi	5.196,47	4.643,94	-10,63	494,80	9,52	774,53	16,68	56,53
Belanja Pegawai	2.397,76	2.490,70	3,88	392,42	16,37	474,87	19,07	21,01
Belanja Barang dan Jasa	2.444,61	1.991,35	-18,54	98,48	4,03	257,88	12,95	161,86
Belanja Bunga	47,22	34,96	-25,97	0,00	0,00	6,37	18,24	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	3,91	0,00	0,00	0,00	-100,00
Belanja Hibah	299,10	122,39	-59,08	0,00	0,00	35,41	28,93	0,00
Belanja Bantuan Sosial	7,79	4,54	-41,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal	601,64	406,95	-32,36	0,23	0,04	3,06	0,75	1.244,78
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	-100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	271,37	262,41	-3,30	0,00	0,00	2,48	0,95	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	232,86	111,84	-51,97	0,00	0,00	0,58	0,52	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	79,33	12,70	-83,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	17,67	18,00	1,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya	0,42	2,01	382,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tak Terduga	2,48	370,85	14.866,02	0,00	0,00	0,04	0,01	0,00
Belanja Transfer	978,31	796,45	-18,59	87,23	8,92	108,07	13,57	23,89
Belanja Bagi Hasil	977,63	795,76	-18,60	87,23	8,92	108,07	13,58	23,89
Belanja Bantuan Keuangan	0,68	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: BPKAD Provinsi NTB, diolah

bencana hidrometeorologi dan keadaan darurat lainnya, serta pengalokasian anggaran tambahan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

2.2.2.2 Realisasi Belanja Daerah

Realisasi Belanja Daerah Pemprov NTB sampai dengan triwulan I 2025 tercatat sebesar Rp885,71 miliar atau naik 52,12% (yoy) dibandingkan triwulan I tahun sebelumnya sebesar Rp582,26 miliar (Tabel 2.2). Lebih lanjut, persentase realisasi belanja daerah terhadap pagu juga mengalami peningkatan dari 9,52% pada triwulan I 2024 menjadi 16,68% pada triwulan laporan. Peningkatan tersebut didorong oleh peningkatan di semua pos Belanja Daerah yakni Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer. Pos Belanja Operasi tercatat tumbuh 16,68% (yoy) menjadi Rp774,53 miliar, menyumbang 87,45% dari total realisasi belanja APBD Provinsi. Sementara itu pos Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga masing-masing tumbuh sebesar 1.244,78% (yoy) dan 23,89% (yoy).

Realisasi Belanja Operasi triwulan I 2025 menunjukkan peningkatan kinerja dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sejalan dengan peningkatan realisasi seluruh komponennya kecuali pada Belanja Subsidi yang belum mencatatkan realisasi. Peningkatan realisasi pos Belanja Operasi terutama bersumber dari peningkatan Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa yang masing-masing menyumbang 61,31% dan

33,29% dari total realisasi Belanja Operasi. Belanja Pegawai tercatat tumbuh 21,01% (yoy) dari Rp392,42 miliar pada triwulan I 2024 menjadi Rp474,87 miliar pada triwulan laporan seiring dengan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) ASN pada bulan Maret. Di sisi lain, Belanja Barang dan Jasa tumbuh 161,86% (yoy) menjadi Rp257,88 miliar pada triwulan I 2025 dari Rp98,48 miliar pada triwulan yang sama tahun sebelumnya.

2.3 APBD Gabungan 10 Kabupaten/Kota Nusa Tenggara Barat

Pagu anggaran pendapatan APBD Kabupaten/Kota di NTB tahun 2025 tercatat lebih rendah dibandingkan tahun 2024. Pendapatan APBD Kabupaten/Kota tahun 2025 ditargetkan mencapai Rp19.687,25 miliar, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp19.859,25 miliar atau mengalami kontraksi -0,87% (yoy). Di sisi lain, target anggaran belanja APBD Kabupaten/Kota juga mengalami penurunan dari Rp20.200,03 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp19.872,96 miliar pada tahun laporan, atau kontraksi sebesar -1,62% (yoy). Hal tersebut mendorong penurunan total defisit anggaran APBD Kabupaten/Kota dari sebelumnya sebesar Rp340,77 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp185,80 miliar pada tahun 2025. Secara spasial, kebijakan surplus anggaran tercatat pada Kab. Lombok Utara dan Kab. Lombok Tengah, sedangkan Kabupaten/Kota lainnya menargetkan adanya defisit anggaran.

2.3.1 Pendapatan Daerah APBD Gabungan Kabupaten/Kota

2.3.1.1 Anggaran Pendapatan Daerah

Anggaran total pendapatan daerah 10 Kabupaten/Kota di NTB pada tahun 2024 tercatat sedikit turun, seiring dengan turunnya target Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Anggaran total pendapatan daerah 10 Kabupaten/Kota di NTB sebesar Rp19.687,17 miliar, turun -0,87% (yoy) dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp19.859,25 miliar (Tabel 2.3). Turunnya pendapatan ini terutama bersumber dari turunnya target Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan masing-masing sebesar -56,75% (yoy) dan -64,37% (yoy). Lebih lanjut, Pendapatan Transfer serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing ditargetkan mengalami peningkatan 2,48% (yoy) dan 1,56% (yoy). Pendapatan Transfer tumbuh dari Rp15.776,84 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp16.168,50 miliar pada tahun laporan, sedangkan PAD meningkat menjadi Rp3.171,24 miliar pada triwulan laporan dari sebelumnya Rp3.122,51 miliar pada triwulan yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan PAD didorong oleh peningkatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan yang masing-masing tumbuh 33,55% (yoy), 203,82% (yoy), dan 5,28% (yoy). Peningkatan anggaran Pajak Daerah utamanya disebabkan oleh mulai berlakunya opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). UU tersebut meningkatkan persentase opsen PKB dan BBNKB yang diterima oleh Kabupaten/Kota dibandingkan tahun sebelumnya.

Anggaran pendapatan Kabupaten/Kota di NTB masih didominasi oleh Pendapatan Transfer (Grafik 2.4). Pada tahun

2025, pangsa Pendapatan Transfer dalam anggaran pendapatan total Kabupaten/kota di NTB tercatat sebesar 82,13%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 79,44%. Tingginya pangsa Pendapatan Transfer sejalan dengan perubahan aturan Dana Bagi Hasil (DBH) dalam UU HKPD, yaitu adanya kenaikan persentase alokasi DBH yang diberikan ke daerah penghasil dan juga daerah pengolah dan daerah non-penghasil yang berbatasan langsung. Sementara itu, pangsa PAD terhadap anggaran pendapatan total Kabupaten/Kota di NTB terpantau relatif meningkat dari 15,72% pada tahun 2024 menjadi 16,11% pada tahun 2025, sedangkan pangsa pos Lain-lain Pendapatan Yang Sah turun dari 4,83% pada tahun 2024 menjadi 1,76% pada tahun laporan. Peningkatan pangsa PAD mendorong peningkatan kapasitas fiskal daerah yang tercermin pada kenaikan DOF Kabupaten/Kota di NTB.

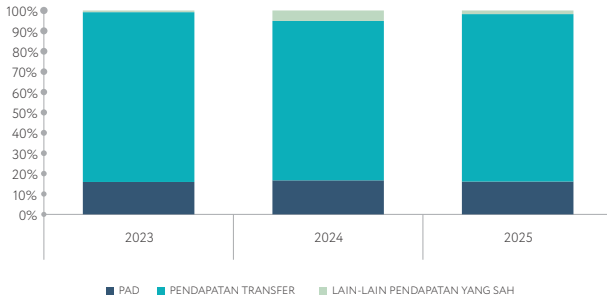
Anggaran total pendapatan daerah 10 Kabupaten/Kota di NTB sebesar Rp19.687,17 miliar, turun -0,87% (yoy) dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp19.859,25 miliar (Tabel 2.3). Turunnya pendapatan ini terutama bersumber dari turunnya target Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan masing-masing sebesar -56,75% (yoy) dan -64,37% (yoy). DOF seluruh Kabupaten/Kota di NTB sebesar 16,11%, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2024 yang sebesar 15,72% (Grafik 2.5). Lebih lanjut, setengah dari jumlah Kabupaten/Kota memiliki DOF lebih tinggi dari rata-rata dan terkonsentrasi di Pulau Lombok, yaitu: Kota Mataram (32,20%), Kab. Lombok Utara (26,35%), Kab. Lombok Barat (22,26%), Kab. Lombok Tengah (15,60%), dan Kabupaten Lombok Timur (15,51%). Di sisi lain, Kab. Sumbawa Barat memiliki DOF terendah pada tahun 2025, yakni 9,38%. Kondisi tersebut disebabkan oleh tingkat ketergantungan terhadap dana Transfer Pemerintah Pusat yang tinggi (93,61%) seiring dengan perolehan Dana Bagi Hasil sektor pertambangan yang cukup signifikan.

Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan APBD Pemerintah Kabupaten/Kota di NTB

URAIAN	Pagu APBD Kab/kota		% Perubahan	Realisasi APBD Kabupaten/kota				Pertumbuhan Realisasi Tw I 2025 (% YOY)
	2023	2024		Realisasi Tw-I 2024		Realisasi Tw-I 2025		
	(Rp Miliar)	(Rp Miliar)		(Rp Miliar)	% Pagu	(Rp Miliar)	% Pagu	
Pendapatan Daerah	19.859,25	19.687,17	-0,87	3.163,38	15,93	3.523,81	17,90	11,39
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3.122,51	3.171,24	1,56	333,52	10,68	389,72	12,29	16,85
Pajak Daerah	1.039,24	1.387,86	33,55	186,59	17,95	209,01	15,06	12,02
Retribusi Daerah	443,59	1.347,73	203,82	30,35	6,84	154,20	11,44	408,07
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	113,61	119,61	5,28	1,00	0,88	0,00	0,00	-100,00
Lain-lain PAD Yang Sah	1.526,07	316,04	-79,29	115,58	7,57	26,52	8,39	-77,06
Pendapatan Transfer	15.776,84	16.168,50	2,48	2.631,02	16,68	3.134,02	19,38	19,12
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	14.779,45	15.482,24	4,76	2.551,76	17,27	3.091,44	19,97	21,15
Pendapatan Transfer Antara daerah	997,40	686,26	-31,19	79,26	7,95	42,58	6,20	-46,28
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	959,90	347,42	-63,81	198,83	20,71	0,07	0,02	-99,96
Pendapatan Hibah	111,19	48,09	-56,75	16,14	14,52	0,07	0,15	-99,56
Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,08	#DIV/0!	0,00	0,00	-100,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	848,71	299,33	-64,73	182,61	21,52	0,00	0,00	-100,00

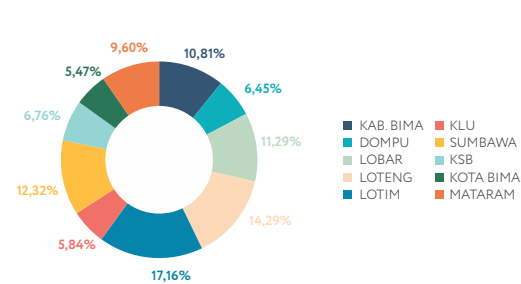
Sumber: BPKAD Provinsi NTB, diolah

Grafik 2.4 Proporsi Komponen Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten/ Kota di NTB



Sumber: BPKAD Provinsi NTB, diolah

Grafik 2.6 Proporsi Anggaran Pendapatan Daerah Spasial Kabupaten/ Kota di NTB



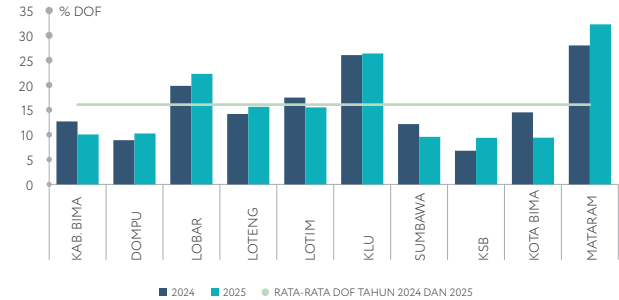
Sumber: BPKAD Provinsi NTB, diolah

Secara spasial, target anggaran pendapatan tertinggi dimiliki oleh Kab. Lombok Timur (Grafik 2.6). Pada tahun 2025, Kab. Lombok Timur menargetkan total anggaran pendapatan sebesar Rp3.378,43 miliar atau sebesar 17,16% dari total anggaran pendapatan Kabupaten/Kota di NTB. Kab. Lombok Timur merupakan wilayah terluas dan penduduk terbanyak di Provinsi NTB sehingga memiliki kebutuhan anggaran yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lain. Selain itu, Kab. Lombok Timur merupakan salah satu sentra LU Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan di NTB dan juga memiliki tingkat kemandirian fiskal yang terbaik kelima di NTB (DOF: 15,51%). Di sisi lain, target pendapatan terendah pada tahun 2025 dimiliki oleh Kota Bima sebesar Rp1077,18 miliar atau hanya sebesar 5,47% dari total anggaran pendapatan Kabupaten/Kota di NTB.

2.3.1.2 Realisasi Pendapatan Daerah

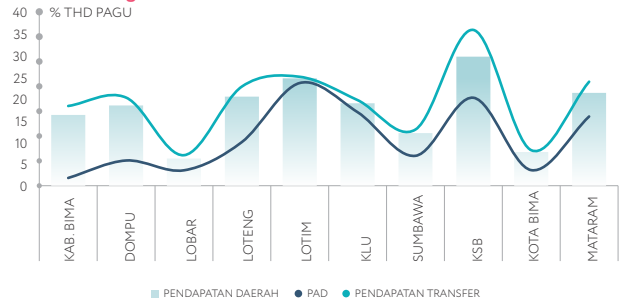
Pendapatan daerah Kabupaten/Kota di NTB sampai dengan triwulan I 2025 meningkat secara nominal maupun persentase. Realisasi pendapatan daerah Kabupaten/Kota di NTB sebesar Rp3.523,81 miliar atau 17,90% dari pagu anggaran (Tabel 2.3). Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2024 yang memiliki realisasi pendapatan daerah sebesar Rp3.163,38 miliar atau 15,93% dari pagu anggaran. Capaian tersebut ditopang oleh peningkatan realisasi pos PAD dan Pendapatan Transfer yang masing-masing tercatat tumbuh sebesar 16,85% (yoy) dan 19,12% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Perkembangan tersebut seiring dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi di daerah serta penerapan beberapa kebijakan

Grafik 2.5 Derajat Otonomi Fiskal Kabupaten/Kota di NTB (berdasarkan anggaran)



Sumber: BPKAD Provinsi NTB, diolah

Grafik 2.7 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota di NTB sampai dengan Triwulan I 2025



Sumber: BPKAD Provinsi NTB, diolah

spasial untuk mendorong kinerja pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kab. Sumbawa Barat tercatat sebagai daerah dengan persentase realisasi pendapatan daerah tertinggi. Sampai dengan triwulan I 2025, Kab. Sumbawa Barat telah merealisasikan hingga 29,68% dari anggaran pendapatan atau sebesar Rp395,00 miliar. Capaian tersebut didorong oleh realisasi pos Pendapatan Transfer sebesar Rp369,75 miliar yang memberikan kontribusi mencapai 93,61% dari total realisasi pendapatan. Di sisi lain, Kabupaten Lombok Barat mencatatkan persentase realisasi pendapatan daerah terendah pada triwulan I 2025, yakni 6,25% dari total anggaran pendapatan atau sebesar Rp138,79 miliar. Rendahnya realisasi pendapatan Kabupaten Lombok Barat sejalan dengan masih rendahnya pos Pendapatan Asli Daerah dan Pos Pendapatan Transfer. Pos Pendapatan Asli Daerah baru terealisasi sebesar 3,54% dari pagu, sementara pos Pendapatan Transfer baru mencatatkan realisasi sebesar 7,02% dari pagu. Adapun pos Lain-lain pendapatan Yang Sah belum mencatatkan realisasi.

2.3.2 Belanja Daerah APBD Gabungan Kabupaten/Kota

2.3.2.1 Anggaran Belanja Daerah

Anggaran total belanja daerah 10 Kabupaten/Kota di NTB pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp19.872,96 miliar atau turun -1,62% (yoy) dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp20.200,03 miliar (Tabel 2.4). Turunnya anggaran ini terutama

bersumber dari penurunan pos Belanja Modal sebesar -21,86% (yoy) dari Rp3.068,37 miliar pada APBD Perubahan tahun 2024 menjadi Rp2.397,76 miliar pada tahun laporan. Namun, penurunan belanja daerah yang lebih dalam tertahan oleh kenaikan pada pos Belanja Operasi, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer. Masing-masing pos tersebut meningkat sebesar 1,56% (yoy), 83,52% (yoy), dan 2,53% (yoy). Pos Belanja Tak Terduga mengalami peningkatan sebagai langkah antisipatif terhadap potensi bencana alam dan situasi darurat yang tidak terduga.

Anggaran belanja Kabupaten/Kota di NTB masih didominasi oleh Belanja Operasi (Grafik 2.8). Pada tahun 2025, pangsa

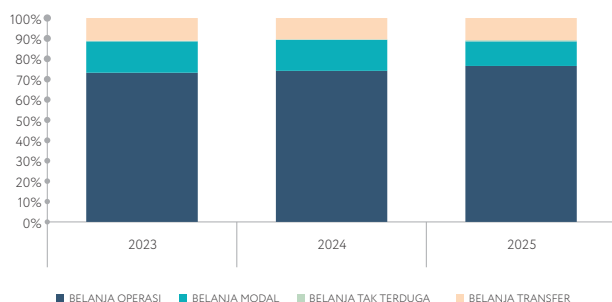
Belanja Operasi dalam anggaran belanja total Kabupaten/Kota di NTB tercatat mencapai 76,50%, relatif meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 74,10%. Di sisi lain, pos Belanja Modal mengalami penurunan pangsa dari 15,19% pada tahun 2024 menjadi 12,07% pada tahun 2025. Penurunan pos Belanja Modal terjadi di hampir semua Kabupaten/Kota di NTB kecuali di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Bima (Grafik 2.9) seiring dengan sudah terlaksananya pembelian aset di tahun sebelumnya dan tidak dianggarkan lagi pada tahun laporan. Di sisi lain, Pos Belanja Transfer juga relatif mengalami peningkatan pangsa dari 10,37% pada tahun 2024 menjadi 10,81% pada tahun laporan.

Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Belanja APBD Pemerintah Kabupaten/Kota di NTB

URAIAN	Pagu APBD Kab/kota		% Perubahan	Realisasi APBD Kabupaten/kota				Pertumbuhan Realisasi Tw I 2025 (% YOY)
	2023	2024		Realisasi Tw-I 2024		Realisasi Tw-I 2025		
	(Rp Miliar)	(Rp Miliar)		(Rp Miliar)	% Pagu	(Rp Miliar)	% Pagu	
Belanja Daerah	20.200,03	19.872,96	-1,62	1.743,39	8,63	2.780,53	13,99	59,49
Belanja Operasi	14.969,05	15.202,98	1,56	1.475,10	9,85	2.267,09	14,91	53,69
Belanja Pegawai	8.049,09	8.859,69	10,07	1.050,67	13,05	1.588,87	17,93	51,22
Belanja Barang dan Jasa	6.085,42	5.866,85	-3,59	362,86	5,96	659,51	11,24	81,76
Belanja Bunga	19,39	9,87	-49,10	6,09	31,41	3,46	35,01	-43,26
Belanja Subsidi	5,10	7,00	37,25	0,00	0,00	0,09	1,31	0,00
Belanja Hibah	751,07	404,97	-46,08	50,95	6,78	12,14	3,00	-76,17
Belanja Bantuan Sosial	58,98	54,60	-7,42	4,53	7,69	3,01	5,52	-33,52
Belanja Modal	3.068,37	2.397,76	-21,86	59,30	1,93	107,72	4,49	81,65
Belanja Modal Tanah	229,84	70,68	-69,25	14,40	6,26	12,86	18,19	-10,70
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	651,23	592,52	-9,01	13,34	2,05	15,80	2,67	18,46
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.031,09	929,53	-9,85	14,55	1,41	26,19	2,82	80,02
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.103,78	759,46	-31,20	17,02	1,54	52,40	6,90	207,90
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	48,76	44,64	-8,44	0,00	0,00	0,17	0,38	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya	3,67	0,93	-74,72	0,00	0,00	0,31	33,20	0,00
Belanja Tak Terduga	67,75	124,33	83,52	3,94	5,81	13,61	10,95	245,92
Belanja Transfer	2.094,86	2.147,89	2,53	205,05	9,79	392,11	18,26	91,23
Belanja Bagi Hasil	95,46	128,77	34,89	15,46	16,20	3,28	2,55	-78,77
Belanja Bantuan Keuangan	1.999,40	2.019,13	0,99	189,58	9,48	388,83	19,26	105,10

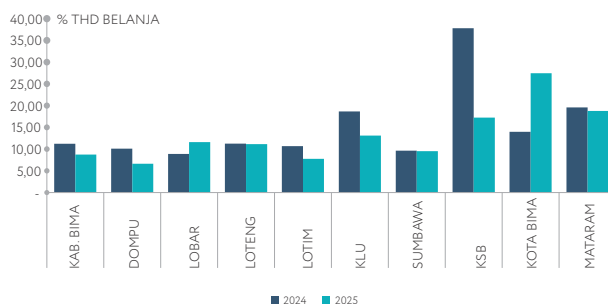
Sumber: BPKAD Provinsi NTB, diolah

Grafik 2.8 Proporsi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten/Kota di NTB



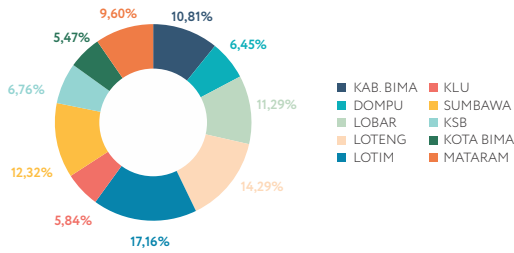
Sumber: BPKAD Provinsi NTB, diolah

Grafik 2.9 Rasio Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota di NTB



Sumber: BPKAD Provinsi NTB, diolah

Grafik 2.10 Proporsi Anggaran Belanja Daerah Spasial Kabupaten/Kota di NTB



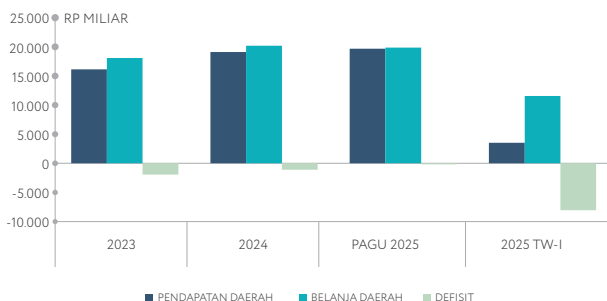
Sumber: BPKAD Provinsi NTB, diolah

Secara spasial, target anggaran belanja tertinggi dimiliki oleh Kab. Lombok Timur (Grafik 2.10). Pada tahun 2025, Kab. Lombok Timur menargetkan total anggaran belanja sebesar Rp3.383,98 miliar atau sebesar 17,03% dari total anggaran belanja Kabupaten/Kota di NTB. Adapun anggaran belanja Kab. Lombok Timur terutama dialokasikan untuk Belanja Operasi (pangsa 76,58%). Tingginya anggaran belanja Kab. Lombok Timur tidak terlepas dari jumlah penduduk dan wilayahnya yang lebih luas dibandingkan daerah lain. Di sisi lain, target belanja terendah pada tahun 2025 adalah Kota Bima sebesar Rp1.128,72 miliar atau hanya sebesar 5,68% dari total anggaran belanja Kabupaten/Kota di NTB.

2.3.2.2 Realisasi Belanja Daerah

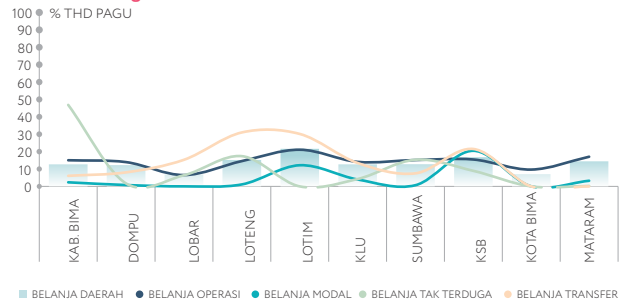
Realisasi belanja daerah Kabupaten/Kota di NTB sampai dengan triwulan I 2025 tercatat meningkat (Tabel 2.4). Belanja daerah Kabupaten/Kota NTB sebesar Rp2.780,53 miliar atau 13,99% dari pagu anggaran. Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1.743,39 miliar atau 8,63% dari pagu anggaran. Peningkatan realisasi belanja didorong oleh peningkatan pada pos Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer yang masing-masing meningkat sebesar 53,69% (yoy), 81,65% (yoy), 245,92% (yoy), dan 91,23% (yoy). Hingga triwulan I 2025, pos Belanja Operasi telah terealisasi sebesar Rp2.267,09 miliar atau 14,91% dari pagu, lebih tinggi dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya dengan realisasi sebesar Rp1.475,10 miliar atau 9,85% dari pagu. Pembelian barang non-

Grafik 2.12 Perkembangan APBD Kabupaten/Kota di NTB



Sumber: BPKAD Provinsi NTB, diolah

Grafik 2.11 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota di NTB sampai dengan Triwulan I 2025



Sumber: BPKAD Provinsi NTB, diolah

operasional yang tercermin dari peningkatan komponen Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa masing-masing sebesar 51,22% (yoy) dan 81,76% (yoy). Masing-masing dari kedua komponen belanja tersebut menyumbang sebesar 70,08% dan 20,09% terhadap total Belanja Operasi. Peningkatan pada Belanja Pegawai disebabkan oleh pencairan THR bagi ASN yang dilaksanakan serentak pada bulan Maret tahun ini, sedangkan pada tahun sebelumnya pencairan dilakukan secara bertahap pada bulan Maret hingga April.

Secara spasial, daerah dengan capaian persentase belanja tertinggi pada triwulan I 2025 adalah Kab. Lombok Timur (Grafik 2.11). Realisasi belanja Kab. Lombok Timur hingga triwulan I 2025 tercatat sebesar Rp730,29 miliar atau dengan capaian 21,58% dari pagu. Capaian tersebut terutama didorong oleh peningkatan pos Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Transfer. Lebih lanjut, pos Belanja Operasi sebagai pos dengan pangsa terbesar, tercatat mengalami pertumbuhan realisasi 42,47% (yoy) dari Rp392,56 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp559,29 miliar pada tahun laporan. Di sisi lain, Kab. Lombok Barat mencatatkan persentase realisasi belanja terkecil pada triwulan I 2025, yaitu 6,84% terhadap pagu atau Rp152,08 miliar. Rendahnya capaian serapan realisasi belanja di Kab. Lombok Barat sejalan dengan serapan semua pos belanja yang masih kecil. Pos Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer tercatat masing-masing baru terealisasi sebesar 6,41% dan 15,29% terhadap pagu, sedangkan pos Belanja Modal baru terealisasi 0,02% terhadap pagu. Adapun pos Belanja Operasi telah mencatatkan realisasi hingga 6,51% terhadap pagu yang didorong oleh realisasi komponen Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa masing-masing sebesar 9,42% dan 2,37% terhadap pagu.

2.4 APBN di Nusa Tenggara Barat

2.4.1 Anggaran Belanja APBN

Anggaran belanja APBN di NTB pada tahun 2025 mengalami sedikit peningkatan. Anggaran belanja APBN tercatat sebesar Rp27.249,39 miliar, meningkat 0,45% (yoy) dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp27.127,78 miliar (Tabel 2.5). Berdasarkan peruntukannya, terjadi penurunan anggaran APBN pada pos Belanja Pemerintah Pusat sebesar -25,21% (yoy) dari Rp9.598,11 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp7.178,73 miliar

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Belanja APBN di NTB

URAIAN	Pagu APBN Provinsi NTB		% Perubahan	Realisasi APBN Provinsi NTB				Pertumbuhan Realisasi Tw I 2025 (% YOY)
	2023	2024		Realisasi Tw-I 2024		Realisasi Tw-I 2025		
	(Rp Miliar)	(Rp Miliar)		(Rp Miliar)	% Pagu	(Rp Miliar)	% Pagu	
Belanja Daerah	27.127,78	27.249,39	0,45	5.946,94	21,92	6.411,76	23,53	7,82
Belanja Pemerintah Pusat	9.598,11	7.178,73	-25,21	2.051,82	21,38	1.369,19	19,07	-33,27
Belanja Pegawai	3.569,20	3.590,78	0,60	877,43	24,58	996,80	27,76	13,60
Belanja Barang	4.085,70	2.533,13	-38,00	904,45	22,14	327,27	12,92	-63,82
Belanja Modal	1.920,06	1.028,42	-46,44	261,69	13,63	35,53	3,45	-86,42
Bantuan Sosial	23,16	26,40	14,01	8,25	35,63	9,58	36,29	16,12
Transfer ke Daerah	17.529,66	20.070,66	14,50	3.895,12	22,22	5.042,57	25,12	29,46
Dana Bagi Hasil	1.263,76	3.524,18	178,86	211,48	16,73	705,88	20,03	233,79
Dana Alokasi Umum	10.202,14	10.830,60	6,16	2.711,97	26,58	3.058,57	28,24	12,78
Dana Alokasi Khusus Fisik	1.707,33	1.159,43	-32,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Insentif Daerah	180,33	3.348,06	1.756,60	0,00	0,00	815,31	24,35	0,00
Dana Alokasi Khusus Non-fisik	2.926,00	87,45	-97,01	659,08	22,52	0,00	0,00	-100,00
Dana Desa	1.145,90	1.098,92	-4,10	312,60	27,28	462,81	42,12	48,05
Hibah ke Daerah	104,20	22,02	-78,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: DiPb Provinsi NTB, diolah

pada tahun laporan. Penurunan tersebut seiring dengan penurunan anggaran komponen Belanja Barang dan Belanja Modal yang masing-masing turun sebesar -38,00% (yoy) dan -46,44% (yoy). Penurunan komponen Belanja Modal tersebut sejalan dengan telah selesainya Proyek Strategis Nasional (PSN) pada tahun sebelumnya serta tidak adanya PSN yang dilaksanakan pada tahun laporan. Di sisi lain, anggaran Belanja Pegawai dan Belanja Bantuan Sosial terpantau meningkat masing-masing sebesar 0,60% (yoy) dan 14,01% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya.

Lebih lanjut, anggaran Transfer ke Daerah mengalami kenaikan sebesar 14,50% (yoy). Pada tahun laporan, anggaran Transfer ke Daerah tercatat sebesar Rp20.070,66 miliar, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp17.529,66 miliar. Peningkatan tersebut didorong oleh Dana Alokasi Umum yang mendominasi anggaran belanja Transfer ke Daerah tercatat meningkat 6,16% (yoy) dari Rp10.202,14 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp10.830,60 miliar pada tahun laporan. Selain itu, Dana Bagi Hasil, Dana Insentif Daerah tercatat mengalami peningkatan masing-masing sebesar 178,86% (yoy) dan 1.756,60% (yoy). Peningkatan pos belanja tersebut guna melanjutkan pemerataan pembangunan antardaerah dan antarsektor. Adapun Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus Non-fisik, Dana Desa, dan Hibah ke Daerah tercatat mengalami penurunan masing-masing sebesar -32,09% (yoy), -97,01% (yoy), -4,10% (yoy), dan -78,86% (yoy).

2.4.2 Realisasi Belanja APBN di Nusa Tenggara Barat

Realisasi belanja APBN di NTB sampai dengan triwulan I 2025 tercatat sebesar Rp6.411,76 miliar atau 23,53% dari pagu anggaran (Tabel 2.5). Dibandingkan triwulan I 2024, capaian

tersebut lebih tinggi 23,53% (yoy) atau sebesar Rp5.946,94 miliar. Kenaikan realisasi anggaran tersebut seiring dengan meningkatnya pos Transfer ke Daerah (pangsa 78,65%) yang mengalami pertumbuhan sebesar 29,46% (yoy). Pada tahun laporan, Transfer ke Daerah tercatat sebesar Rp5.042,57 miliar, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp3.895,12 miliar. Peningkatan tersebut didorong oleh pertumbuhan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Desa yang masing-masing tumbuh 233,79% (yoy), 12,78% (yoy) dan 48,05% (yoy). Adapun Dana Insentif Daerah mencatatkan realisasi sebesar Rp815,31 miliar pada periode laporan, setelah pada periode yang sama tahun sebelumnya tidak terdapat realisasi.

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sedikit lebih rendah dibandingkan capaian tahun sebelumnya, baik secara nominal maupun persentase realisasi terhadap pagu. Persentase realisasi BPP terhadap pagu tahun 2025 sebesar 19,07% (Rp6.411,76 miliar), lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar 21,92% (Rp5.946,94 miliar). Realisasi BPP mengalami kontraksi sebesar -33,27% (yoy). Kontraksi tersebut utamanya didorong oleh realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal yang masing-masing mengalami kontraksi -63,82% (yoy) dan -86,42% (yoy) seiring dengan penurunan pagu, efisiensi belanja pemerintah sebagaimana diatur dalam Inpres No. 1 Tahun 2025 yang menyebabkan pemerintah lebih selektif dalam realisasi anggaran, serta penurunan signifikan pada realisasi Belanja Modal akibat tidak adanya Proyek PSN yang dilaksanakan pada tahun laporan. Kendati demikian, penurunan yang lebih dalam tertahan oleh peningkatan realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Bantuan Sosial yang masing-masing tumbuh sebesar 13,60% (yoy) dan 16,12% (yoy).





03

Perkembangan Inflasi

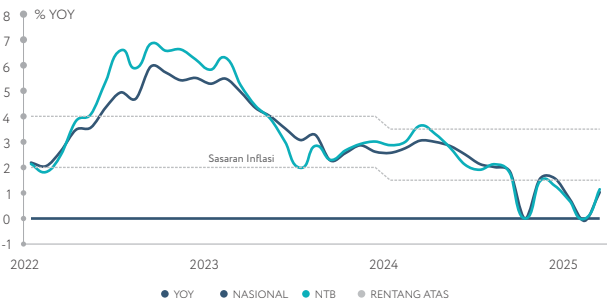
Provinsi Nusa Tenggara Barat pada triwulan I 2025 mengalami inflasi sebesar 1,15% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya (1,28%; yoy). Inflasi tahunan utamanya bersumber dari Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya yang mengalami inflasi sebesar 10,46%(yoy) dengan sumbangan sebesar 0,59% (yoy). Di sisi lain, kenaikan inflasi yang lebih tinggi relatif tertahan oleh Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga yang mengalami deflasi dari triwulan sebelumnya.

Pada triwulan II 2025, tekanan inflasi diperkirakan meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya seiring dengan masuknya periode libur sekolah serta berakhirnya masa panen sub-round I yang berpotensi meningkatkan tekanan pada kelompok pangan strategis dan transportasi. Lebih lanjut, untuk keseluruhan tahun 2025, inflasi diperkirakan tetap terkendali dan berada dalam rentang sasaran $2,5 \pm 1\%$.



3.1 Perkembangan Inflasi IHK Gabungan Kota di Provinsi NTB Triwulan I 2025

Grafik 3.1 Inflasi Tahunan Provinsi NTB dan Nasional



Pada triwulan I 2025, Gabungan Kota Perhitungan Inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatatkan inflasi sebesar **1,15% (yoy)**, lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (**1,28%; yoy**) (Grafik 3.1). Tekanan inflasi didorong oleh kenaikan tekanan harga pada Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya yang mengalami inflasi sebesar 10,46%(yoy) dengan sumbangan sebesar 0,59% (yoy). Hal ini utamanya dikontribusikan oleh kenaikan harga komoditas emas perhiasan dengan andil inflasi sebesar 0,54% (yoy) sejalan dengan volatilitas harga emas global akibat dari tekanan geopolitik. Selain itu, Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau turut mendorong tekanan inflasi yang lebih dalam dengan inflasi sebesar 1,56% (yoy). Tekanan inflasi utamanya terjadi karena kenaikan harga komoditas cabai rawit dengan andil inflasi sebesar 0,44% (yoy).

Secara spasial, seluruh kota pantauan inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami inflasi. Inflasi Kota Mataram dan Kota Bima tercatat lebih rendah sementara Inflasi Kabupaten

Tabel 3.3 Inflasi Tahunan Kab/Kota di Provinsi NTB

Kota IHK	II 2024	III 2024	IV 2024	I 2025
Kota Mataram	2,93	1,97	1,92	1,50
Kota Bima	2,39	2,49	0,32	1,13
Kabupaten Sumbawa (Kab. IHK baru)	0,95	1,28	0,08	0,68

Sumber: BPS, diolah

Sumbawa tercatat lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (Tabel 3.3). Inflasi tertinggi terjadi di Kota Mataram 1,50% (yoy) yang didorong oleh Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau serta Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya. Selanjutnya, inflasi di Kota Bima didorong oleh Kelompok Pendidikan dengan andil 0,98% (yoy) sehingga menyebabkan inflasi secara tahunan tercatat sebesar 1,13% (yoy). Berbeda dengan kedua kota IHK yang mencatatkan tekanan inflasi tahunan yang lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya, Kabupaten Sumbawa mencatatkan inflasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, yakni sebesar 0,68 (yoy) dari 0,08% (yoy) didorong oleh kelompok Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebagai penyumbang utama.

3.1.1 Inflasi Berdasarkan Kelompok

Sumber utama tekanan inflasi pada triwulan I 2025 berasal dari **Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya (Tabel 3.4) yang mengalami kenaikan inflasi dari 7,69% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi 10,46% (yoy) pada triwulan I 2025 dengan andil tahunan 0,59%**. Tekanan inflasi pada kelompok ini terutama disumbang oleh kenaikan harga emas perhiasan yang memberikan andil 0,54% (yoy). Kenaikan harga emas global sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian geopolitik pasca kebijakan *trade war* yang menimbulkan tingginya permintaan investor terhadap emas sebagai aset *safe haven*.

Tabel 3.1 Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Bulanan

Agt-24		Sep-24		Des-24		Mar-25	
Komoditas	%Andil	Komoditas	%Andil	Komoditas	%Andil	Komoditas	%Andil
Udang Basah	0,08	Akademi/PT	0,11	Ikan Layang	0,09	Tarif Listrik	1,35
Daging Ayam Ras	0,07	Ikan Layang	0,08	Bawang Merah	0,06	Cabai Rawit	0,29
Ikan Layang	0,04	Ikan Tongkol	0,02	Cumi-Cumi	0,06	Ikan Teri	0,15
Emas Perhiasan	0,04	Beras	0,02	Cabai Merah	0,06	Emas Perhiasan	0,08
Beras	0,03	Pisang	0,02	Daging Ayam Ras	0,04	Daging Ayam Ras	0,06

Sumber: BPS, diolah

Tabel 3.2 Komoditas Utama Penyumbang Deflasi Bulanan

Agt-24		Sep-24		Des-24		Mar-25	
Komoditas	%Andil	Komoditas	%Andil	Komoditas	%Andil	Komoditas	%Andil
Bawang Merah	0,08	Cabai Rawit	0,18	Angkutan Udara	-0,05	Angkutan Udara	-0,11
Tomat	0,06	Cabai Merah	0,05	Jeruk Nipis	-0,02	Ikan Layang/ Ikan Benggol	-0,04
Kacang Panjang	0,05	Bensin	0,02	Ayam Hidup	-0,01	Cabai Merah	-0,03
Ikan Tongkol	0,02	Terong	0,02	Jagung Manis	-0,01	Tomat	-0,03
Jagung Manis	0,02	Kol Putih/Kubis	0,02	Kol Putih/Kubis	-0,01	Bayam	-0,03

Sumber: BPS, diolah

Selanjutnya, tekanan inflasi pada triwulan I 2025 juga didorong oleh Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau yang mengalami inflasi tahunan sebesar 1,56% (yoy). Angka tersebut cenderung meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 0,63% (yoy). Sumbangan inflasi pada kelompok Makanan, minuman dan Tembakau tercatat sebesar 0,59% (yoy) sama dengan andil inflasi kelompok sebelumnya. Tekanan inflasi tersebut utamanya didorong oleh subkelompok rokok dan tembakau yang tercatat inflasi sebesar 4,81% (yoy). Kenaikan harga komoditas pada subkelompok tersebut sejalan dengan kenaikan Harga Jual Eceran (HJE) sebesar 4%-22% pada tahun 2025. Harga komoditas sigaret kretek mesin (SKM) tercatat mengalami kenaikan. Pada periode laporan, komoditas SKM tercatat menyumbang inflasi 0,11% (yoy). Hal serupa juga tercermin dari sumbangan inflasi sigaret putih mesin (SPM) dan sigaret kretek tangan (SKT) yang masing – masing tercatat sebesar 0,06% (yoy) dan 0,05% (yoy).

Selanjutnya, subkelompok makanan mendorong tekanan inflasi yang lebih tinggi pada kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau. Subkelompok tersebut tercatat mengalami inflasi sebesar 0,77% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Komoditas utama yang mendorong inflasi pada kelompok ini adalah komoditas cabai rawit dengan andil 0,44% (yoy), ikan teri 0,14% (yoy), dan bawang merah 0,11% (yoy). Meningkatnya harga komoditas pangan tersebut sejalan dengan masuknya periode HBKN Ramadhan dan Idul Fitri yang mendorong permintaan. Lebih lanjut, kondisi cuaca ekstrim menghambat proses produksi komoditas hortikultura menyebabkan keterbatasan pasokan.

Kelompok yang mendorong tekanan inflasi terbesar ketiga adalah Pendidikan yang memiliki andil tahunan sebesar 0,15% (yoy). Tekanan inflasi tersebut stabil dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu 3,82% (yoy). Secara khusus, tekanan inflasi pada kelompok ini terutama disumbang oleh komoditas akademi/ perguruan tinggi yang memberikan andil inflasi

0,11% (yoy). Kenaikan harga sejalan dengan mulai dibukanya pendaftaran perguruan tinggi, menjelang Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) yang dilaksanakan pada bulan April 2025.

Sementara itu, kenaikan tekanan inflasi lebih lanjut tertahan oleh Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga yang tercatat masih mengalami deflasi. Secara tahunan, kelompok tersebut tercatat deflasi sebesar -3,50% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang juga mengalami inflasi 1,26% (yoy). Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan deflasi yakni tarif listrik sebesar -0,61% (yoy). Penurunan harga tarif listrik sejalan dengan kebijakan diskon 50% diberikan kepada pelanggan rumah tangga PT PLN (Persero) daya 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA yang diberikan mulai dari Januari dan Februari 2025 sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 348.K/TL.01/MEM.L/2024 tentang Pemberian Diskon Biaya Listrik Untuk Konsumen Rumah Tangga PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

3.1.1.1 Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau

Pada triwulan I 2025, Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau mengalami kenaikan tekanan inflasi secara tahunan sebesar 1,56% (yoy) dengan andil 0,59% (yoy). Kondisi ini utamanya didorong oleh kenaikan tekanan inflasi pada subkelompok rokok dan tembakau yang mengalami inflasi tahunan tertinggi, yakni 4,81% (yoy), diikuti subkelompok minuman yang tidak beralkohol dengan inflasi 4,71% (yoy), dan subkelompok makanan sebesar 0,77% (yoy) (Grafik 3.2). Secara khusus, kenaikan inflasi kelompok ini berdampak signifikan pada peningkatan inflasi seiring dengan pangsa yang mencapai 36,13% dari total Nilai Konsumsi (NK) Provinsi NTB berdasarkan SBH 2022. Adapun pada triwulan I 2025, komoditas yang turut memberikan andil inflasi diantaranya cabai rawit, ikan teri, bawang merah, minyak goreng, dan kopi bubuk.

Tabel 3.4 Inflasi Tahunan Provinsi NTB Berdasarkan Kelompok

KELOMPOK	IV 2023	I 2024	II 2024	III 2024	IV 2024	I 2025
Umum	3,02	3,63	2,12	1,77	1,28	1,15
Makanan, Minuman, & Tembakau	5,11	7,82	2,90	1,74	0,63	1,56
Pakaian & Alas Kaki	1,13	2,14	1,41	1,32	1,30	1,81
Perumahan, Air, Listrik, & Bahan Bakar RT	1,82	1,26	1,68	1,59	1,26	-3,50
Perlengkapan, Peralatan, & Pemeliharaan Rutin RT	1,19	0,70	0,40	0,17	0,67	0,62
Kesehatan	0,89	0,70	0,51	1,10	1,99	2,63
Transportasi	3,46	1,06	1,65	1,24	-0,08	-0,05
Informasi, Komunikasi, & Jasa Keuangan	-0,43	-0,71	-0,91	-0,97	-1,00	-0,75
Rekreasi, Olahraga, & Budaya	2,06	1,67	1,81	2,09	2,01	1,98
Pendidikan	1,51	1,18	1,25	3,82	3,82	3,82
Penyediaan Makanan & Minuman/Restoran	2,07	2,20	2,60	1,91	1,83	1,76
Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya	3,54	2,20	4,76	6,37	7,69	10,46

Sumber: BPS, diolah

Subkelompok rokok dan tembakau menjadi penyumbang inflasi utama pada kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau di triwulan I 2025. Inflasi disumbang oleh Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM), dan Sigaret Kretek Tangan (SKT) yang masing-masing memberikan andil inflasi sebesar 0,11% (yoy), 0,06% (yoy), dan 0,05% (yoy). Kenaikan harga terjadi sejalan dengan kenaikan Harga Jual Eceran (HJE) sebesar 4%-22% pada tahun 2025. Kenaikan HJE tersebut berdampak terhadap kenaikan harga rokok secara gradual sepanjang tahun.

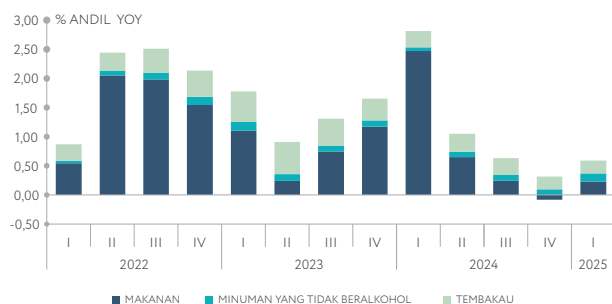
Selanjutnya, subkelompok Makanan juga turut menjadi penyumbang inflasi pada kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau di triwulan I 2025. Inflasi didorong oleh komoditas cabai rawit, ikan teri, dan bawang merah dengan andil masing-masing sebesar 0,44% (yoy), 0,14% (yoy), dan 0,11% (yoy). Berdasarkan *tracking* PIHPS rerata harga komoditas cabai rawit dan bawang merah tercatat sebesar Rp90.488/kg dan Rp42.500/kg, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar RpRp25.580/kg dan Rp38.773/kg. Kenaikan harga komoditas pangan tersebut sejalan dengan masuknya periode Ramadhan dan Idul Fitri pada triwulan pelaporan, sehingga mendorong tingginya permintaan komoditas dimaksud. Lebih lanjut, kondisi cuaca ekstrim juga mendorong terbatasnya pasokan cabai rawit dan bawang merah dipasaran. Lebih lanjut, komoditas minyak goreng juga tercatat mengalami inflasi dengan andil sebesar 0,09% (yoy). Kenaikan harga minyak goreng sejalan dengan tren kenaikan harga CPO dan meningkatnya permintaan domestik pada periode Ramadhan dan Idul Fitri.

Tabel 3.5 Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Kelompok Mamin Tembakau

KOMODITAS	Mar-25
	% Andil (yoy)
CABAI RAWIT	0,44
IKAN TERI	0,14
SIGARET KRETEK MESIN (SKM)	0,11
BAWANG MERAH	0,11
MINYAK GORENG	0,09

Sumber: BPS, diolah

Grafik 3.2 Andil Inflasi Kelompok Mamin Tembakau Per Subkelompok



Sumber: BPS, diolah

3.1.1.2 Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

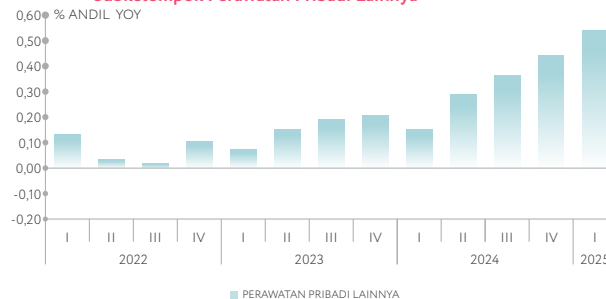
Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa lainnya turut menyumbangkan tekanan inflasi pada periode laporan dengan andil 0,59% (yoy). Inflasi tahunan kelompok ini tercatat sebesar 10,46% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya (7,69%; yoy). Komoditas utama penyumbang inflasi kelompok ini adalah emas perhiasan dengan andil inflasi tahunan sebesar 0,54% (Tabel 3.6). Secara global, harga emas terpantau masih mengalami peningkatan dari US\$2.987,16/oz (pada bulan Maret) menjadi US\$3.152,11/oz sejalan dengan berlanjutnya tekanan geopolitik pasca kebijakan tarif resiprok AS sehingga meningkatkan permintaan investor terhadap emas sebagai aset *safe haven*.

Tabel 3.6 Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya

KOMODITAS	Mar-25
	% Andil (yoy)
EMAS PERHIASAN	0,54
HAND BODY LOTION	0,01
KRIM WAJAH	0,01
SABUN MANDI CAIR	0,01
DEODORANT	0,01

Sumber: BPS, diolah

Grafik 3.3 Andil Inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya Subkelompok Perawatan Pribadi Lainnya

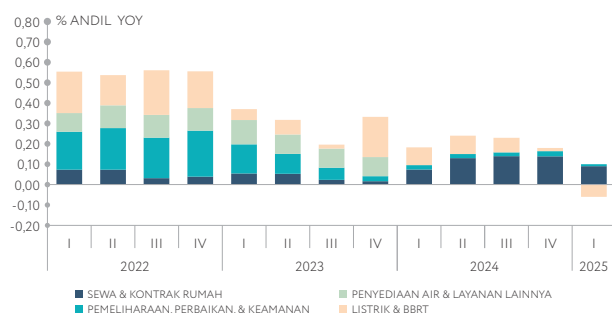


Sumber: BPS, diolah

3.1.1.3 Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga

Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga tercatat mengalami deflasi tahunan sebesar -3,50% (yoy) pada periode laporan dengan andil -0,50% (yoy) (Grafik 3.4). Tekanan inflasi melandai dari triwulan sebelumnya yang sebesar 1,26% (yoy). Tekanan inflasi kelompok ini menjadi kelompok penyumbang deflasi tahunan terbesar pada periode laporan. Deflasi utamanya didorong oleh subkelompok listrik dan bahan bakar rumah tangga dengan nilai 9,79% (yoy). Namun demikian, deflasi yang lebih dalam tertahan oleh subkelompok sewa dan kontrak rumah yang mengalami inflasi sebesar 1,6% (yoy) dengan andil terbesar dari sewa rumah sebesar 0,07% (yoy).

Grafik 3.4 Andil Inflasi Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar RT



Sumber: BPS, diolah

Tabel 3.7 Komoditas Utama Penyumbang Inflasi Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar RT

KOMODITAS	Mar-25
	% Andil (yoy)
TARIF LISTRIK	-0,61
SEMEN	-0,01

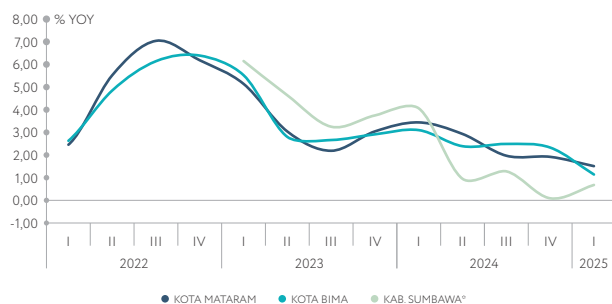
Sumber: BPS, diolah

Berdasarkan komoditasnya, tarif listrik memberikan sumbangan deflasi terdalam dengan andil -0,61% (yoy) (Tabel 3.7). Menurunnya harga tarif listrik merupakan dampak dari kebijakan diskon 50% diberikan kepada pelanggan rumah tangga PT PLN (Persero) daya 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA yang diberikan mulai dari Januari dan Februari 2025 sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 348.K/TL.01/MEM.L/2024 tentang Pemberian Diskon Biaya Listrik Untuk Konsumen Rumah Tangga PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Sejalan dengan tarif listrik, komoditas semen turut menyumbangkan deflasi pada laporan berjalan dengan andil sebesar -0,01% (yoy). Penurunan harga semen sejalan dengan menurunnya permintaan akibat terbatasnya pembangunan pada triwulan pelaporan.

3.2 Inflasi Kota Pantauan di Provinsi Nusa Tenggara Barat

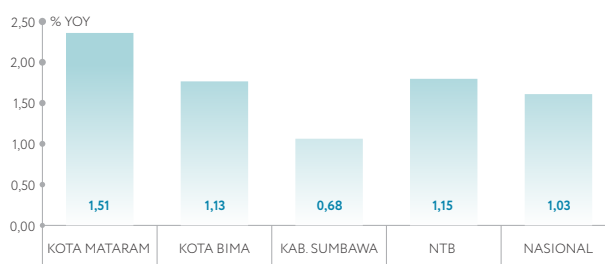
Secara spasial, inflasi tahunan di Kota Mataram dan Kota Bima menunjukkan tekanan inflasi yang lebih rendah. Disisi lain tekanan inflasi di Kabupaten Sumbawa tercatat meningkat

Grafik 3.5 Perkembangan Inflasi Tahunan Kab/Kota Pantauan di Provinsi NTB



Sumber: BPS, diolah

Grafik 3.6 Inflasi Tahunan Triwulan I 2025 Kab/Kota Pantauan di Provinsi NTB



Sumber: BPS, diolah

dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Grafik 3.5). Capaian inflasi tertinggi pada triwulan laporan terjadi di Kota Mataram sebesar 1,51% (yoy), diikuti dengan Kota Bima dan Kabupaten Sumbawa masing-masing sebesar 1,14% (yoy) dan 0,68% (yoy) (Grafik 3.6).

Berdasarkan kelompok, tekanan inflasi di Kota Mataram terutama terjadi pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau. Sumber peningkatan tekanan inflasi utamanya yakni pada komoditas cabai rawit, bawang merah, dan kopi bubuk dengan andil masing-masing sebesar 0,38% (yoy), 0,14% (yoy), dan 0,11% (yoy). Disisi lain, tekanan inflasi di Kota Bima utamanya didorong oleh Kelompok Pendidikan dengan andil 0,85% (yoy). Lebih lanjut, inflasi di Kabupaten Sumbawa didorong oleh Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya dengan komoditas penyumbang utama emas perhiasan sejalan dengan kenaikan harga emas global seiring dengan tingginya permintaan emas pada periode HBKN Idul Fitri dan masih berlanjutnya ketidakpastian global pasca kebijakan trade war sehingga permintaan emas sebagai aset *safe haven* meningkat. Adapun komoditas emas perhiasan menyumbang inflasi tahunan sebesar 0,58% (yoy).

3.2.1 Disagregasi Inflasi Kota Mataram

Sejalan dengan perkembangan di tingkat Provinsi, Kota Mataram mengalami penurunan inflasi tahunan dari 1,92% (yoy) pada triwulan IV 2024 menjadi 1,50% (yoy) di triwulan I 2025. Berdasarkan Survei Biaya Hidup (SBH) tahun 2022, nilai konsumsi di Kota Mataram memiliki pangsa terbesar di Provinsi NTB, yakni sebesar 50,71% terhadap total nilai konsumsi sehingga tergolong cukup dominan terhadap perkembangan kondisi inflasi dari Provinsi NTB.

Tekanan inflasi di Kota Mataram pada triwulan I 2025 utamanya dikontribusikan oleh Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau (Inflasi tahunan; 3,01% yoy). Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau memberikan andil inflasi 0,98% (yoy) dengan komoditas utama penyumbang inflasi adalah cabai rawit sebesar 0,38% (yoy). Kenaikan harga cabai rawit sejalan dengan masuknya periode Ramadhan dan Idul Fitri pada triwulan pelaporan, sehingga mendorong tingginya permintaan serta

Tabel 3.8 Inflasi Tahunan Kota Mataram Berdasarkan Kelompok

KELOMPOK (%YOY)	IV 2023	I 2024	II 2024	III 2024	IV 2024	I 2025
Umum	3,04	3,44	2,93	1,97	1,92	1,50
Makanan, Minuman, & Tembakau	4,90	7,79	4,84	1,84	2,67	3,01
Pakaian & Alas Kaki	1,22	2,50	1,63	2,14	1,73	1,15
Perumahan, Air, Listrik, & Bahan Bakar RT	2,02	1,74	2,65	2,72	1,80	-2,71
Perlengkapan, Peralatan, & Pemeliharaan Rutin RT	0,80	-0,40	-0,54	0,18	0,73	0,72
Kesehatan	1,17	1,11	0,67	0,26	1,50	2,30
Transportasi	4,02	1,39	2,39	1,90	-0,33	0,63
Informasi, Komunikasi, & Jasa Keuangan	-0,57	-1,32	-1,60	-1,77	-1,82	-1,30
Rekreasi, Olahraga, & Budaya	1,81	1,84	1,59	0,74	0,60	0,74
Pendidikan	1,81	1,78	1,90	1,57	1,57	1,57
Penyediaan Makanan & Minuman/Restoran	2,30	3,02	3,65	2,97	2,77	2,22
Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya	3,42	1,27	4,06	5,82	7,52	9,72

Sumber: BPS, diolah

kondisi cuaca ekstrim yang menyebabkan terbatasnya pasokan. Berdasarkan *tracking* PIHPS, rata-rata harga cabai rawit di Kota Mataram meningkat 139,46% (yoy) dari Rp37.788/kg menjadi Rp90.488/kg. Sementara itu, andil inflasi Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya menyumbangkan inflasi terbesar kedua di Kota Mataram, yakni sebesar 0,55% (yoy) dengan komoditas utama penyumbang inflasi adalah emas perhiasan sejalan dengan ketegangan geopolitik serta ketidakpastian global yang menyebabkan peningkatan daya tarik emas sebagai aset safe haven. Namun demikian, tekanan yang lebih tinggi tertahan oleh deflasi pada Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga dengan andil deflasi -0,46%. Berdasarkan komoditasnya, deflasi bersumber dari tarif listrik dengan sumbangan deflasi tahunan sebesar -0,65% (yoy). Penurun harga tarif listrik sejalan dengan adanya diskon tarif listrik diskon 50% diberikan kepada pelanggan rumah tangga PT PLN (Persero) daya 450 VA, 900 VA, 1.300 VA, dan 2.200 VA yang diberikan mulai dari Januari dan Februari 2025 sesuai dengan Keputusan

Menteri ESDM Nomor 348.K/TL.01/MEM.L/2024 tentang Pemberian Diskon Biaya Listrik Untuk Konsumen Rumah Tangga PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

3.2.2 Disagregasi Inflasi Kabupaten Sumbawa

Kabupaten Sumbawa juga mengalami peningkatan tekanan inflasi pada triwulan laporan. Inflasi Kabupaten Sumbawa pada triwulan I 2025 tercatat sebesar 0,68% (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terpantau sebesar 0,09% (yoy). Meski Kabupaten Sumbawa termasuk kab/kota baru dalam perhitungan inflasi di tahun 2024, wilayah ini memiliki pangsa nilai konsumsi (SBH 2022) sebesar 36,33% (yoy), tertinggi kedua setelah Kota Mataram sehingga memiliki andil yang juga cukup signifikan. Dibandingkan dengan 2 kab/kota lainnya di Provinsi NTB, tekanan inflasi tahunan Kabupaten Sumbawa pada periode laporan menjadi yang terendah meskipun mengalami kenaikan dibandingkan triwulan sebelumnya.

Tabel 3.9 Inflasi Tahunan Kabupaten Sumbawa Berdasarkan Kelompok

KELOMPOK (%YOY)	IV 2023	I 2024	II 2024	III 2024	IV 2024	I 2025
Umum	3,75	4,06	0,95	1,28	0,09	0,68
Makanan, Minuman, & Tembakau		8,14	0,83	1,57	-1,58	0,39
Pakaian & Alas Kaki		2,42	1,40	0,46	0,95	2,91
Perumahan, Air, Listrik, & Bahan Bakar RT		0,07	-0,06	-0,25	0,47	-4,07
Perlengkapan, Peralatan, & Pemeliharaan Rutin RT		1,82	1,49	0,33	0,59	0,46
Kesehatan		0,43	0,28	0,76	1,42	1,94
Transportasi		0,59	0,06	0,39	0,14	-0,2
Informasi, Komunikasi, & Jasa Keuangan		0,00	-0,12	-0,15	-0,14	-0,13
Rekreasi, Olahraga, & Budaya		1,23	0,56	5,46	5,46	4,91
Pendidikan		0,00	0,00	0,75	0,76	0,75
Penyediaan Makanan & Minuman/Restoran		1,83	1,80	0,89	0,88	1,29
Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya		3,10	5,60	7,41	8,41	11,98

Sumber: BPS, diolah

Sumber tekanan inflasi di Kabupaten Sumbawa pada triwulan I 2025 berasal dari Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya (Tabel 3.9). Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya mengalami tekanan inflasi sebesar 11,98% (yoy) dengan andil 0,58% (yoy) yang didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan sejalan dengan tingginya ketidakpastian global. Sementara itu, Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau turut terpantau mengalami inflasi secara tahunan dengan tekanan sebesar 0,39% (yoy) dan andil 0,18% (yoy). Adapun komoditas utama yang menyumbang tekanan inflasi pada kelompok tersebut bersumber dari cabai rawit dengan andil 0,57% (yoy). Disisi lain, tekanan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga yang mengalami deflasi dengan andil sebesar -0,50% (yoy).

3.2.3 Disagregasi Inflasi Kota Bima

Inflasi tahunan Kota Bima pada triwulan I 2025 tercatat sebesar 1,33% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 2,33% (yoy). Pangsa nilai konsumsi Kota Bima berdasarkan Survei Biaya Hidup (SBH) tahun 2022 cenderung lebih rendah dibandingkan 2 kab/kota lainnya, yakni hanya sebesar 12,96%.

Tekanan inflasi di Kota Bima pada triwulan I 2025 utamanya berkontribusikan oleh Kelompok Pendidikan, diikuti oleh Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya (Tabel 3.10). Kelompok Pendidikan memberikan andil inflasi 0,85% (yoy) dengan andil terbesar salah satunya pada seluruh subkelompok pendidikan tinggi dengan andil 44,11% (yoy). Sementara itu, andil inflasi dari kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,61% (yoy) yang utamanya didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan selaras dengan yang terjadi pada Kota Mataram dan Kota Bima.

3.3 Tracking dan Proyeksi Inflasi

3.3.1 Tracking Inflasi Triwulan II 2025

Sejalan dengan Nasional, Provinsi NTB pada bulan April 2025 mengalami inflasi sebesar 0,69% (mtm), melandai dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat inflasi 2,04% mtm. Realisasi tersebut menyebabkan inflasi Provinsi NTB secara tahunan menjadi sebesar 1,80% (yoy) dan tetap terkendali pada rentang 2,5±1%. Inflasi yang terjadi pada periode laporan tercatat lebih tinggi dibandingkan rata-rata historis selama 3 tahun terakhir (2022-2024) yang sebesar 0,53% (mtm). Adapun tekanan inflasi utamanya berasal dari kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga seiring dengan masih berlangsungnya dampak berakhirnya diskon tarif listrik khususnya pada pelanggan pasca bayar. Sejalan dengan itu, Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya juga memberikan sumbangan inflasi yang utamanya berasal dari emas perhiasan. Meski demikian, inflasi yang lebih tinggi relatif tertahan oleh deflasi pada Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau. Kembali meningkatnya pasokan cabai serta berakhirnya puncak permintaan HBKN Ramadhan dan Idul Fitri mendorong terjadinya deflasi komoditas pangan.

Tekanan inflasi pada triwulan II 2025 diperkirakan meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Peningkatan tekanan ini terutama dipicu oleh normalisasi tarif listrik dan angkutan udara pasca diskon tarif yang diberikan pada triwulan I 2025. Pada Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga, tekanan inflasi diperkirakan lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sejalan dengan berakhirnya diskon tarif listrik yang terjadi pada bulan Januari - Februari 2025. Selain itu, normalisasi pasca diskon tarif angkutan udara selama periode HBKN Ramadhan dan Idul Fitri serta lebih banyaknya

Tabel 3.10 Inflasi Tahunan Kota Bima Berdasarkan Kelompok

KELOMPOK (%YOY)	IV 2023	I 2024	II 2024	III 2024	IV 2024	I 2025
Umum	2,91	3,10	2,39	2,49	2,33	1,13
Makanan, Minuman, & Tembakau	5,83	6,70	3,69	2,09	1,63	0,61
Pakaian & Alas Kaki	0,88	0,62	0,86	0,94	0,86	1,31
Perumahan, Air, Listrik, & Bahan Bakar RT	0,60	2,53	1,64	1,00	0,59	-6,73
Perlengkapan, Peralatan, & Pemeliharaan Rutin RT	2,24	1,40	0,58	-0,31	0,70	0,73
Kesehatan	0,11	-0,29	0,41	5,22	5,25	5,55
Transportasi	1,86	0,96	2,73	0,78	0,33	-2,23
Informasi, Komunikasi, & Jasa Keuangan	-0,01	-0,01	-0,01	0,18	0,18	-0,02
Rekreasi, Olahraga, & Budaya	3,04	1,91	0,89	0,50	0,50	0,82
Pendidikan	0,24	0,65	0,65	21,97	21,96	21,97
Penyediaan Makanan & Minuman/Restoran	1,13	0,29	1,21	1,09	1,20	1,45
Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya	3,90	3,24	5,11	5,69	6,49	9,30

Sumber: BPS, diolah

cuti bersama pada triwulan II 2025 juga berpotensi untuk meningkatkan mobilitas masyarakat yang berdampak pada kenaikan tarif angkutan udara.

Selanjutnya, kenaikan inflasi yang lebih tinggi juga diperkirakan terjadi pada kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau.

Meskipun secara bulanan diperkirakan terjadi deflasi akibat peningkatan stok beras pasca panen raya padi, kembali normalnya pasokan cabai, serta masuknya panen raya bawang merah. Secara triwulanan, tekanan inflasi lebih dominan dipengaruhi oleh dampak cuaca yang memengaruhi kenaikan signifikan pada harga komoditas cabai. Hal ini berbeda bila dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya, dimana produksi cabai jauh lebih baik didukung curah hujan yang rendah. Lebih lanjut, adanya penyesuaian Harga Jual Eceran (HJE) rokok berpotensi menyebabkan kenaikan harga rokok secara gradual. Adapun, dampak El Niño terhadap budidaya kelapa sawit di Indonesia, ditambah dengan dorongan kebijakan untuk meningkatkan penggunaan minyak sawit dalam produksi biodiesel, berpotensi mendorong tekanan harga minyak goreng di pasar domestik. Hal ini perlu diantisipasi mengingat minyak goreng merupakan salah satu komoditas dengan kontribusi signifikan terhadap inflasi di berbagai daerah.

Di sisi lain, Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya diperkirakan akan mengalami tekanan inflasi yang lebih landai.

Hal ini sejalan dengan normalisasi permintaan masyarakat khususnya pasca HBKN Ramadhan dan Idulfitri. Selain itu, ditundanya penerapan tarif dagang oleh US diperkirakan akan turut menahan kenaikan yang lebih tinggi dari harga emas global. Pada triwulan berjalan, tekanan kenaikan harga emas global tercatat melandai dari 7,90% (mtm) pada triwulan sebelumnya menjadi 1,47% (mtm).

3.3.3 Proyeksi Inflasi Keseluruhan Tahun 2025

Prospek inflasi gabungan Provinsi NTB untuk keseluruhan tahun 2025 diperkirakan tetap terkendali. Namun, masih terdapat *upward risk* yang perlu terus diwaspadai terkait inflasi di tahun 2025 yakni tren volatilitas harga minyak CPO global, kenaikan harga BBM (termasuk switching BBM subsidi ke non subsidi) serta adanya potensi penyesuaian beberapa jenis tarif (parkir, PDAM dan cukai rokok). Lebih lanjut, potensi risiko penyumbang inflasi turut dipengaruhi oleh tren peningkatan aktivitas ekonomi dan pariwisata yang lebih tinggi, sehingga turut mendorong permintaan untuk berbagai komoditas makanan jadi, barang-barang industri, sewa rumah, kontrak rumah, biaya pendidikan, bahan/material konstruksi, dsb.

Tekanan inflasi pada tahun 2025 diperkirakan masih terkendali sejalan dengan tersedianya pasokan beras yang mampu memenuhi kebutuhan sampai dengan beberapa bulan ke depan. Selanjutnya, berbagai program GNPIP yang konsisten dilaksanakan oleh Bank Indonesia bersama dengan *stakeholders* turut mendukung terkendalinya tekanan inflasi di tahun 2025.

3.4 Program Pengendalian Inflasi Daerah

Bank Indonesia bersama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi NTB secara aktif berkoordinasi dalam rangka pengendalian harga barang dan jasa melalui beberapa program kegiatan yang telah dijalankan selama triwulan laporan, antara lain:

- 1) Pelaksanaan *High Level Meeting* (HLM) dan Rapat Koordinasi TPID Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Dompu, dan Kota Mataram.
- 2) Kolaborasi Operasi Pasar Keliling (KOPling) dan Operasi Pasar Murah (OPM) sebanyak 86 kali selama triwulan I 2025.
- 3) Fasilitas Distribusi Pangan sebanyak 8 kali selama triwulan I 2025.
- 4) Melaksanakan kegiatan *capacity building* untuk meningkatkan pemahaman anggota TPID Kota Mataram.
- 5) Perluasan penanaman padi varietas Gamagora 7 seluas 22,5 Ha di wilayah Kab. Lombok Tengah dan Kab. Lombok Barat melalui penyaluran bibit.
- 6) Membuka kembali kios tanggap inflasi bernama Warung Pentasi Mentaram (Pantau Tanggap Inflasi Menuju Target Aman) di Pasar Kebon Roek Mataram dengan bersinergi bersama Pemerintah Kota Mataram. Upaya tersebut dilakukan untuk menjamin ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga pangan strategis.
- 7) Melakukan komunikasi efektif melalui berbagai media dalam rangka menjaga ekspektasi masyarakat, antara lain melalui kegiatan Bincang Bareng Media (BBM), talkshow di radio/televisi, termasuk Iklan Layanan Masyarakat.

Boks 1 :

Diskon Tarif Listrik

Pada triwulan I 2025, Pemerintah memberikan diskon tarif listrik sebesar 50% kepada pelanggan rumah tangga dengan daya sampai dengan 2200VA selama bulan Januari dan Februari sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 348.K/TL.01/MEM.L/2024. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat pasca meningkatnya nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% yang efektif mulai Januari 2025. Diskon tarif listrik dilakukan dengan sasaran 81,4 juta pelanggan atau sekitar 97% dari keseluruhan pelanggan PLN.

Program diskon tarif listrik sebelumnya pernah diberikan selama masa pandemi COVID-19 yaitu pada tahun 2020 – 2021. Sasaran penerima diskon tarif listrik pada periode pandemi adalah rumah tangga (yang terdampak) dengan daya 450VA dan 900VA. Berbeda dengan skema pada tahun 2025, diskon yang diberikan pada masa pandemi tercatat lebih besar dengan kategori rumah tangga dengan daya sampai dengan 450VA mendapatkan potongan 100%, dan rumah tangga sampai dengan 900VA mendapatkan potongan sebesar 50%.

Diskon tarif listrik pada Januari – Februari 2025 berlaku bagi pelanggan prabayar dan pasca bayar secara langsung tanpa harus melakukan registrasi atau prosedur tambahan. Bagi pelanggan prabayar, diskon 50% berlaku saat pembelian token secara langsung yakni dengan meningkatkan jumlah energi listrik (kWh) yang diperoleh dari nilai pembelian awal. Selanjutnya, bagi pelanggan pasca bayar, diskon tarif listrik diberikan saat pembebanan biaya tagihan pada bulan selanjutnya.

Dampak dari berikannya diskon tarif listrik tercermin dari deflasi pada bulan Januari – Februari yang terjadi secara

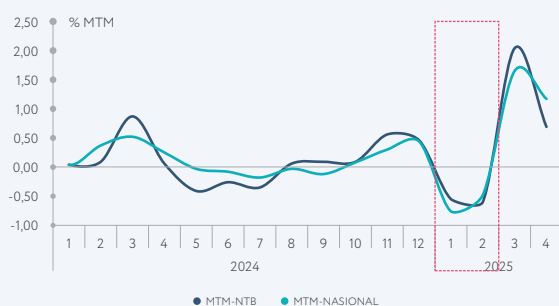
nasional maupun di regional Provinsi Nusa Tenggara Barat (Grafik 1). Berdasarkan rilis BPS Prov. NTB, andil deflasi tarif listrik bulan Januari dan Februari masing-masing adalah sebesar 1,57% (mtm) dan 0,37% (mtm). Berdasarkan informasi anekdotal, dampak penurunan tarif listrik cukup besar di Provinsi NTB disebabkan jumlah pelanggan PLN Prov. NTB mencapai 1,8 juta dengan proporsi pelanggan rumah tangga berkisar 1,67 juta¹.

Adapun dampak diskon tarif listrik pada kelompok harga yang diatur pemerintah tercatat lebih tinggi saat diberikan pada tahun 2025 (Grafik 2), hal tersebut diperkirakan terjadi mengingat diskon tarif listrik yang diberikan mencakup kelompok rumah tangga yang lebih luas dengan penyaluran yang lebih efisien.

Disisi lain, berakhirnya periode diskon tarif listrik pada tahun 2025 juga memberikan *rebound effect* yang besar sehingga mendorong inflasi Prov. NTB pada Maret 2025 mencapai 2,04% (mtm) setelah mengalami deflasi pada dua bulan sebelumnya. Inflasi pada bulan Maret 2025 utamanya disumbang oleh tarif listrik yang memiliki andil inflasi 1,35% (mtm). Lebih lanjut, pada bulan April 2025 tarif listrik juga masih menyumbang inflasi sebesar 0,61% (mtm) khususnya dari pelanggan pasca bayar sehingga mendorong inflasi Prov. NTB menjadi 0,69% (mtm).

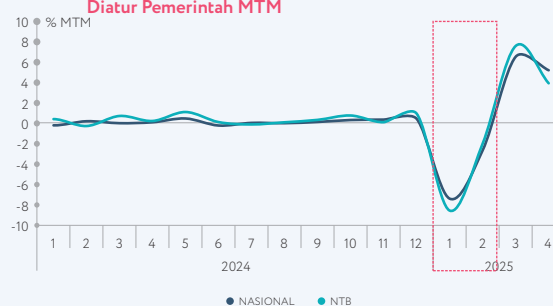
Oleh karena itu dalam jangka pendek kebijakan diskon tarif listrik mampu memberikan efek penahan dalam periode *short-term*. Namun demikian, pemberian diskon tarif listrik kedepannya masih perlu dicermati, utamanya setelah diskon berakhir yang dapat menyebabkan *base-effect* kenaikan inflasi pada periode selanjutnya.

Grafik 1. Dampak Diskon Tarif Listrik Terhadap Inflasi MTM



Sumber: BPS, diolah

Grafik 2. Dampak Diskon Tarif Listrik Terhadap Inflasi Harga yang Diatur Pemerintah MTM



Sumber: BPS, diolah

1. Diproporsikan dengan jumlah pelanggan rumah tangga nasional yaitu 91,47% dari total pelanggan PLN



04

Stabilitas Keuangan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Kinerja sistem keuangan Provinsi NTB pada triwulan I 2025 masih tetap kuat, didorong pertumbuhan kredit investasi yang terakselerasi sebesar 99,07%. Perkembangan positif tersebut turut didukung oleh risiko yang terjaga, tercermin dari NPL yang masih berada pada threshold <5%, yaitu sebesar 2,25%.

Penyaluran kredit perbankan di Provinsi NTB mencapai Rp71,47 triliun pada triwulan I 2025, atau tumbuh 7,97% (yoy), melandai dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 9,51% (yoy). Pada triwulan pelaporan, penurunan kredit disebabkan modal kerja yang berkontraksi, namun demikian pertumbuhan terjadi pada investasi dan konsumsi yang tumbuh melambat. Kredit investasi tercatat berkontraksi sebesar -22,02% (yoy), sedangkan kredit modal kerja dan konsumsi tercatat tumbuh melambat.

Kredit konsumsi rumah tangga menyumbang 31,93% dari total penyaluran kredit di Provinsi NTB. Adapun kredit rumah tangga pada triwulan I 2025 tercatat tumbuh melambat sebesar 3,04% (yoy), sedikit lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,68% (yoy). Masih tumbuhnya kredit rumah tangga di Provinsi NTB pada periode laporan terutama didorong oleh penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kendaraan Bermotor (KKB), dan kredit lainnya yang masih tumbuh positif masing-masing sebesar 11,48% (yoy), 10,53% (yoy), dan 22,68% (yoy).

Lebih lanjut, penyaluran kredit UMKM di Provinsi NTB pada triwulan I 2025 tercatat tumbuh melambat dari 6,11% (yoy) menjadi 4,35% (yoy). Berdasarkan sektor ekonomi, mayoritas kredit UMKM disalurkan pada sektor perdagangan besar dan eceran (pangsa 51,61%) serta sektor pertanian (pangsa 27,1%).

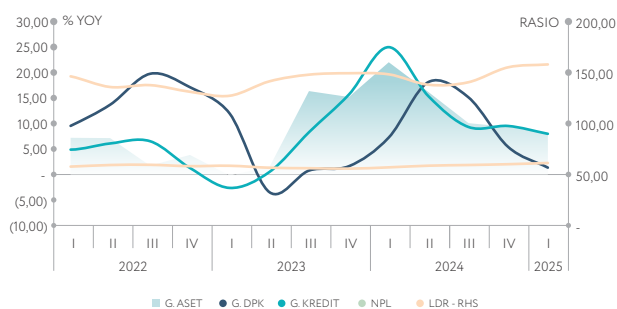
4.1 Perkembangan Kinerja Perbankan di Provinsi NTB

Berdasarkan lokasi bank, kinerja perbankan di Provinsi NTB pada triwulan I 2025 terpantau masih terjaga. Hal ini tercermin dari peningkatan pertumbuhan kredit yang masih tumbuh, disertai dengan rasio *Non Performing Loan* (NPL) yang masih dalam batas. Lebih lanjut, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, penyaluran kredit perbankan pada triwulan I tahun 2025 meningkat dibandingkan tahun 2024 di periode yang sama.

Penyaluran kredit perbankan di Provinsi NTB mencapai Rp71,47 triliun pada triwulan I 2025, atau tumbuh 7,97% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 9,51% (yoy) (Grafik 4.1). Namun demikian apabila dilihat dari nominal terdapat peningkatan yang cukup tinggi ypenyaluran kredit perbankan pada triwulan I tahun 2025 meningkat dibandingkan tahun 2024 di periode yang sama. Berdasarkan jenis penggunaan pertumbuhan kredit disebabkan kredit investasi yang terakselerasi, namun demikian pertumbuhan yang lebih tinggi tertahan pada konsumsi yang melambat dan kontraksi pada modal kerja (Grafik 4.5). Pada triwulan pelaporan, kredit investasi tercatat tumbuh yakni sebesar 99,07% (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat 77,57% (yoy). Disisi lain, pertumbuhan yang lebih tinggi tertahan kredit modal kerja yang terkontraksi -22,02% (yoy). Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat -13,56% (yoy). Sejalan dengan hal tersebut, kredit konsumsi tercatat tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu dari 10,38% (yoy) pada triwulan IV 2024 menjadi 9,65% (yoy). Namun demikian, apabila dilihat dari nominal penyalurannya, penyaluran kredit konsumsi tercatat meningkat yakni Rp30,73 triliun menjadi Rp31,02 triliun pada triwulan pelaporan.

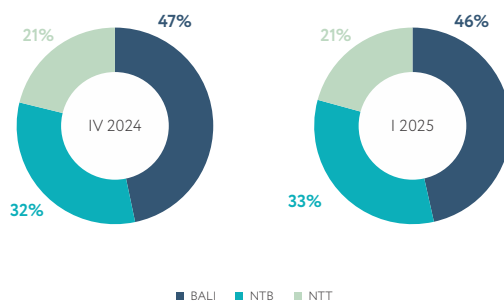
Selanjutnya pada sisi sektoral, pertumbuhan ditopang oleh kredit pertambangan, konstruksi, dan akomodasi, makanan, dan minuman (Grafik 4.7). Meningkatnya kredit pertambangan sejalan dengan masuknya tahap awal fase 8 pertambangan tembaga. Adapun pembangunan infrastruktur yang ada di Provinsi NTB masih berlanjut turut mendukung tumbuhnya

Grafik 4.1 Perkembangan Indikator Perbankan Provinsi NTB



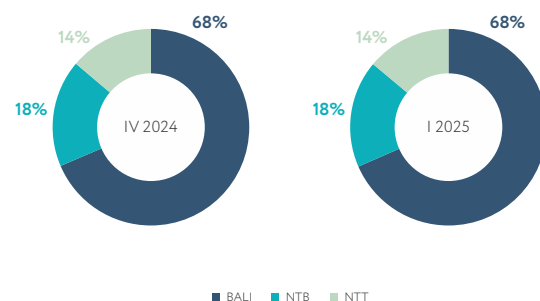
Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik 4.2 Pangsa Penyaluran Kredit di Wilayah Balinusra



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik 4.3 Pangsa Penghimpunan DPK di Wilayah Balinusra



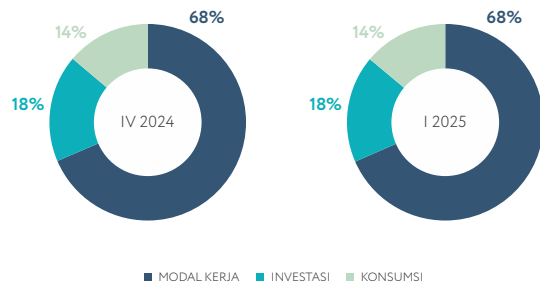
Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

kredit konstruksi. Lebih lanjut, HBKN dan bulan Ramadan mendorong pertumbuhan kredit sektor akomodasi, makanan, dan minuman. Peningkatan kredit juga didorong oleh kredit pertanian dan perdagangan yang masih tumbuh positif meskipun belum setinggi triwulan sebelumnya. Pada periode pelaporan kredit pertambangan tumbuh melambat menjadi 12,6% (yoy), dari sebelumnya 12,7% (yoy). Namun demikian, apabila dilihat dari nilainya terdapat peningkatan kredit dari Rp12,9 triliun menjadi Rp15,32 triliun sejalan dengan sudah berproduksinya smelter pada triwulan I 2025.

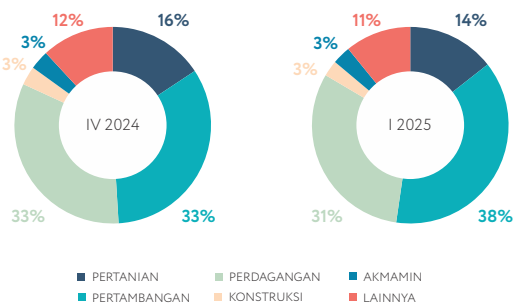
Dibandingkan dengan Provinsi lain di wilayah Balinusra, kredit perbankan di Provinsi NTB menyumbang 32,77% dari total kredit atau terbesar kedua setelah Provinsi Bali (46,49%) (Grafik 4.2). Sementara itu, untuk penghimpunan DPK, perbankan di Provinsi NTB menyumbang 17,65% total DPK di Balinusra, atau tertinggi kedua setelah Provinsi Bali yang menyumbang 68,44% (Grafik 4.3).

4.1.1 Perkembangan Penyaluran Kredit

Penyaluran kredit perbankan di Provinsi NTB pada triwulan I 2025 terpantau tumbuh dibandingkan triwulan sebelumnya. Penyaluran kredit oleh perbankan di Provinsi NTB pada periode laporan tercatat Rp71,47 triliun atau tumbuh 7,97% (yoy) melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 9,51% (yoy). Berdasarkan jenis penggunaan, masih tumbuhnya kinerja penyaluran kredit didorong oleh kredit konsumsi yang memiliki pangsa terbesar yaitu 43,40% (Grafik 4.4).

Grafik 4.4 Pangsa Kredit Perbankan Provinsi NTB Berdasarkan Jenis Penggunaan

Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

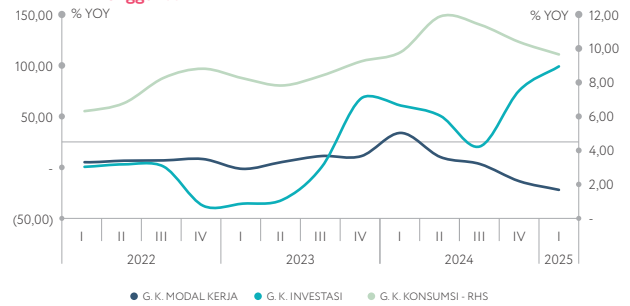
Grafik 4.6 Pangsa Kredit Perbankan Provinsi NTB Berdasarkan Sektor Ekonomi

Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

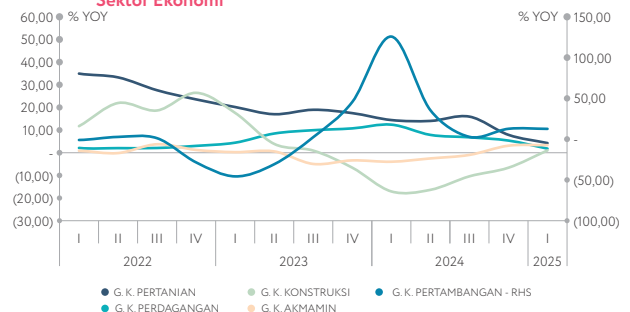
Selanjutnya, pertumbuhan juga tercermin dari kredit investasi (pangsa 25,06%), yang tercatat tumbuh terakselerasi sebesar 99,07% (yoy) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik 4.5).

Berdasarkan sektor ekonomi, pangsa penyaluran kredit perbankan di Provinsi NTB masih berfokus pada tiga sektor utama, yakni sektor pertambangan (pangsa 37,89%), perdagangan (pangsa 31,19%), dan sektor pertanian (pangsa 14,41%) (Grafik 4.6).

Perkembangan positif kinerja penyaluran kredit pada triwulan I 2025 bersumber dari tumbuhnya kredit akomodasi, makanan, dan minuman dan konstruksi. Sejalan dengan hal tersebut, kredit konstruksi juga mencatatkan pertumbuhan meskipun masih terkontraksi. Pada triwulan pelaporan kredit konstruksi tercatat tumbuh dari -6,6% (yoy) pada triwulan IV 2024, menjadi 1,03% (yoy). Disisi lain, pertumbuhan yang lebih tinggi tertahan oleh kredit pertambangan, pertanian, dan perdagangan yang masih tumbuh meskipun tidak setinggi triwulan sebelumnya. Kredit pertambangan yang memiliki pangsa terbesar tercatat mengalami peningkatan secara nominal dari Rp12,9 triliun pada triwulan sebelumnya, menjadi Rp15,3 triliun pada periode pelaporan. Namun demikian apabila dilihat dari pertumbuhannya, kredit pertambangan tercatat tumbuh melambat menjadi 12,6% (yoy) dari 12,7% (yoy). Masih tumbuhnya kredit perdagangan didorong perkembangan operasional dari smelter. Sejalan dengan hal tersebut,

Grafik 4.5 Pertumbuhan Kredit Perbankan Provinsi NTB Berdasarkan Jenis Penggunaan

Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik 4.7 Pertumbuhan Kredit Perbankan Provinsi NTB Berdasarkan Sektor Ekonomi

Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

pertumbuhan kredit pertanian juga tercatat tumbuh melambat dari 7,89% (yoy) pada triwulan IV 2024 menjadi 4,26% (yoy). Salah satu penyebab perlambatan tersebut diantaranya adalah faktor *base effect* penyaluran kredit pertanian di triwulan IV 2024 yang cukup rendah dikarenakan terjadi pergeseran masa tanam akibat EL-Nino. Lebih lanjut, pertumbuhan kredit perdagangan tertahan menjadi 1,82% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya 5,37% (yoy) yang diikuti oleh penurunan penyaluran kredit dari Rp12,7 triliun menjadi Rp12,6 triliun. Disisi lain, HBKN dan pergeseran bulan Ramadan mendorong terakselerasinya pertumbuhan kredit akomodasi, makanan, dan minuman yang sebelumnya 3,11% (yoy) menjadi 3,34% (yoy) pada triwulan pelaporan (Grafik 4.7).

Berdasarkan kelompok nilai, mayoritas penyaluran kredit oleh perbankan di Provinsi NTB didominasi oleh kredit dengan nominal Rp100 juta s.d. Rp500 juta, dimana pangsa mencapai 44,72% dari total penyaluran kredit. Sementara berdasarkan jumlah debitur, mayoritas debitur (pangsa 68,22%) memiliki kredit dengan nominal kurang dari Rp100 juta. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas penyaluran kredit di Provinsi NTB tidak terkonsentrasi pada nominal kredit besar saja, namun merata pada nominal kecil sehingga dapat meminimalkan risiko sistemik. Meski demikian, perlu diperhatikan pangsa kredit dengan nominal di atas Rp10 miliar (pangsa 25,49% dari total kredit) yang dimiliki oleh 0,03% debitur, sehingga berpotensi menimbulkan risiko sistemik jika terjadi kegagalan bayar.

Tabel 4.1 Pengelompokan Kredit Berdasarkan Nilai Tw-I 2025

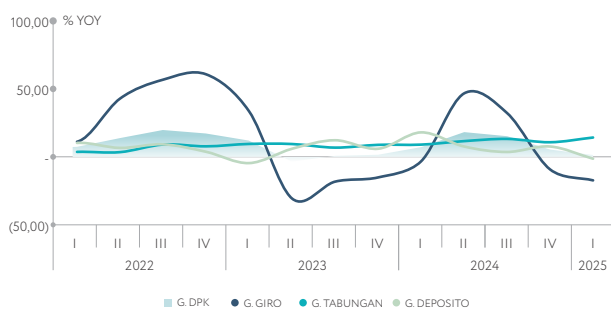
KREDIT	Nominal (Rp Miliar)	% Pangsa	Jumlah Rekening	% Pangsa
0-100 juta	12.809	17,92	381.400	68,22
100-500 juta	31.750	44,42	168.617	30,16
500 juta-1 miliar	3.397	4,75	6.270	1,12
1-10 miliar	5.297	7,41	2.651	0,47
10-20 miliar	18.216	25,49	169	0,03
Total	71.470	100,00	559.107	100,00

Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

4.1.2 Perkembangan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK)

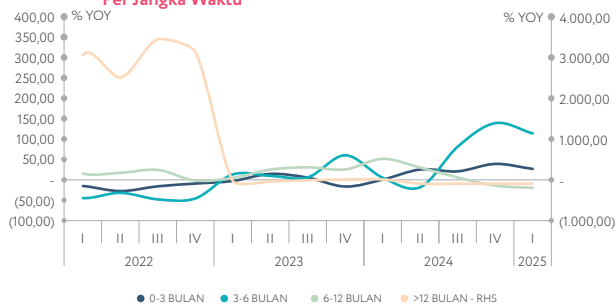
DPK perbankan Provinsi NTB pada triwulan I 2025 tercatat mencapai Rp45,26 triliun atau tumbuh sebesar 1,34% (yoy), melandai dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh sebesar 5,42% (yoy) (Grafik 4.8). Berdasarkan golongan nasabah, menurunnya kinerja penghimpunan dana terutama bersumber dari DPK Pemerintah dan swasta yang berkontraksi masing-masing -5,51% (yoy) dan -19,47% (yoy). Namun demikian, penurunan yang lebih dalam tertahan oleh DPK pemda dan perseorangan yang masih tumbuh meskipun tidak setinggi triwulan sebelumnya. Perkembangan DPK pemerintah tercatat tumbuh melambat sebesar 1,34% (yoy) dari triwulan sebelumnya yang tercatat 5,42% (yoy). Sejalan dengan hal tersebut, DPK pemda dan perseorangan juga tercatat mengalami pertumbuhan yang lebih rendah masing-masing sebesar 5,8% (yoy) untuk DPK Pemda dan 12,94% untuk DPK

Grafik 4.8 Perkembangan DPK Perbankan Provinsi NTB Per Jenis Instrumen



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik 4.10 Perkembangan Deposito Perbankan Provinsi NTB Per Jangka Waktu

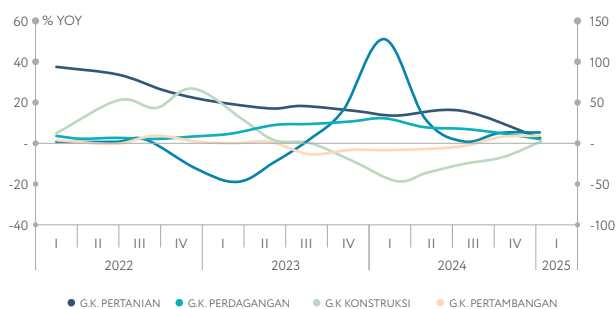


Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Perseorangan (yoy) dibandingkan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya (Grafik 4.9). Sementara itu, berdasarkan jenis instrumennya, masih tumbuhnya DPK terutama berasal dari komponen tabungan (pangsa 3,48%) yang tercatat terakselerasi dari 10,74% (yoy) menjadi 14,22% (yoy) pada triwulan pelaporan. Lebih lanjut, DPK giro mengalami kontraksi menjadi -17,3% pada triwulan I 2025 dari -9,23% di periode yang sama pada tahun sebelumnya, namun secara pangsa meningkat dari 19,52% pada triwulan I 2024 menjadi 22,9% pada triwulan I 2025.

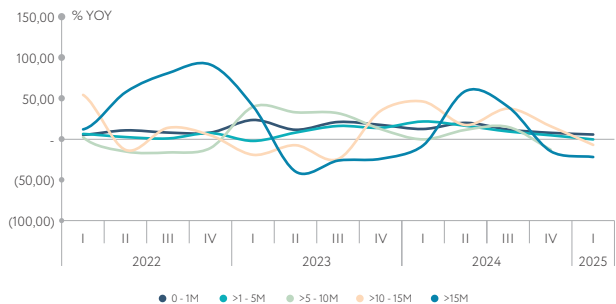
Secara lebih rinci, komponen tabungan tercatat tumbuh sebesar 14,22% (yoy) dari triwulan sebelumnya yaitu 10,74% (yoy). Berdasarkan kelompok nilai, pertumbuhan didorong dari meningkatnya kelompok nilai Rp0-1 miliar, Rp>5-10 miliar, dan >Rp15 miliar. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tabungan dengan nominal >15 miliar yang tumbuh sebesar 325,16% (yoy), meningkat dari triwulan sebelumnya yang tercatat 245,33% (yoy). Sejalan dengan hal tersebut, tabungan dengan kelompok nilai Rp0-1 miliar tercatat tumbuh menjadi 10,54% (yoy) dari 7,37% (yoy) pada triwulan sebelumnya serta kelompok nilai Rp>5-10 miliar yang tumbuh dari -6,42% menjadi 8,76% dibandingkan triwulan sebelumnya. Namun demikian pertumbuhan yang lebih tinggi tertahan oleh tabungan dengan kelompok nilai Rp>1-5 miliar yang tercatat tumbuh 19,58% (yoy), meskipun tidak setinggi triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh 19,82% (yoy) (Grafik 4.12). Secara khusus, komponen tabungan merupakan komponen dengan pangsa tertinggi dibandingkan dengan komponen Giro dan Deposito. Adapun pangsa komponen tabungan mencapai 52,07% dari total DPK.

Grafik 4.9 Perkembangan DPK Perbankan Provinsi NTB Per Nasabah

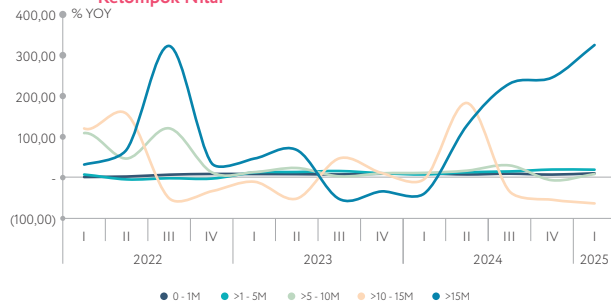


Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik 4.11 Perkembangan Giro Perbankan Provinsi NTB Per Kelompok Nilai



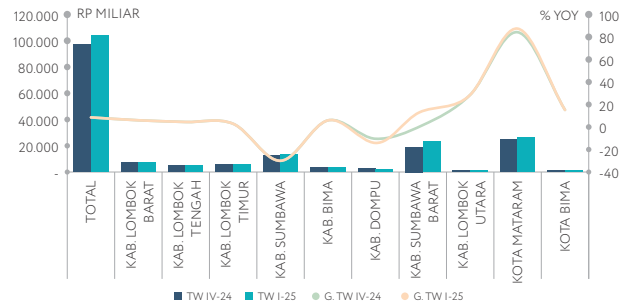
Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik 4.12 Perkembangan Tabungan Perbankan Provinsi NTB Per Kelompok Nilai

Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Di sisi lain, komponen giro terpantau terkontraksi sebesar **-17,3% (yoy)**, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar **-9,23% (yoy)**. Pertumbuhan giro pada triwulan pelaporan tertahan pada seluruh kelompok nilai giro. Giro dengan kelompok nilai >Rp1-5 miliar, >5-10 miliar, dan >Rp10-15 miliar tercatat tumbuh melambat masing-masing sebesar 0,5% (yoy), 15,48% (yoy) dari 7,19% (yoy), dan 22,06% (yoy). Namun demikian apabila dilihat dari nominalnya, giro dengan kelompok nilai >Rp0 – 1 miliar dan Rp>15 miliar mencatatkan nilai yang lebih tinggi yakni Rp1,2 triliun dan Rp7,6 triliun dari Rp1,1 triliun dan Rp5,6 triliun pada triwulan sebelumnya. Lebih lanjut, pertumbuhan komponen giro dengan nilai >Rp0-1 miliar dengan pangsa 11,51% tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 5,51% (yoy) sedangkan giro dengan nilai Rp>15 miliar mengalami kontraksi sebesar 22,06% (yoy) (Grafik 4.11).

Sementara itu, komponen deposito tercatat mengalami kontraksi sebesar **-1,38% (yoy)**, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar **7,61% (yoy)**. Berdasarkan jangka waktunya, peningkatan tertinggi terjadi pada deposito dengan jangka waktu 3-6 bulan (pangsa 20,34% dari keseluruhan total deposito) yang terakselerasi menjadi 113,7% (yoy) meskipun tidak setinggi triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh 138,93% (yoy). Sejalan dengan hal tersebut, deposito dengan jangka waktu 0-3 bulan dengan pangsa terbesar 46,75% dari keseluruhan total deposito tercatat tumbuh melambat 26,7% (yoy) dari 38,98% (yoy) pada triwulan IV 2024. Namun demikian, peningkatan yang lebih tinggi tertahan oleh deposito dengan jangka waktu lainnya yang terkontraksi pada triwulan pelaporan. Deposito dengan jangka waktu 6-12 bulan (pangsa 32,41% dari keseluruhan total deposito) tercatat memiliki pertumbuhan **-19,87% (yoy)**, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang tercatat **-14,16% (yoy)**. Lebih lanjut, deposito dengan jangka waktu >12 bulan mencatatkan kontraksi yang lebih dalam sebesar **-96,49% (yoy)** dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar **-96,45% (yoy)** (Grafik 4.10).

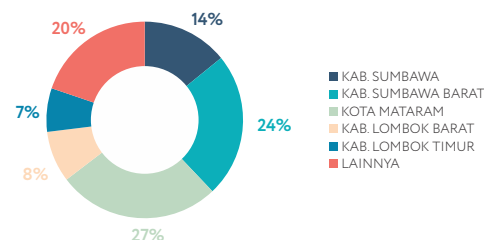
Grafik 4.13 Perkembangan Penyaluran Kredit Kab/Kota di Provinsi NTB

Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

4.1.3 Perkembangan Penyaluran Kredit Secara Spasial

Kota Mataram, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat masih menjadi daerah yang mendominasi penyaluran kredit di wilayah Provinsi NTB. Sebesar 14,15% disalurkan di Kabupaten Sumbawa, 23,77% disalurkan di Kabupaten Sumbawa Barat, dan 26,71% disalurkan di Kota Mataram, sehingga secara total penyaluran kredit di tiga wilayah tersebut mencapai 64,42% dari total keseluruhan penyaluran di Provinsi NTB (Grafik 4.14). Lebih lanjut, fokus penyaluran di Kota Mataram utamanya pada sektor pertambangan dan perdagangan dengan pangsa masing-masing mencapai 39,79% dan 12,33% dari total penyaluran kredit di wilayah tersebut (kredit berdasarkan lokasi proyek). Sementara itu, sektor pertambangan masih menjadi fokus penyaluran kredit di wilayah Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat dengan pangsa total keduanya mencapai 66,74%.

Secara spasial, penyaluran kredit di Kota Mataram yang utamanya berfokus pada sektor perdagangan masih tetap tumbuh kuat (Grafik 4.13). Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan pada triwulan I 2025 yang sebesar 89,08% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 84,23% (yoy) sejalan dengan tingginya permintaan pada periode bulan Ramadan dan HBKN. Di sisi lain, penyaluran kredit di Kabupaten Sumbawa Barat masih terakselerasi sebesar 16,32% (yoy) lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yaitu 4,02% (yoy). Adapun hal ini sejalan dengan operasional smelter yang sudah berjalan.

Grafik 4.14 Pangsa Penyaluran Kredit Kab/Kota di Provinsi NTB Tw-I 2025

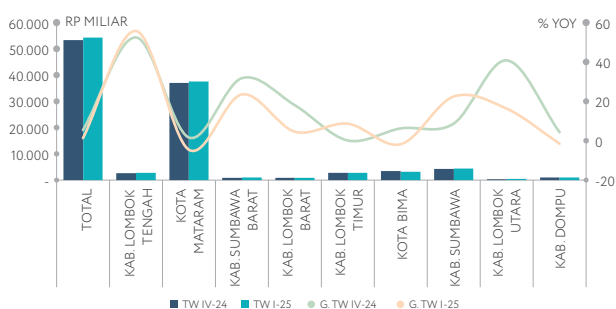
Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

4.1.4 Perkembangan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dari 10 Kabupaten/Kota di Provinsi NTB, penghimpunan DPK pada triwulan I 2025 masih terpusat di Kota Mataram dengan pangsa mencapai 69,35% (Grafik 4.16). Sementara penghimpunan DPK dari Kab/Kota lainnya relatif tersebar merata. Tingginya pangsa penghimpunan DPK di Kota Mataram sejalan dengan tingginya aktivitas ekonomi di daerah tersebut.

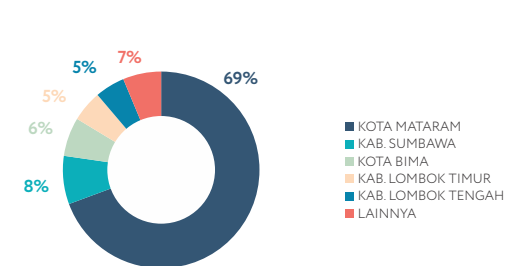
Berdasarkan pertumbuhannya, penghimpunan DPK di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Lombok Utara, dan Kabupaten Lombok Timur, dan mengalami pertumbuhan DPK tertinggi, dimana masing-masing sebesar 55,71% (yoy), 23,50% (yoy), 22,44% (yoy), 16,28% (yoy), dan 8,66% (yoy) (Grafik 4.15). Disisi lain pertumbuhan lebih tinggi relatif tertahan oleh Kabupaten Lombok Barat yang tercatat tumbuh melambat sebesar 4,57% (yoy) dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 18,02% (yoy). Kontraksi terjadi pada beberapa Kabupaten/Kota, diantaranya adalah Kota Mataram, Kota Bima, dan Kabupaten Dompu penurunan sebesar -4,6% (yoy), -1,77% (yoy), dan -1,53% (yoy) dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu 1,62% (yoy), 6,26% (yoy), dan 4,27% (yoy) (Grafik 4.16).

Grafik 4.15 Perkembangan Penghimpunan DPK per Kab/Kota di Provinsi NTB



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik 4.16 Pangsa Penghimpunan DPK Kab/Kota di Provinsi NTB Tw-I 2025



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

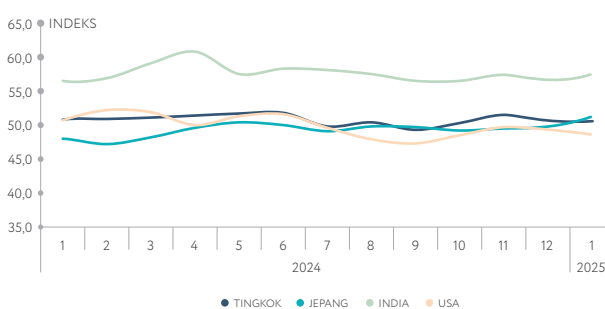
4.2 Perkembangan Sektor Korporasi Provinsi NTB

4.2.1 Sumber Kerentanan dan Kondisi Sektor Korporasi

Sumber kerentanan korporasi dapat berasal dari kondisi perekonomian domestik maupun perekonomian global. Dari sisi domestik, kerentanan korporasi antara lain dipengaruhi oleh tingkat konsumsi masyarakat yang dapat mempengaruhi penjualan domestik, kondisi politik yang memasuki masa transisi, tekanan inflasi yang dapat memengaruhi struktur biaya bahan baku, termasuk kebijakan Pemerintah yang dapat memengaruhi operasional perusahaan. Lebih lanjut, ekonomi NTB yang salah satunya didominasi oleh sektor pertambangan juga cukup terpengaruh dengan transisi hilirisasi ekspor dan kelancaran operasional smelter. Disisi lain ketidakpastian pasar keuangan yang dapat mengganggu iklim bisnis, terjadi akibat kebijakan tarif US.

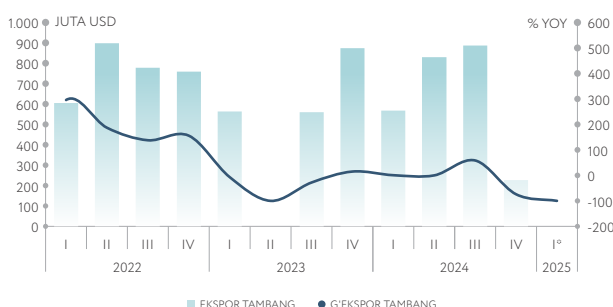
Ketidakpastian global yang masih berlanjut memengaruhi perkembangan permintaan negara mitra dagang utama ekspor Provinsi NTB. Relaksasi ekspor konsentrat dan kondisi ekonomi Tiongkok sebagai salah satu negara tujuan ekspor konsentrat tembaga terpantau masih mengalami peningkatan pada triwulan berjalan (Grafik 4.17). Disisi lain, PMI negara India dan Jepang

Grafik 4.17 Perkembangan PMI Negara Mitra Dagang Utama



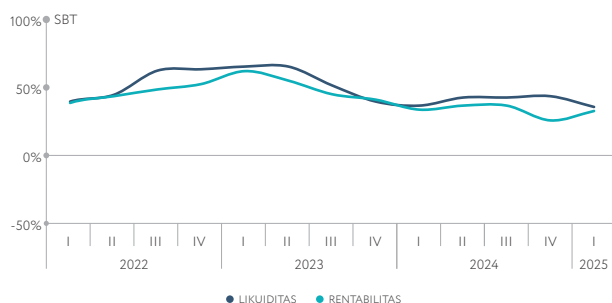
Sumber: CEIC, diolah

Grafik 4.18 Perkembangan Ekspor Tambang NTB



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 4.19 Perkembangan Likuiditas dan Rentabilitas Korporas



Sumber: Bank Indonesia (SKDU).

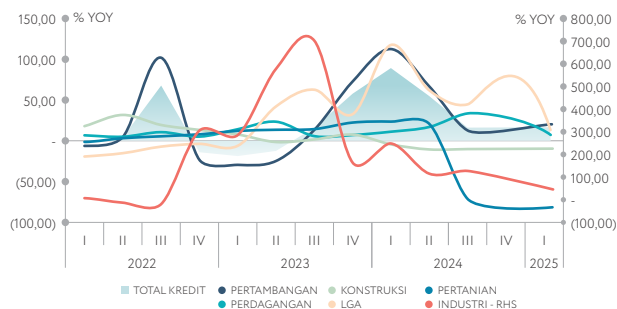
terantau mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya sejalan dengan tertahannya sektor manufaktur dan produktivitas. Lebih lanjut sejalan dengan upaya pemenuhan kebutuhan smelter, ekspor tembaga pada triwulan I 2025 tercatat menurun (Grafik 4.18). Sementara itu, PMI Amerika Serikat yang terus membaik didorong optimisme terhadap kebijakan ekonomi pada masa Pemerintahan baru, dapat memengaruhi perekonomian global secara keseluruhan.

Meski demikian, mengacu pada beberapa indikator terkini, hingga periode laporan kinerja korporasi secara umum di Provinsi NTB tetap kuat. Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang dilakukan oleh Bank Indonesia mengkonfirmasi bahwa likuiditas korporasi mengalami kontraksi. Namun dengan kondisi tersebut, rentabilitas korporasi mengalami kenaikan menunjukkan kemampuan korporasi dalam menghasilkan laba dari kegiatan operasional meningkat.

4.2.2 Perkembangan Kredit Korporasi di Provinsi NTB

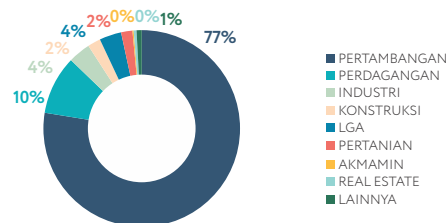
Penyaluran kredit perbankan kepada sektor korporasi tercatat tumbuh lebih tinggi dari triwulan sebelumnya. Penyaluran kredit perbankan untuk korporasi di Provinsi NTB pada triwulan I 2025 tercatat tumbuh 18,07% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat 15,65% (yoy). Sejalan dengan itu, nilai penyaluran kredit korporasi pada triwulan I 2025 tercatat tumbuh dari Rp45,5 triliun menjadi Rp51,83 triliun (Grafik 4.20). Adapun pertumbuhan penyaluran kredit korporasi

Grafik 4.20 Perkembangan Kredit Korporasi Berdasarkan Sektor



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik 4.21 Pangsa Kredit Korporasi Berdasarkan Sektor



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

pada tahun 2023 tercatat terakselerasi disebabkan penyaluran kredit korporasi pada tahun 2022 yang terkontraksi -14,06% (yoy), sehingga menyebabkan penyaluran pada tahun 2023 tumbuh tinggi. Berdasarkan jenis penggunaannya, pertumbuhan melambat dialami oleh kredit modal kerja yang 35,21% (yoy) dari 43,10% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Sementara itu, secara sektoral, akselerasi pertumbuhan dialami oleh sektor dengan pangsa besar, khususnya sektor pertambangan dan penggalian yang tumbuh tinggi 21,42% (yoy).

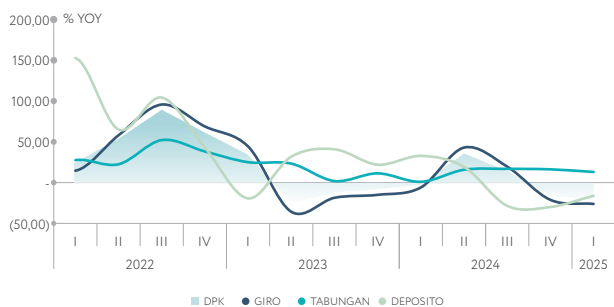
Kredit modal kerja korporasi tercatat tumbuh melambat sebesar 35,21% (yoy), tidak setinggi triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 43,1% (yoy). Pertumbuhan terutama bersumber dari penyaluran kredit sektor pertambangan yang memiliki pangsa terbesar dari kredit investasi (pangsa 76,69%) (Grafik 4.21). Hal ini sejalan dengan mulai beroperasinya smelter.

Kredit investasi tercatat tumbuh dibandingkan triwulan sebelumnya, dari -8,92% (yoy) menjadi 1,65% (yoy) sedangkan kredit konsumsi kerja korporasi pada triwulan I 2025 mengalami kontraksi dari -73,85% (yoy) menjadi -74,5% (yoy) pada triwulan laporan. Masih tumbuhnya kredit investasi korporasi disebabkan oleh kredit pada industri pengolahan yang tumbuh 57,1% (yoy) pada triwulan laporan, tumbuh melambat dari triwulan sebelumnya yang tercatat 86,07% (yoy) pada triwulan lalu. Lebih lanjut, kredit investasi sektor pertambangan juga tercatat tumbuh menjadi 21,42% (yoy) dari 13,41% (yoy) pada triwulan sebelumnya.

4.2.3 Perkembangan DPK Korporasi di Provinsi NTB

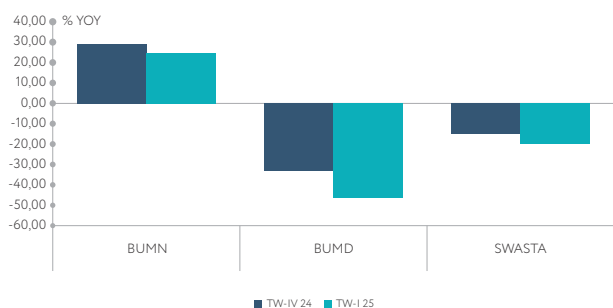
DPK korporasi masih didominasi oleh instrumen giro (pangsa 73,13%), disusul oleh komponen tabungan (pangsa 16,66%), serta deposito (pangsa 10,21%). Penghimpunan DPK korporasi pada triwulan I 2025 tercatat melambat -20,36% (yoy), melandai dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar -16,21% (yoy) (Grafik 4.22).

Grafik 4.22 Perkembangan DPK Korporasi Berdasarkan Instrumen



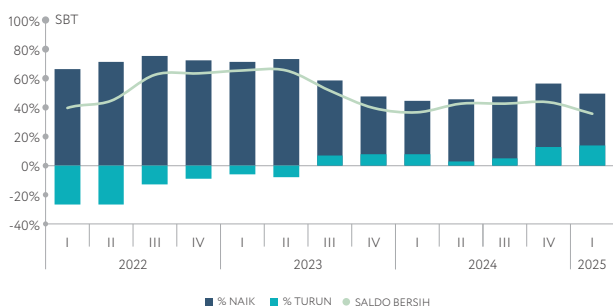
Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik 4.23 Pertumbuhan DPK Korporasi Berdasarkan Golongan Korporasi



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik 4.24 Perkembangan Likuiditas Korporasi



Sumber: Bank Indonesia (SKDU),

Berdasarkan golongannya, melambatnya pertumbuhan DPK terjadi di seluruh golongan terutama swasta dengan pangsa terbesar yaitu 65,42% dari keseluruhan penyaluran DPK korporasi (Grafik 4.23). Namun demikian, berdasarkan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha yang dilakukan oleh Bank Indonesia, diketahui bahwa kondisi likuiditas perusahaan tercatat 43,56% SBT sedikit meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 42,57% SBT, artinya kegiatan usaha masih stabil (Grafik 4.24).

4.3 Perkembangan Sektor Rumah Tangga Provinsi NTB

4.3.1 Sumber Kerentanan dan Kondisi Sektor Rumah Tangga

Rumah tangga memiliki peranan besar terhadap perekonomian dan sistem keuangan di Provinsi NTB. Beberapa faktor yang dapat memberikan tekanan pada kinerja sektor rumah tangga antara lain:

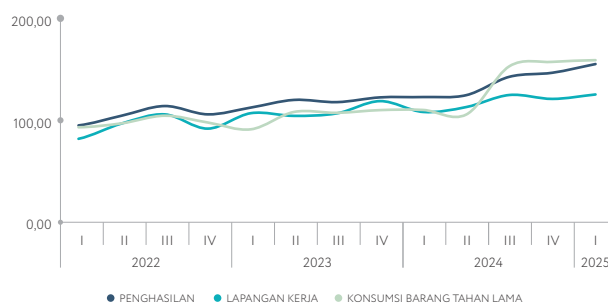
1. Tingkat Pendapatan dan Kinerja Konsumsi Rumah Tangga

Konsumsi rumah tangga menyumbang sekitar 63,61% dari total PDRB di Provinsi NTB selama triwulan I 2025. Dari sektor keuangan, rumah tangga juga menjadi kontributor terbesar dari Penghimpunan DPK (pangsa 59,95% terhadap total DPK pada triwulan I 2025). Faktor utama yang dapat memberikan tekanan dan menjadi sumber kerentanan sektor rumah tangga salah satunya yakni tingkat pendapatan.

Hasil Survei Konsumen (SK) pada triwulan I 2025 mencerminkan keyakinan konsumen terhadap perekonomian masih terjaga dan terus menunjukkan peningkatan pasca penurunan yang terjadi di tahun 2020. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) tercatat berada pada level optimis (>100), yaitu sebesar 128,5. Sejalan dengan itu, indeks penghasilan dan lapangan kerja juga berada pada level optimis, sehingga mengindikasikan bahwa tingkat pendapatan rumah tangga relatif terjaga dan semakin membaik (Grafik 4.25).

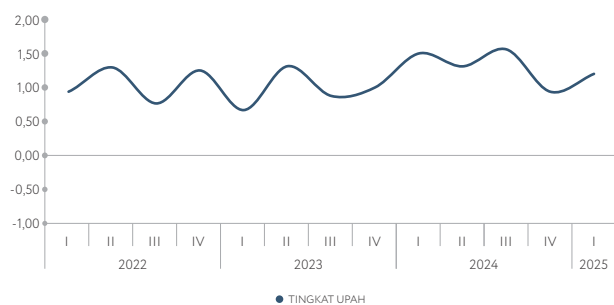
Terus membaiknya tingkat pendapatan masyarakat di Provinsi NTB pasca terjadinya pandemi juga tercermin dari hasil *Liaison*, dimana *Likert Scale* (LS) untuk tingkat upah pada triwulan I 2024 tercatat positif LS 1,2, lebih tinggi triwulan sebelumnya 0,94. Adapun hal tersebut mengindikasikan adanya pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya (Grafik 4.26). Pertumbuhan rata-rata terjadi sejalan dengan meningkatnya UMP dan UMK di daerah.

Grafik 4.25 Indeks Penghasilan & Ketersediaan Tenaga Kerja Saat Ini



Sumber: Bank Indonesia (SK), diolah

Grafik 4.26 Likert Scale Tingkat Upah



Sumber: Bank Indonesia (Liaison), diolah

2. Tingkat Inflasi

Pada Desember 2025, inflasi tiga kota gabungan di Provinsi NTB mencatatkan deflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 1,15% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 1,28% (yoy) (Grafik 4.27). Inflasi tahunan utamanya bersumber dari Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya yang mengalami inflasi sebesar 10,46%(yoy) dengan sumbangan sebesar 0,59% (yoy). Di sisi lain, kenaikan inflasi yang lebih tinggi relatif tertahan oleh Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga yang mengalami deflasi dari triwulan sebelumnya. Adapun realisasi inflasi tersebut menyebabkan secara tahunan inflasi Provinsi NTB lebih tinggi dibandingkan dengan capaian inflasi Nasional pada bulan yang sama yaitu 1,03% (yoy).

Berbagai program dan kegiatan pengendalian inflasi oleh berbagai mitra terkait melalui sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus dilakukan sehingga mampu menjaga terkendalinya inflasi di tahun 2024 diharapkan hal tersebut juga dapat menopang daya beli masyarakat.

Grafik 4.27 Perkembangan Inflasi Tahunan Provinsi NTB



Sumber: BPS, diolah

4.3.2 Perkembangan Kredit Rumah Tangga di Provinsi NTB

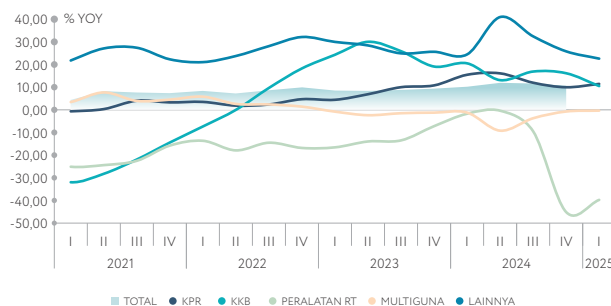
Kredit konsumsi rumah tangga menyumbang 31,93% dari total penyaluran kredit di Provinsi NTB. Adapun kredit rumah tangga pada triwulan I 2025 tercatat tumbuh melambat sebesar

3,04% (yoy), sedikit lebih rendah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,68% (yoy) (Grafik 4.28). Masih tumbuhnya kredit rumah tangga di Provinsi NTB pada periode laporan terutama didorong oleh penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kendaraan Bermotor (KKB), dan kredit lainnya yang masih tumbuh positif masing-masing sebesar 11,48% (yoy), 10,53% (yoy), dan 22,68% (yoy). Namun demikian pertumbuhan yang lebih tinggi tertahan oleh Kredit Mutiguna (pangsa 39,05% dari keseluruhan kredit rumah tangga) yang mengalami kontraksi lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu menjadi -0,35% (yoy) (Grafik 4.29).

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada triwulan I 2025 tercatat tumbuh dari 10,01% (yoy) menjadi 11,48% (yoy) (Grafik 4.30).

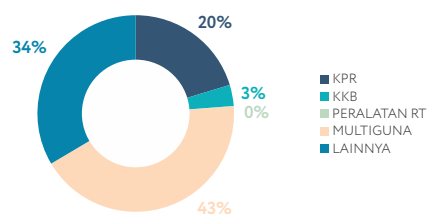
Masih tumbuhnya KPR didukung oleh kegiatan perbankan perumahan bagi masyarakat. Pertumbuhan KPR terutama didorong oleh pertumbuhan KPR tipe perumahan tipe <21 yang terakselerasi menjadi 20,22% (yoy) dari -3,86% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Selanjutnya pertumbuhan juga didukung KPR tipe 21 s.d 70 dan > 70 yang masih tumbuh positif sebesar 18,88% (yoy) dan 16,44% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tercatat 11,50% (yoy) dan 7,01% (yoy). Namun demikian, pertumbuhan yang lebih tinggi tertahan oleh kredit ruko/ rukan yang tercatat terkontraksi pada triwulan pelaporan sebesar -72,44% (yoy), melandai dibandingkan triwulan sebelumnya yang terakselerasi sebesar -1% (yoy).

Grafik 4.28 Perkembangan Kredit Rumah Tangga di Provinsi NTB



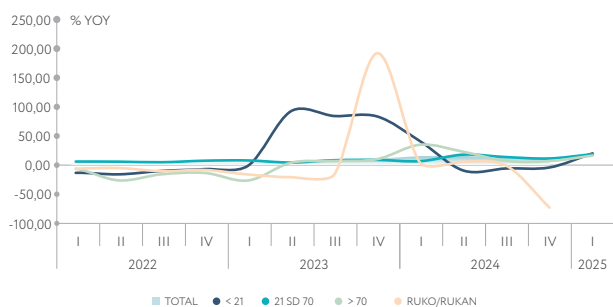
Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik 4.29 Pangsa Kredit Rumah Tangga Menurut Penggunaan

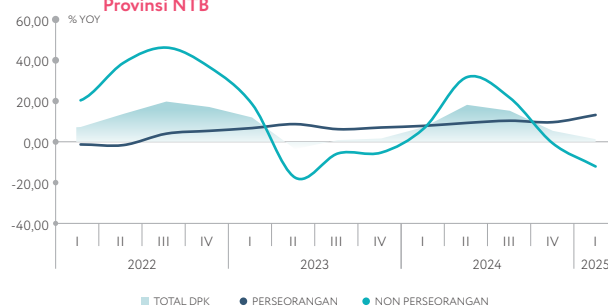


Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik 4.30 Perkembangan Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

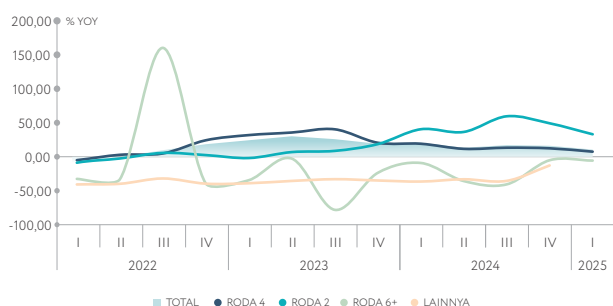


Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik 4.32 Perkembangan DPK Perseorangan & Non Perseorangan
Provinsi NTB

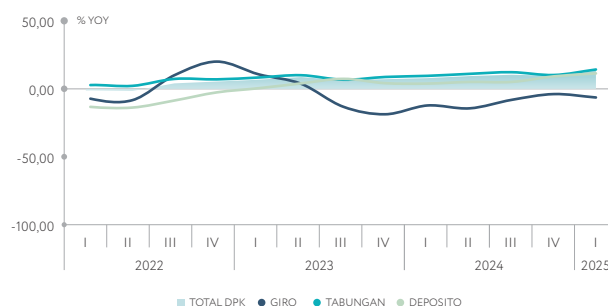
Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik 4.31 Perkembangan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik 4.33 Perkembangan DPK Perseorangan Berdasarkan Instrumen



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) masih tumbuh positif sebesar 10,53% (yoy), meskipun belum setinggi triwulan sebelumnya yang tercatat 16,21% (yoy) (Grafik 4.31). Pertumbuhan KKB terutama ditopang oleh KKB untuk kendaraan roda empat (pangsa 83,66% dari total keseluruhan KKB) yang masih tumbuh 7,47% (yoy), sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tercatat 12,39% (yoy). Sejalan dengan hal tersebut, KKB untuk kendaraan roda dua tercatat tumbuh melambat dari 49,19% (yoy) menjadi 33,05% (yoy) pada triwulan laporan.

Perkembangan dari penyaluran KPR dan KKB terpantau sejalan dengan hasil Survei Konsumen yang dilakukan oleh Bank Indonesia, dimana indeks untuk konsumsi barang tahan lama tumbuh sebesar 153,5 pada triwulan I 2025.

4.3.3 Perkembangan DPK Rumah Tangga di Provinsi NTB

Dana Pihak Ketiga (DPK) rumah tangga menyumbang 59,35% dari total DPK perbankan di Provinsi NTB selama triwulan I 2025. Jumlah DPK rumah tangga di perbankan Provinsi NTB tercatat sebesar Rp26,86 triliun, dengan pertumbuhan mencapai 13,19% (yoy) pada triwulan I 2025, meningkat dari triwulan sebelumnya yang tercatat 9,63% (yoy) atau senilai Rp27,36 triliun (Grafik 4.32). Komposisi DPK rumah tangga pada triwulan I 2025 didominasi oleh tabungan (79,88%), deposito (18,33%), dan giro (1,78%). Pertumbuhan DPK rumah tangga pada periode

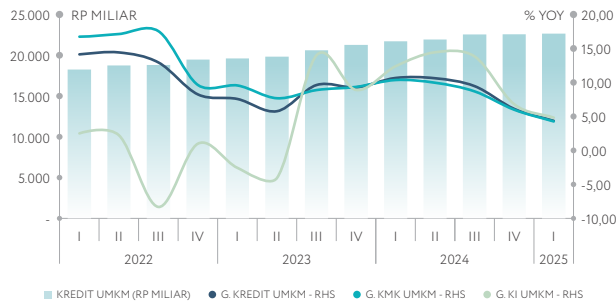
laporan terutama seiring dengan penghimpunan tabungan yang tumbuh 14,17% (yoy), lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tercatat 10,13% (yoy) (Grafik 4.33). Sejalan dengan hal tersebut, deposito rumah tangga juga menunjukkan akselerasi pertumbuhan dari 9,13% (yoy) pada triwulan sebelumnya, menjadi 11,3% (yoy) pada periode pelaporan. Di sisi lain, kontraksi dialami oleh Giro rumah tangga yang melandai dari -3,90% (yoy) menjadi -6,41% (yoy). Berdasarkan jangka waktunya, peningkatan bersumber dari kelompok deposito 3-12 bulan yang terakselerasi dari -32,61% (yoy) pada triwulan IV 2024 menjadi 29,75% (yoy) pada triwulan berjalan. Kelompok deposito < 3 bulan yang tumbuh melambat 12,56% (yoy) dari 135,02% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Adapun pertumbuhan yang lebih tinggi tertahan oleh kelompok > 12 bulan yang terkonsentrasi sebesar -83,56% (yoy) dari triwulan sebelumnya yaitu -94,27% (yoy).

4.4 Perkembangan Pembiayaan UMKM Provinsi NTB

4.4.1 Penyaluran Kredit UMKM di Provinsi NTB

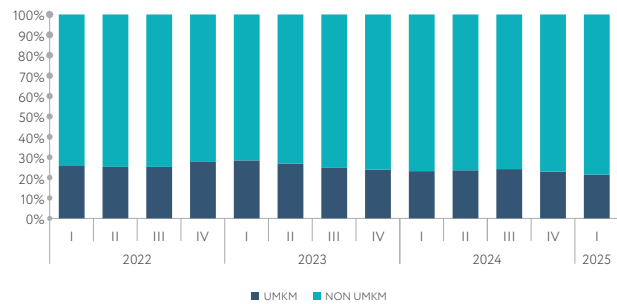
Saat ini penyaluran kredit UMKM tercatat 21,49% dari keseluruhan penyaluran kredit, sedikit melandai dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 22,93% dan lebih rendah dari target RPIM (>30%). Selanjutnya, penyaluran kredit UMKM di Provinsi NTB pada triwulan I 2025 tercatat tumbuh melambat dari 6,11% (yoy) menjadi 4,35% (yoy) (Grafik 4.34). Namun demikian dari sisi nominal, terdapat pertumbuhan penyaluran kredit UMKM dari Rp22,5 triliun menjadi

Grafik 4.34 Pertumbuhan Kredit UMKM di Provinsi NTB



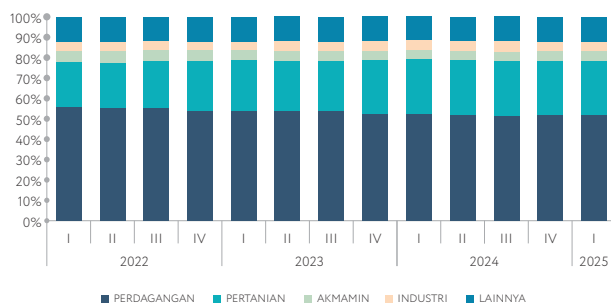
Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik 4.35 Pangsa Kredit UMKM Terhadap Total Kredit



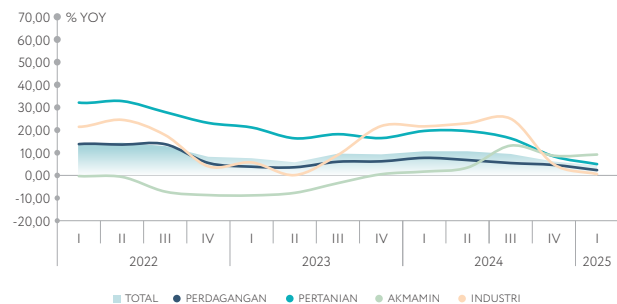
Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik 4.36 Perkembangan Pangsa Kredit UMKM Sektoral



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik 4.37 Pertumbuhan Kredit UMKM Secara Sektoral



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

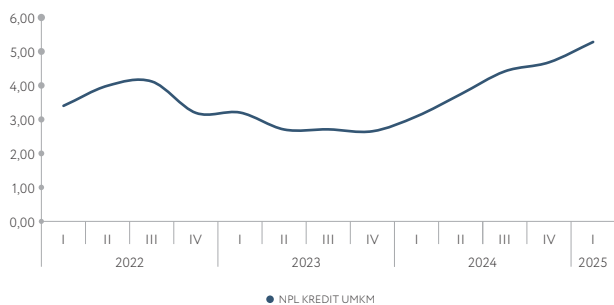
Rp22,6 triliun. Pertumbuhan kredit UMKM yang terbatas utamanya disebabkan penurunan daya beli masyarakat yang berdampak pada menurunnya permintaan terhadap produk yang tercermin pada perlambatan kredit rumah tangga. Masih tingginya kredit UMKM terutama didorong oleh kredit investasi yang tercatat masih tumbuh 4,82% (yoy) pada periode pelaporan, meskipun tidak setinggi triwulan sebelumnya. Lebih lanjut, kredit modal kerja yang memiliki pangsa terbesar (pangsa 85,11%) juga tercatat tumbuh melambat dari 5,99% (yoy) menjadi 4,26% (yoy). Secara sektoral, pertumbuhan kredit UMKM didorong oleh masih positifnya seluruh sektor. Kredit UMKM sektor industri tercatat tumbuh sebesar 0,58% (yoy), meskipun tidak setinggi triwulan sebelumnya yang terakselerasi 4,83% (yoy). Namun, peningkatan terjadi pada industri akomodasi, makanan, dan minuman dengan peningkatan kredit dari 8,68% (yoy) menjadi 9,2% (yoy). Pertumbuhan secara melambat terjadi pada sektor perdagangan dan pertanian juga tercatat tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 4,59% (yoy) dan 8,38% (yoy) menjadi 2,32% (yoy) dan 4,97% (yoy). Dari sisi risiko, rasio NPL UMKM pada triwulan I 2025 berada di atas *threshold* <5%, yaitu sebesar 5,28%, sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencatatkan 4,68% (yoy). Hal ini dikarenakan berakhirnya relaksasi restrukturisasi kredit terkait pandemi COVID-19 pada Maret 2024, sehingga terjadi peningkatan NPL terutama pada segmen usaha kecil dan mikro.

Pangsa kredit UMKM terhadap total kredit di Provinsi NTB relatif stabil pada triwulan I 2024 (Grafik 4.35), mencerminkan komitmen perbankan dalam mendorong perluasan akses keuangan dari UMKM. Pangsa penyaluran kredit UMKM di Provinsi NTB mencapai 21,49% pada periode laporan.

Berdasarkan kelompok UMKM, pangsa penyaluran kredit UMKM di Provinsi NTB didominasi oleh kelompok mikro dengan pangsa mencapai 54,5% dan diikuti oleh kelompok kecil dengan pangsa sebesar 33,94%. Sementara itu, berdasarkan sektor ekonomi, mayoritas kredit UMKM disalurkan pada sektor perdagangan besar dan eceran (pangsa 51,61%) serta sektor pertanian (pangsa 27,1%) (Grafik 4.36). Namun demikian, pertumbuhan kredit UMKM pada kedua sektor tersebut pada periode pelaporan tercatat tumbuh melambat dari masing-masing 4,59% (yoy) dan 8,38% (yoy) menjadi 2,32% (yoy) dan 4,97% (yoy) (Grafik 4.37).

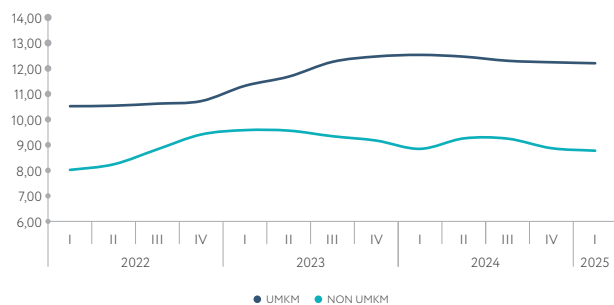
Kualitas penyaluran kredit UMKM di Provinsi NTB masih berada pada *threshold* berisiko tinggi (<5%) (Grafik 4.38). Rasio NPL kredit UMKM di Provinsi NTB pada triwulan I 2025 tercatat sebesar 5,28%, cenderung meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 4,68%. Di sisi lain, tingkat suku bunga UMKM pada periode laporan tercatat sebesar 12,20%, sedikit menurun dibandingkan triwulan IV 2024 (12,24%) (Grafik 4.39).

Grafik 4.38 Perkembangan NPL Kredit UMKM



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik 4.39 Perkembangan Suku Bunga Kredit UMKM



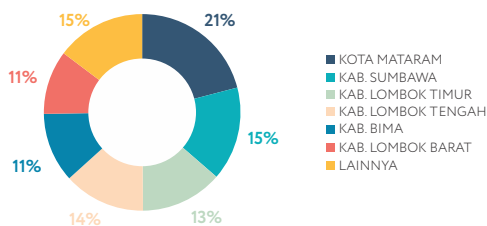
Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

4.4.2 Penyaluran Kredit UMKM Secara Spasial

Penyaluran kredit UMKM di 10 Kab/Kota di Provinsi NTB pada triwulan I 2025 didominasi oleh Kota Mataram, Kab. Sumbawa, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur, Kab. Bima, dan Kab. Lombok Barat. Total pangsa enam Kab/Kota utama penyaluran kredit UMKM di Provinsi NTB tersebut mencapai 85,3% dari total kredit UMKM atau meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 84,96%. Adapun penyaluran kredit UMKM di enam Kab/Kota tersebut relatif tersebar merata dan telah mewakili pusat aktivitas perekonomian UMKM baik di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa.

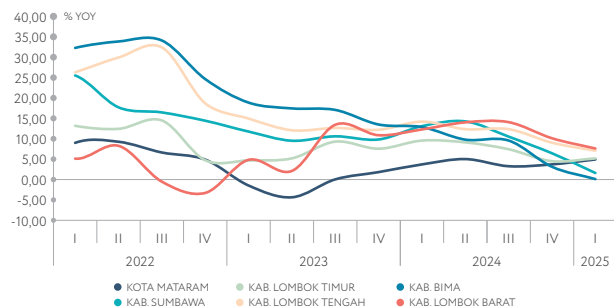
Berdasarkan pertumbuhannya, Kabupaten Lombok Barat mengalami pertumbuhan kredit UMKM tertinggi, yakni mencapai 7,61% (yoy) meskipun tidak setinggi triwulan sebelumnya yang terakselerasi 10,12% (yoy). Lebih lanjut, kredit UMKM di Kota Mataram juga tercatat tumbuh dari 3,72% (yoy), menjadi 4,92% (yoy). Secara sektoral, pertumbuhan kredit UMKM di Kota Mataram disebabkan Kota Mataram merupakan pusat perekonomian serta meningkatnya mobilitas masyarakat memasuki periode libur Natal dan tahun baru. Hal serupa juga tercermin dari masih tumbuhnya kredit UMKM Kabupaten Lombok Tengah sebesar 7,06% (yoy).

Grafik 4.40 Pangsa Penyaluran Kredit UMKM Per Kab/Kota di Provinsi NTB



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah

Grafik 4.41 Perkembangan Pertumbuhan Kredit UMKM di Kab/Kota Utama



Sumber: Laporan Bank Umum, diolah





05

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Aliran uang kartal di Provinsi NTB pada triwulan I 2025 tercatat net outflow Rp0,02 triliun (Grafik 5.1.1). Pada triwulan laporan, jumlah aliran uang kartal keluar dari Bank Indonesia melalui perbankan (*outflow*) sebesar Rp2,72 triliun meningkat 24,3% (qtoq). Disisi lain, jumlah aliran uang kartal yang kembali ke Bank Indonesia (*inflow*) sebesar Rp2,7 triliun meningkat hampir 2 kali dari triwulan sebelumnya (Grafik 5.2). Kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor musiman seperti akumulasi dampak arus *inflow* di awal tahun dan permintaan uang kartal pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idul Fitri yang terjadi sepenuhnya pada triwulan I 2025.

Transaksi melalui sistem *Real Time Gross Settlement* (RTGS) di Provinsi NTB tercatat sebesar Rp8,8 triliun dengan capaian volume sebesar 4.063 transaksi pada triwulan I 2025. Sementara itu, transaksi melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) pada periode laporan mencapai 46.123 Dokumen Keuangan Elektronik (DKE) dengan nominal mencapai Rp2,6 triliun.

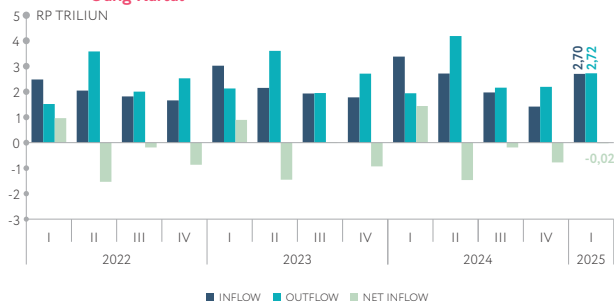
Penggunaan kanal pembayaran QRIS di wilayah Nusa Tenggara Barat terus tumbuh hingga triwulan I 2025. Dilihat dari jumlah merchant, per Maret 2024 terdapat 363.016 merchant QRIS di Provinsi NTB atau tumbuh 105% (yoy). Lebih lanjut, total pengguna QRIS di Provinsi NTB sampai dengan bulan Maret 2025 sebanyak 487.153 pengguna, meningkat 8% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Secara spasial, jumlah *merchant* QRIS terbanyak pada triwulan I 2025 terdapat di Kota Mataram, Kab. Lombok Timur dan Kab. Lombok Tengah.

5.1 Transaksi Pembayaran Tunai

Aliran uang kartal di Provinsi NTB pada triwulan I 2025 tercatat *net outflow* Rp0,02 triliun (Grafik 5.1). Pada triwulan laporan, jumlah aliran uang kartal keluar dari Bank Indonesia melalui perbankan (*outflow*) sebesar Rp2,72 triliun meningkat 24,3% (qoq). Disisi lain, jumlah aliran uang kartal yang kembali ke Bank Indonesia (*inflow*) sebesar Rp2,7 triliun meningkat hampir 2 kali dari triwulan sebelumnya (Grafik 5.2). Kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor musiman seperti akumulasi dampak arus *inflow* di awal tahun dan permintaan uang kartal pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idul Fitri yang terjadi sepenuhnya pada triwulan I 2025.

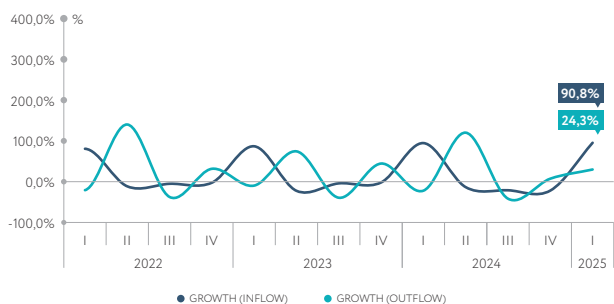
Peredaran uang kartal pada triwulan laporan cenderung dipengaruhi oleh permintaan HBKN Ramadan dan Idul Fitri (RaFi) yang relatif meningkat dari periode biasanya. Pada periode RaFi 2025, *outflow* mengalami penurunan hingga -12% (yoy), sejalan dengan itu *inflow* pun tercatat menurun signifikan hingga -52,7%. Secara akumulasi, pengedaran uang selama RAFI 2025 mengalami *nettflow* sebesar Rp2,1 triliun relatif sama dengan periode RAFI tahun 2024 (tabel 5.1.4). Hal ini menunjukkan dua hal, **pertama** meskipun *outflow* pada RAFI 2025 menurun namun spinover uang tunai yang tergambar dari *nettflow* relatif tetap sama dengan periode RAFI tahun sebelumnya. **Kedua**, *nettflow* yang relatif sama disebabkan oleh adanya efektifitas pengedaran uang Rupiah di masyarakat khususnya dari sisi *cash handling* oleh perbankan ke Bank Indonesia.

Grafik 5.1 Perkembangan Nominal Inflow, Outflow, dan Net Outflow Uang Kartal



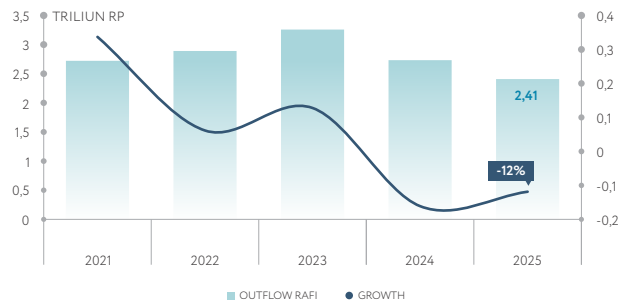
Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.2 Perkembangan outflow dan inflow mingguan



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.3 data outflow Ramadan dan Idul Fitri (RaFi)



Sumber : Bank Indonesia

Tabel 5.1 Data outflow-inflow-nettflow Ramadan dan Idul Fitri (RaFi)

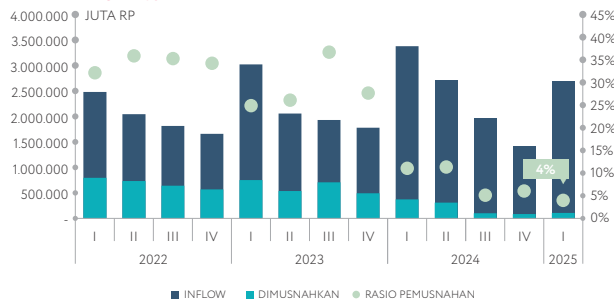
TAHUN	RAFI 2023	RAFI 2024	RAFI 2025
Outflow	3,26	2,73	2,41
Growth (%)		-16,1%	-11,9%
Inflow	0,43	0,62	0,29
Growth (%)		41,9%	-52,7%
Nettflow	(2,8)	(2,1)	(2,1)
Growth (%)		-25,0%	0,0%

Sumber: Bank Indonesia

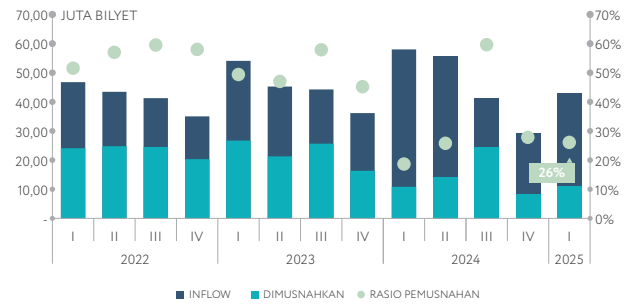
Sebagai upaya menjaga kualitas uang beredar di masyarakat, Bank Indonesia selalu melaksanakan sortasi atas *inflow* dengan memperhatikan parameter dan kapasitas pengolahan uang Rupiah. Dari kegiatan sortasi tersebut, diperoleh hasil pengolahan berupa Uang Layak Edar (ULE) yang diedarkan kembali ke masyarakat dan Uang Tidak layak Edar (UTLE) yang selanjutnya dimusnahkan menggunakan Mesin Racik uang Kertas (MRUK). Pada periode laporan, UTLE yang telah dimusnahkan sebesar Rp107 miliar dengan rasio 4% dari *inflow* (grafik 5.5). Secara bilyet, jumlah uang yang dimusnahkan tersebut berjumlah 11,2 juta bilyet atau 26% dari *inflow* (grafik 5.1.6).

Berdasarkan pecahannya, UTLE yang dilakukan pemusnahan oleh Bank Indonesia didominasi oleh Uang Pecahan Kecil (UPK) mencapai 96,63%, sementara untuk Pecahan Besar (UPB) hanya 3,37% dari total bilyet UTLE (Grafik 5.6).

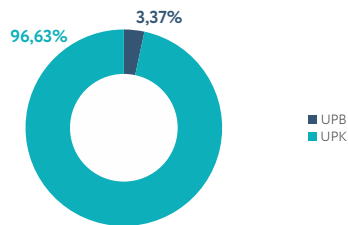
Kpw BI Provinsi NTB secara proaktif menjaga kualitas dan ketersediaan uang kartal bagi masyarakat hingga ke wilayah Terdepan Terluar dan Terpencil (3T). Kas keliling menjadi salah satu sarana dalam mengimplementasikan *clean money policy* sekaligus memenuhi kebutuhan uang di masyarakat. Selama triwulan I 2025, realisasi layanan kas keliling sebesar Rp18,65 miliar dengan 8 kali pelaksanaan (grafik 5.7) termasuk tiga kali diantaranya menyasar ke wilayah 3T yakni Sembalun (Lombok Timur), Pulau Bungin (Kabupaten Sumbawa) dan Sekotong Tengah (Kabupaten Lombok Barat).

Grafik 5.4 Perkembangan pemusnahan dan rasio terhadap inflow dalam nominal

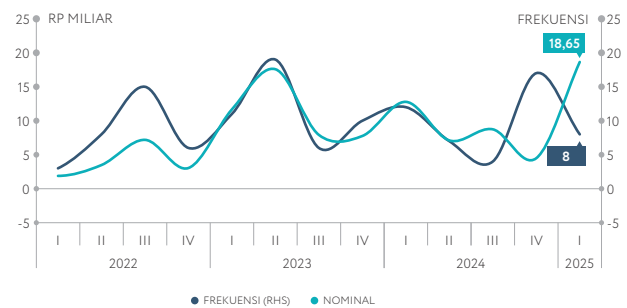
Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.5 pangsa Pemusnahan UTLE, prosentase dalam bilyet

Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.6 Prosentase rasio pemusnahan uang UPB dan UPK

Sumber : Bank Indonesia

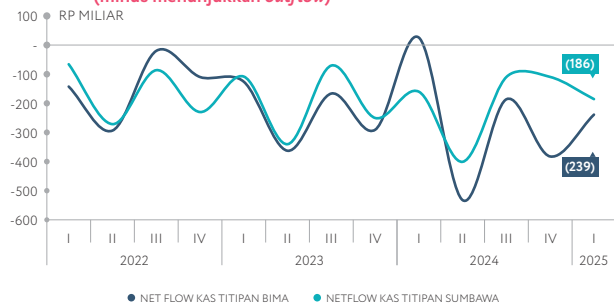
Grafik 5.7 Kegiatan kas keliling

Sumber : Bank Indonesia

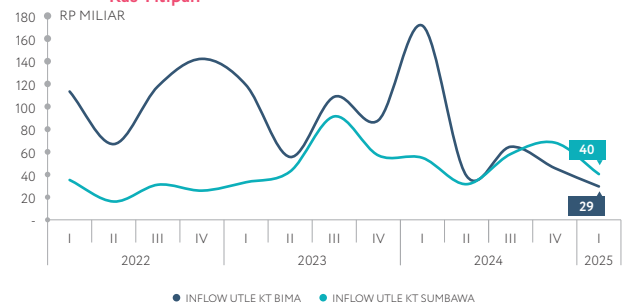
Selanjutnya, pengedaran uang di berbagai daerah juga terus dilaksanakan secara berkala melalui kas titipan, khususnya dalam rangka memastikan ketersediaan uang Rupiah yang layak edar di seluruh pelosok wilayah NTB. Saat ini terdapat 2 (dua) titik lokasi kas titipan yang berada di Kota Bima dan Kabupaten Sumbawa yang dikelola oleh **Bank NTB Syariah** dengan bank peserta meliputi **Bank NTB Syariah, BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN, Bank Mega, Bank Danamon, BSI, BCA dan Bank Sinarmas**. Sebagai bentuk upaya pemenuhan kebutuhan uang pada kedua kas titipan tersebut, selama triwulan I 2025 telah dilaksanakan sebanyak 5 (lima) kali pemenuhan tambahan kas titipan, dengan total *dropping* mencapai Rp522,8 miliar.

Keberadaan Kas Titipan di Bima dan Sumbawa memegang peranan penting dalam menjaga pemenuhan uang Rupiah layak

edar bagi masyarakat di Pulau Sumbawa. Hal tersebut tampak dari historis *net outflow* yang konsisten terjadi setiap bulan dari tahun ke tahun sebagaimana tampak pada grafik 5.1.9. Dalam implementasi *clean money policy*, keberadaan Kas Titipan di Bima berkontribusi menyerap UTLE sebesar Rp29 miliar, sedangkan Kas Titipan di Sumbawa telah menyerap UTLE sebesar Rp40 miliar pada periode laporan. Secara pangsa *outflow* Kas Titipan Bank Indonesia di Bima yang melayani kebutuhan uang Rupiah untuk Kota Bima, Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sebesar 16% dari *outflow* Provinsi NTB. Sedangkan Kas Titipan Bank Indonesia di Sumbawa melayani kebutuhan uang Rupiah untuk Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat sebesar 14% dari *outflow* Provinsi NTB (grafik 5.10). Selain itu, keberadaan kedua kas

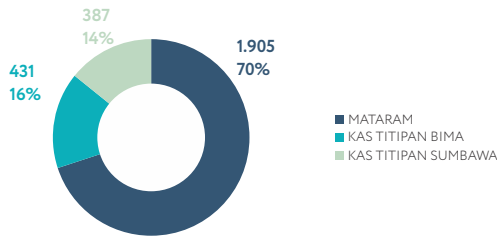
Grafik 5.8 Perkembangan net flow di wilayah Kas Titipan Bima dan Sumbawa (minus menunjukkan outflow)

Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.9 Data Perkembangan penyerapan UTLE di wilayah kerja Kas Titipan

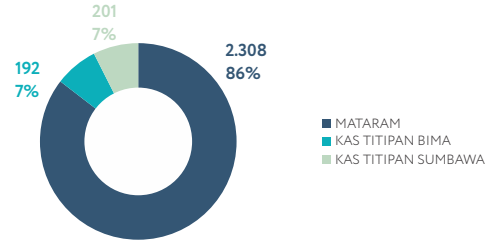
Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.10 Pangsa outflow berdasarkan wilayah layanan kas



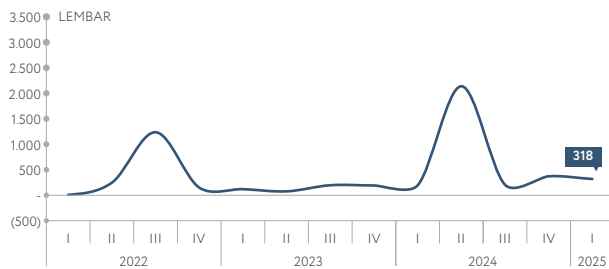
Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.11 Pangsa inflow berdasarkan wilayah layanan kas



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.12 Temuan uang palsu



Sumber : Bank Indonesia

titipan tersebut juga berkontribusi sebesar 14% terhadap upaya perbankan dalam menjaga efektifitas dan efisiensi kecukupan likuiditasnya dengan pangsa *inflow* pada Kas Titipan Bank Indonesia di Bima tercatat 7% dan di Sumbawa sebesar 7% (grafik 5.11).

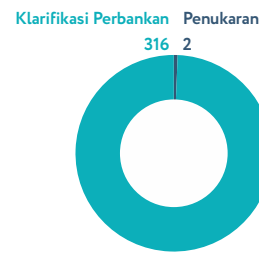
Jumlah *counterfeit banknotes* atau fisik uang Rupiah yang diragukan keasliannya berdasarkan laporan perbankan ataupun masyarakat triwulan I 2025 tercatat sebanyak 318 lembar (grafik 5.12) yang hampir seluruhnya merupakan permintaan klarifikasi uang yang diragukan keasliannya dari perbankan sebanyak 316 lembar (grafik 5.13).

5.2 Transaksi Pembayaran Non-tunai

5.2.1 Transaksi *Real Time Gross Settlement* (RTGS)

Pada triwulan I 2025, nominal transaksi *Real Time Gross Settlement* (RTGS) di Provinsi Nusa Tenggara Barat tercatat sebesar Rp7,21 triliun, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai Rp8,8 triliun. Volume transaksi juga mengalami penurunan dari 4.526 transaksi pada triwulan IV 2024 menjadi 4.063 transaksi (Grafik 5.14). Penurunan ini mencerminkan perlambatan aktivitas transaksi bernilai besar antar pelaku ekonomi, yang umumnya mencerminkan pergerakan dana dalam skala besar, seperti antar bank, perusahaan besar, maupun transaksi pemerintah.

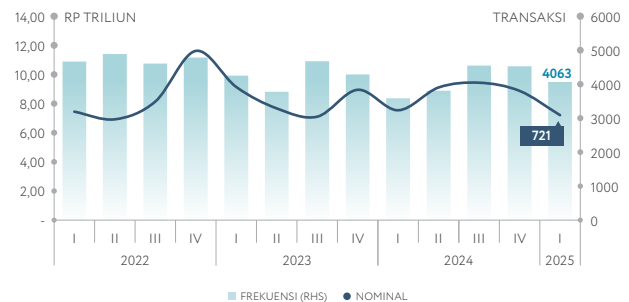
Grafik 5.13 Sumber laporan uang palsu



Sumber : Bank Indonesia

Penurunan yang terjadi dipengaruhi oleh *base effect* pasca periode akhir tahun, di mana aktivitas ekonomi dan belanja pemerintah biasanya lebih tinggi. Di sisi lain, stabilitas volume transaksi mencerminkan bahwa pelaku ekonomi tetap aktif dan sistem RTGS tetap menjadi kanal utama dalam memfasilitasi transaksi bernilai besar. Dengan stabilnya infrastruktur pembayaran dan adanya potensi percepatan belanja pemerintah serta investasi di kuartal berikutnya, aktivitas RTGS di NTB diperkirakan akan kembali meningkat dalam periode mendatang.

Grafik 5.14 Perkembangan Transaksi RTGS



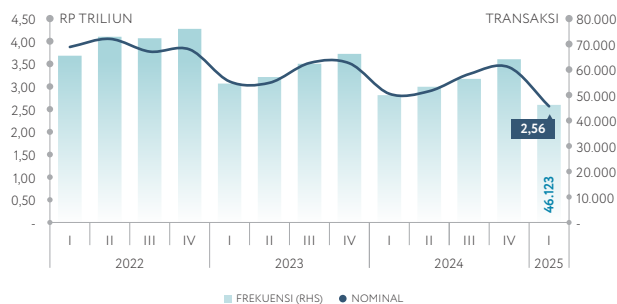
Sumber : Bank Indonesia

5.2.2 Transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)

Pada triwulan I 2025, nilai transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) tercatat sebesar Rp2,56 triliun dengan volume transaksi sebanyak 46.123. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai Rp3,42 triliun secara nominal dan 64.087 transaksi secara volume (Grafik 5.15). Penurunan ini merupakan kelanjutan dari tren yang telah berlangsung sejak 2023, seiring dengan meningkatnya adopsi kanal pembayaran digital yang lebih efisien dan *real-time*.

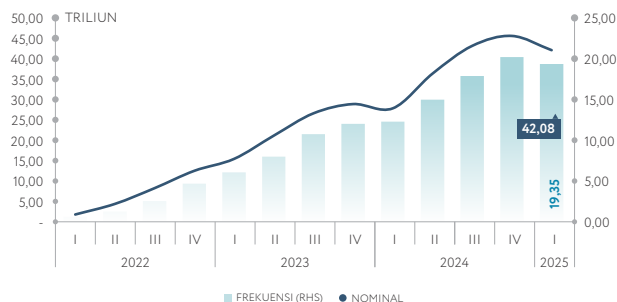
Sebaliknya, transaksi melalui BI-FAST terus menunjukkan pertumbuhan yang kuat. Pada triwulan I 2025, nilai transaksi BI-FAST mencapai Rp42,08 triliun dengan volume mencapai 19,35 juta transaksi. Kinerja ini mencerminkan preferensi masyarakat dan pelaku ekonomi terhadap layanan pembayaran yang lebih cepat, murah, dan tersedia 24/7. Lonjakan penggunaan BI-FAST seiring penurunan transaksi SKNBI mengindikasikan adanya peralihan yang positif dalam ekosistem sistem pembayaran ritel di Provinsi NTB menuju *platform* yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan digitalisasi ekonomi.

Grafik 5.15 Perkembangan Transaksi SKNBI



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.16 Perkembangan Transaksi BI-FAST



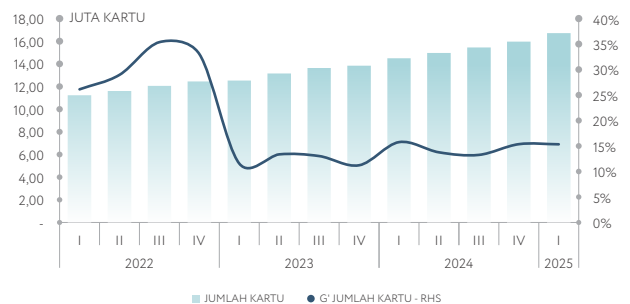
Sumber : Bank Indonesia

5.2.3 Transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)

Pada triwulan I 2025, perkembangan kartu debit di Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan pertumbuhan positif dari sisi jumlah kepemilikan kartu. Jumlah kartu debit yang beredar mencapai hampir 17 juta kartu, mencerminkan peningkatan akses dan keterhubungan masyarakat terhadap layanan keuangan formal. Tren ini sejalan dengan upaya percepatan inklusi keuangan yang terus didorong oleh otoritas dan industri perbankan, khususnya dalam menjangkau masyarakat di wilayah yang sebelumnya tergolong kurang terlayani oleh sistem keuangan nasional.

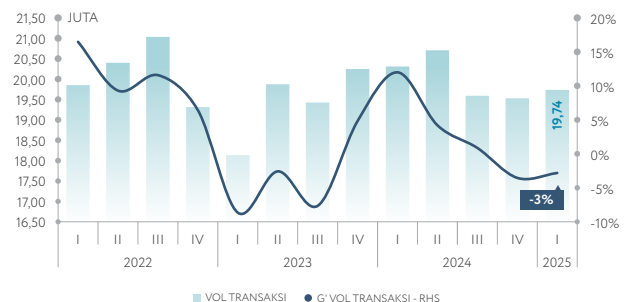
Namun demikian, meskipun jumlah kartu menunjukkan pertumbuhan yang stabil, volume transaksi kartu debit justru mengalami kontraksi pada periode yang sama. Volume transaksi tercatat sebesar 19,74 juta kali, atau menurun 3% (yoy) dibandingkan triwulan I tahun sebelumnya. Penurunan ini mengindikasikan adanya pergeseran preferensi masyarakat dalam memilih instrumen pembayaran, di mana kanal pembayaran berbasis digital seperti QRIS dan dompet elektronik mulai mengambil porsi yang lebih besar dalam

Grafik 5.17 Jumlah Kartu Kredit



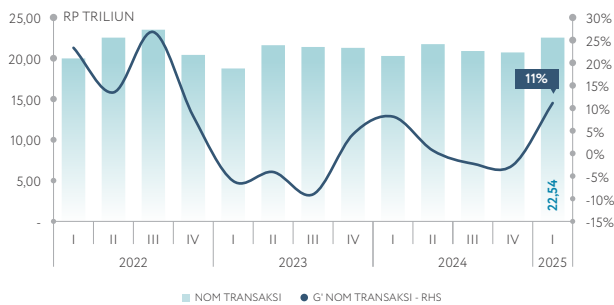
Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.18 Perkembangan Volume Transaksi Kartu Kredit



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.19 Perkembangan Nominal Transaksi Menggunakan Kartu Kredit



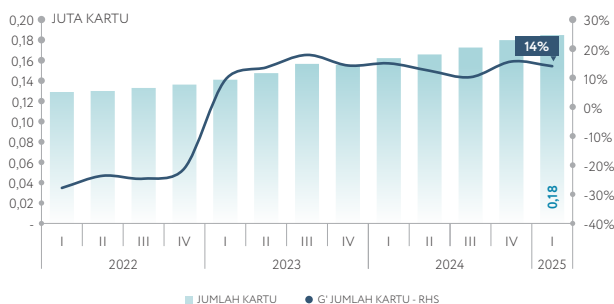
Sumber : Bank Indonesia

transaksi harian. Hal ini juga mencerminkan perubahan pola konsumsi masyarakat yang cenderung lebih selektif dalam menggunakan kartu debit, terutama untuk transaksi yang bersifat non-rutin atau bernilai besar.

Kendati demikian, dari sisi nominal, transaksi kartu debit justru mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Total nilai transaksi tercatat sebesar Rp22,54 triliun, meningkat sebesar 11% (yoy). Peningkatan nominal ini menunjukkan bahwa meskipun frekuensi penggunaan menurun, nilai per transaksi yang dilakukan cenderung lebih besar. Dengan demikian, kartu debit tetap mempertahankan perannya sebagai instrumen pembayaran utama untuk transaksi yang bernilai tinggi, seperti pembayaran tagihan, konsumsi rumah tangga, dan kebutuhan lainnya yang bersifat periodik.

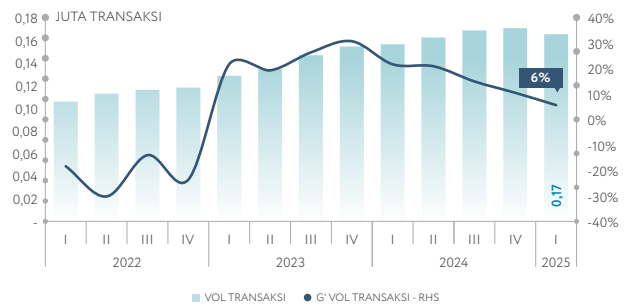
Perkembangan kartu kredit di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada triwulan I 2025 menunjukkan peningkatan dari sisi kepemilikan. Jumlah kartu kredit yang beredar mencapai hampir 17 juta kartu, melanjutkan tren pertumbuhan sejak tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan semakin luasnya akses masyarakat terhadap instrumen pembayaran berbasis kredit serta meningkatnya kepercayaan terhadap penggunaan kartu kredit sebagai sarana pembayaran yang fleksibel dan efisien. Pertumbuhan ini juga menjadi indikator keberhasilan edukasi keuangan dan perluasan layanan perbankan di wilayah NTB, khususnya di segmen konsumsi rumah tangga menengah ke atas.

Grafik 5.20 Jumlah Kartu kredit



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.21 Perkembangan Volume Transaksi Kartu Kredit

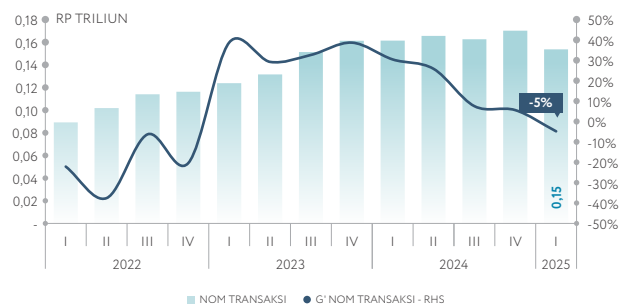


Sumber : Bank Indonesia

Namun demikian, peningkatan jumlah kartu tidak secara langsung diikuti oleh pertumbuhan volume transaksi. Grafik menunjukkan bahwa volume transaksi kartu kredit tercatat sebesar 19,74 juta kali, namun mengalami kontraksi sebesar -3% (yoy). Penurunan ini menandakan adanya pergeseran perilaku masyarakat, yang kini lebih selektif dalam menggunakan kartu kredit. Hal ini dapat disebabkan oleh meningkatnya kesadaran pengelolaan utang, serta beralihnya sebagian transaksi harian ke kanal pembayaran digital lain seperti QRIS dan dompet elektronik. Meskipun demikian, kartu kredit masih tetap digunakan untuk transaksi yang bersifat terencana atau bernilai besar seperti pembelian barang elektronik, tiket perjalanan, atau pembayaran pendidikan.

Di sisi lain, dari segi nominal transaksi, kartu kredit justru mencatatkan pertumbuhan positif yang signifikan. Nilai transaksi mencapai Rp22,54 triliun, meningkat sebesar 11% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun frekuensi penggunaan menurun, kartu kredit tetap menjadi pilihan utama untuk transaksi bernilai tinggi seperti pembelian barang elektronik, perjalanan, dan konsumsi non-rutin. Peningkatan nilai transaksi ini mengindikasikan bahwa kartu kredit masih memainkan peran penting dalam mendukung konsumsi rumah tangga dan belanja sektor tersier. Dengan demikian, kartu kredit tetap menjadi komponen strategis dalam sistem pembayaran nasional di NTB, terutama pada segmen pengguna yang lebih matang secara finansial.

Grafik 5.22 Perkembangan Nominal Transaksi Kartu Kredit



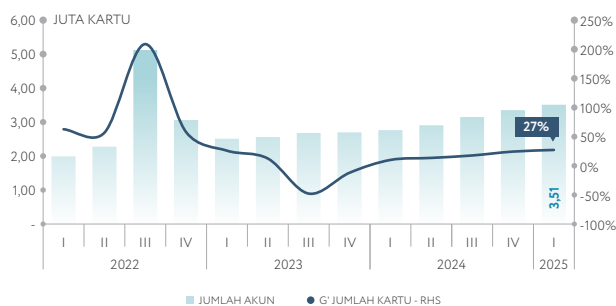
Sumber : Bank Indonesia

Pertumbuhan penggunaan uang elektronik di Provinsi NTB terus menunjukkan kinerja yang positif, baik dari sisi kepemilikan akun maupun aktivitas transaksional. Jumlah akun uang elektronik pada triwulan I 2025 tercatat mencapai 3,51 juta akun, tumbuh 27% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini menandakan semakin luasnya akseptansi masyarakat terhadap instrumen pembayaran digital yang bersifat praktis, aman, dan efisien, terutama untuk kebutuhan transaksi harian. Pertumbuhan yang konsisten ini juga mencerminkan keberhasilan program literasi keuangan dan digitalisasi pembayaran yang dilakukan oleh otoritas bersama pelaku industri.

Sejalan dengan itu, volume transaksi uang elektronik juga mencatatkan pertumbuhan yang kuat. Pada triwulan I 2025, volume transaksi mencapai 6,29 juta kali, atau meningkat 20% (yoy). Lonjakan ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat dalam menggunakan UE untuk berbagai kebutuhan konsumsi, mulai dari belanja ritel, transportasi, hingga pembayaran tagihan. Uang elektronik semakin menjadi pilihan utama dalam mendukung transaksi bernilai kecil hingga menengah, menggantikan sebagian fungsi pembayaran tunai. Ketersediaan infrastruktur digital yang semakin merata, khususnya melalui kanal mobile dan QRIS, turut mendorong peningkatan volume transaksi ini secara signifikan.

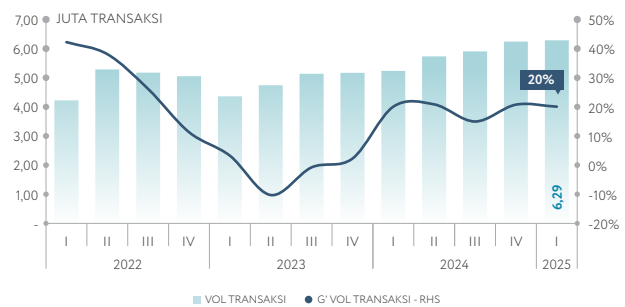
Dari sisi nominal, transaksi uang elektronik juga mengalami pertumbuhan. Nilai transaksi pada triwulan I 2025 tercatat sebesar Rp0,73 triliun, atau meningkat 7% (yoy). Meskipun pertumbuhannya tidak setinggi volume, hal ini tetap menunjukkan penguatan peran uang elektronik sebagai instrumen pembayaran yang relevan dan inklusif, terutama dalam mendukung transaksi mikro dan keseharian masyarakat. Stabilitasnya nominal transaksi juga mengindikasikan bahwa uang elektronik telah digunakan secara konsisten dan terukur, tanpa gejolak yang berarti dalam pola konsumsi. Secara keseluruhan, perkembangan ini mempertegas kontribusi uang elektronik dalam memperluas akses keuangan digital dan mempercepat transformasi sistem pembayaran di NTB.

Grafik 5.23 Jumlah Akun UE



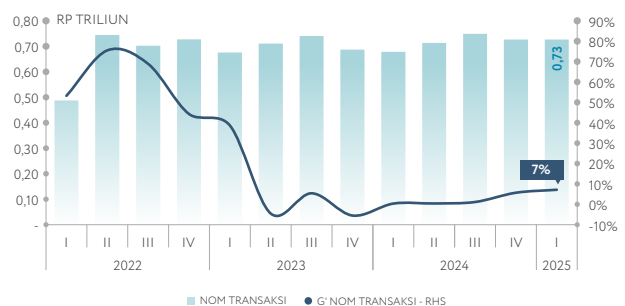
Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.24 Perkembangan Volume UE



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.25 Perkembangan Nominal Transaksi UE



Sumber : Bank Indonesia

5.2.4 Perkembangan Elektronifikasi dan Keuangan Inklusif

Implementasi elektronifikasi transaksi di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) merupakan salah satu upaya strategis untuk mendukung penguatan tata kelola keuangan yang transparan, efisien, dan akuntabel. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat secara aktif berkolaborasi dengan seluruh Pemda, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, melalui wadah Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). TP2DD berperan sebagai satuan tugas yang bertanggung jawab dalam mendorong percepatan dan perluasan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Indeks ETPD menjadi alat pemantauan penting untuk menilai sejauh mana digitalisasi telah diterapkan dalam proses transaksi keuangan daerah.

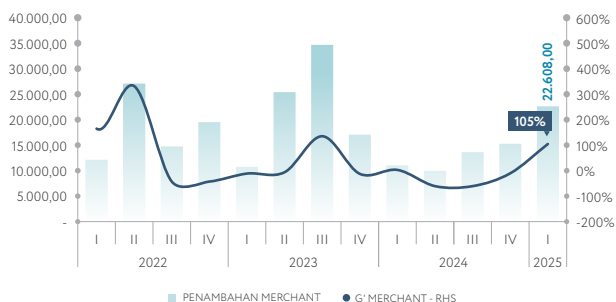
Hingga triwulan laporan berjalan, tercatat sebanyak 10 (sepuluh) Pemerintah Daerah di Provinsi NTB telah terindeks digital, jumlah yang stabil dibandingkan semester I tahun 2024. Ke-10 Pemda tersebut terdiri dari Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Kota Mataram, Pemerintah Kota Bima, serta tujuh pemerintah kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Bima, Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Tengah, Sumbawa, dan Sumbawa Barat. Capaian ini mencerminkan komitmen kuat dari para Pemda dalam menjalankan agenda digitalisasi, sekaligus menunjukkan kesiapan infrastruktur dan dukungan kelembagaan yang terus diperkuat.

Dalam pelaksanaannya, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB terus mendorong optimalisasi pemanfaatan instrumen pembayaran nontunai dalam berbagai transaksi keuangan Pemda, khususnya untuk meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan daerah seperti pajak dan retribusi. Upaya ini sejalan dengan tujuan utama ETPD, yaitu menciptakan sistem pembayaran yang lebih modern, transparan, serta mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Selain itu, perluasan pemanfaatan kanal pembayaran digital berbasis Person to Government (P2G) diharapkan dapat memperluas inklusi keuangan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sebagai bagian dari perluasan elektronifikasi, salah satu instrumen yang turut didorong dalam ekosistem pembayaran daerah adalah Kartu Kredit Indonesia (KKI). KKI merupakan bentuk dukungan terhadap Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI) serta program afirmatif Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Tujuan utama dari implementasi KKI adalah mendorong kemandirian nasional dalam sistem pembayaran, menjamin kedaulatan data transaksi pemerintah, serta meningkatkan efisiensi biaya dan akseptasi di kalangan pelaku usaha, terutama UMKM. Di Provinsi NTB, KKI fisik telah diterbitkan oleh PT BPD NTB Syariah melalui skema co-branding dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan saat ini telah diimplementasikan oleh tiga Pemda, yaitu Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kota Mataram.

Di samping itu, tiga Pemda lainnya yakni, Provinsi NTB, Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten Lombok Barat telah menjalin kerja sama melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT BPD NTB Syariah sebagai bentuk komitmen terhadap adopsi KKI. Sampai dengan triwulan-I 2025, transaksi menggunakan KKI fisik tercatat sebesar Rp144,7 juta, menunjukkan awal yang positif dalam digitalisasi belanja pemerintah. Ke depan, pengembangan fitur KKI melalui kanal QRIS dan online payment diharapkan dapat memperluas jangkauan dan efektivitas penggunaannya. Inisiatif ini tidak hanya memperkuat elektronifikasi belanja pemerintah, tetapi juga menjadi penggerak transaksi yang akuntabel.

Grafik 5.26 Perkembangan Jumlah Merchant QRIS



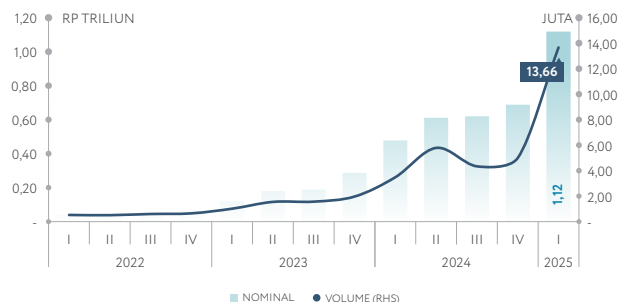
Sumber : Bank Indonesia

Salah satu *success story* implementasi digitalisasi transaksi pemerintah di Provinsi NTB adalah Elektronifikasi Parkir Tepi Jalan di Kota Mataram. Atas inisiasi Bank Indonesia, Dinas Perhubungan Kota Mataram meluncurkan aplikasi SIJUKIR sebagai inovasi dalam proses penerimaan retribusi parkir melalui penggunaan QRIS. Melalui aplikasi ini, Dinas Perhubungan selaku SKPD pengampu dapat melakukan pemantauan penerimaan retribusi dari setiap Juru Parkir dan Titik Parkir secara *real time*. Lebih lanjut, aplikasi tersebut juga digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi kinerja dari setiap Juru Parkir yang tercermin dari realisasi setoran, serta kolom pengaduan per lokasi parkir yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pertumbuhan ekosistem QRIS di Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan kinerja positif pada triwulan I 2025. Jumlah penambahan merchant QRIS mencapai 22.608 merchant, disertai dengan pertumbuhan tahunan sebesar 105% (yoy) sehingga total merchant mencapai 363.016 merchant. Pencapaian ini mengindikasikan keberhasilan berbagai inisiatif perluasan akseptansi QRIS, baik dari sisi sosialisasi, kemudahan registrasi, hingga kolaborasi dengan Pemda, perbankan, dan penyelenggara jasa pembayaran. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, tren pertumbuhan merchant yang positif ini mencerminkan pulihnya minat pelaku usaha, termasuk UMKM, untuk mengadopsi sistem pembayaran digital demi memperluas akses pasar dan meningkatkan efisiensi layanan. Tren ini juga menandakan bahwa digitalisasi ekonomi daerah melalui QRIS telah semakin diterima sebagai bagian dari kebiasaan baru dalam bertransaksi.

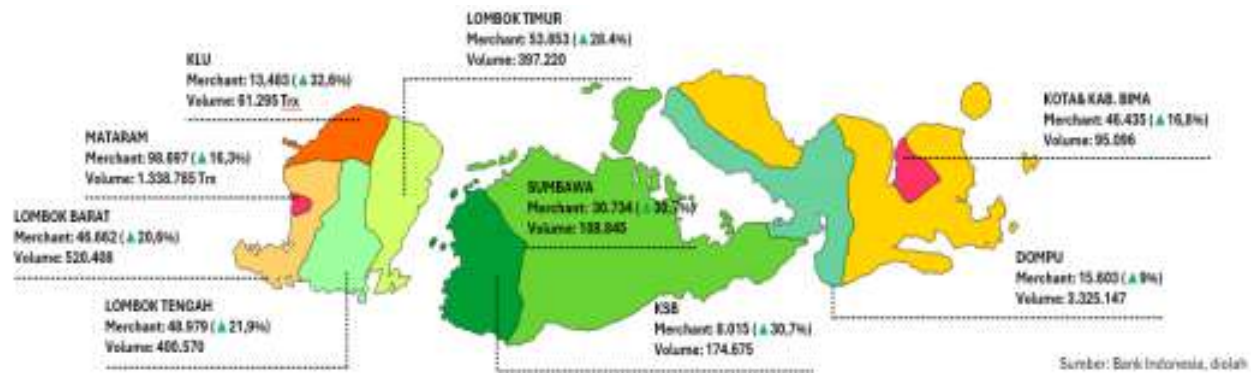
Sejalan dengan peningkatan jumlah merchant, kinerja transaksi QRIS di NTB juga mengalami lonjakan signifikan. Total nominal transaksi pada triwulan I 2025 tercatat sebesar Rp1,12 triliun, sementara volume transaksi mencapai 13,66 juta kali. Angka ini menunjukkan peningkatan tajam baik dari sisi frekuensi maupun nilai transaksi, mencerminkan semakin luasnya penggunaan QRIS oleh masyarakat dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Perkembangan ini tidak hanya menegaskan efektivitas strategi perluasan akseptansi QRIS, tetapi juga menggambarkan peningkatan literasi dan inklusi keuangan digital di NTB. Peningkatan transaksi ini semakin memperkuat peran QRIS sebagai salah satu pendorong utama transformasi digital sistem

Grafik 5.27 Perkembangan Transaksi QRIS di Provinsi NTB



Sumber : Bank Indonesia

Gambar 5.1 Perkembangan QRIS Spasial



Sumber : Bank Indonesia

pembayaran di daerah, sekaligus mendukung upaya pemulihan dan pertumbuhan ekonomi secara inklusif.

Secara spasial, persebaran *merchant* QRIS di Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan pemerataan yang semakin baik, meskipun masih terdapat perbedaan tingkat penetrasi antarwilayah. Kota Mataram mencatat jumlah *merchant* tertinggi sebanyak 98.697 atau tumbuh 16,3% (yoy), sekaligus menyumbang volume transaksi terbesar yaitu 1,34 juta transaksi. Tingginya angka ini mencerminkan peran Mataram sebagai pusat ekonomi dan perdagangan di NTB, di mana adopsi QRIS telah menjadi bagian integral dari aktivitas pelaku usaha dan masyarakat. Sementara itu, kabupaten lain di Pulau Lombok juga mencatat pertumbuhan positif, seperti Lombok Tengah dengan 48.979 merchant (+21,9%), Lombok Barat sebanyak 46.662 merchant (+20,6%), dan Lombok Timur dengan 53.853 merchant (+28,4%). Kabupaten Lombok Utara turut mengalami peningkatan meskipun dalam skala lebih kecil, yakni 13.483 merchant dengan pertumbuhan 32,6%, menunjukkan potensi besar wilayah wisata ini dalam pengembangan digitalisasi pembayaran.

Di Pulau Sumbawa, Kabupaten Sumbawa menunjukkan capaian yang sangat menjanjikan dengan 30.734 merchant dan pertumbuhan tahunan mencapai 30,7%, diikuti oleh Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dengan 8.015 merchant (+30,7%). Peningkatan yang cukup tinggi juga tercatat di Dompu, meskipun hanya tumbuh 9%, namun mencatat volume transaksi yang sangat besar yakni 3,3 juta transaksi, tertinggi kedua setelah Mataram. Hal ini menunjukkan bahwa adopsi QRIS di Dompu lebih banyak digunakan untuk transaksi bernilai besar atau frekuensi tinggi oleh merchant yang sudah aktif. Sementara itu, wilayah Kota dan Kabupaten Bima memiliki 46.435 merchant dengan pertumbuhan 16,8%, namun volume transaksi masih relatif rendah di angka 95 ribu transaksi. Secara keseluruhan, perkembangan spasial QRIS di NTB mencerminkan kemajuan nyata dalam perluasan digitalisasi ekonomi di tingkat lokal, namun juga menandakan perlunya pendekatan yang lebih

kontekstual untuk mendorong pemanfaatan secara merata dan inklusif.

Dalam rangka mendorong perluasan akseptasi dan pemanfaatan QRIS secara menyeluruh di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB telah melaksanakan berbagai kegiatan yang bersifat edukatif dan partisipatif, dengan pendekatan yang menjangkau beragam lapisan masyarakat. Strategi perluasan ini dibangun atas tiga pilar utama, yakni: (1) QRIS Sosial Keagamaan, yang menargetkan penggunaan QRIS di rumah ibadah dan kegiatan sosial keagamaan; (2) Lifestyle QRIS, yang ditujukan untuk memperluas adopsi QRIS di kalangan Milenial dan Gen Z melalui pendekatan gaya hidup; serta (3) QRIS Event Intervention, sebagai intervensi partisipatif pada berbagai kegiatan masyarakat yang berskala luas. Ketiga pilar ini dirancang untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan relevan dengan konteks sosial dan budaya masyarakat NTB.

Selama Triwulan I 2025, sejumlah kegiatan konkret telah dilaksanakan sebagai bagian dari implementasi strategi tersebut. Kegiatan kampanye penggunaan QRIS dilakukan dalam berbagai event publik seperti Pemilihan Puteri Mandalika, Khazanah Ramadhan, dan Kampoeng Ramadhan, yang menjadi media efektif untuk menjangkau kalangan muda dan pelaku UMKM lokal. Di samping itu, sosialisasi dan edukasi disertai pengalaman langsung penggunaan QRIS (user experience) juga dilakukan dalam Operasi Pasar, yang secara strategis menjangkau masyarakat umum di sektor perdagangan tradisional. Tak hanya itu, kegiatan Jumat Berkah Bersama QRIS dan partisipasi aktif dalam Car Free Day di berbagai kabupaten/kota turut menjadi sarana pendekatan yang lebih kasual namun berdampak luas, dalam memperkenalkan QRIS sebagai alat pembayaran yang mudah, cepat, dan aman. Rangkaian kegiatan ini membuktikan komitmen kuat Bank Indonesia dalam membangun budaya transaksi digital yang inklusif dan berkelanjutan di NTB.

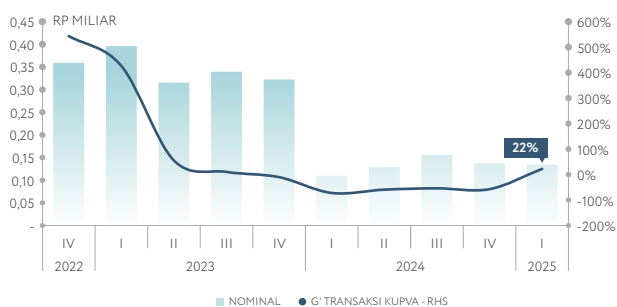
5.3 Transaksi KUPVA BB dan PJP LR

Dalam rangka menciptakan ekosistem transaksi valuta asing yang aman dan terpercaya, Bank Indonesia menetapkan ketentuan yang mengatur perizinan dan pengawasan terhadap Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB). Ketentuan ini tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia No. 18/20/PBI/2016 dan Surat Edaran No. 18/42/DKSP, yang mengatur secara komprehensif mulai dari tata cara perizinan hingga pelaporan dan prinsip kehati-hatian dalam operasional. Melalui regulasi ini, Bank Indonesia berupaya menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi konsumen, dan mencegah praktik ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Pentingnya pengawasan terhadap KUPVA BB di tengah meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara dan aktivitas usaha lintas negara di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Merespons dinamika tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB terus memperkuat pengawasan terhadap KUPVA BB untuk memastikan seluruh kegiatan penukaran valuta asing berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan ini dilakukan melalui inspeksi lapangan, pemantauan transaksi, serta koordinasi dengan aparat dan lembaga terkait. Tidak hanya sebagai bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat, langkah ini juga mendukung terciptanya iklim usaha yang sehat dan berintegritas.

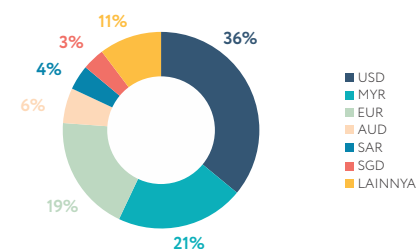
Sebagai pelengkap dari fungsi pengawasan, Bank Indonesia juga secara aktif melakukan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya menggunakan layanan penukaran valuta asing yang legal dan berizin. Edukasi ini menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran kolektif serta memperkuat literasi keuangan masyarakat, sehingga mereka dapat melakukan transaksi valuta asing secara aman dan sesuai ketentuan. Melalui sinergi antara pengawasan yang ketat dan edukasi yang berkelanjutan, kegiatan penukaran valuta asing di Provinsi NTB diharapkan tidak hanya tumbuh secara sehat, tetapi juga mampu menjadi penopang yang andal bagi sektor pariwisata dan perdagangan internasional yang terus berkembang di wilayah ini.

Grafik 5.28 Perkembangan Transaksi KUPVA BB



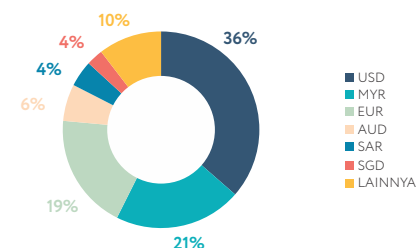
Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.29 Pangsa Transaksi Beli KUPVA BB



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 5.30 Pangsa Transaksi Jual KUPVA BB



Sumber : Bank Indonesia

Pada triwulan I 2025, aktivitas transaksi pada Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) di Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan pemulihan yang cukup kuat setelah mengalami perlambatan sepanjang tahun sebelumnya. Total nilai transaksi tercatat mencapai Rp40,3 miliar, mengalami pertumbuhan tahunan sebesar 22% (yoy) (Grafik 5.27). Capaian ini mencerminkan peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap valuta asing, baik untuk keperluan perjalanan ke luar negeri, remitansi pekerja migran, maupun transaksi dagang dan keperluan pribadi lainnya. Pemulihan ini juga tidak terlepas dari membaiknya mobilitas masyarakat pasca-pandemi, peningkatan jumlah wisatawan asing yang masuk, serta stabilitas nilai tukar yang mendorong keyakinan publik dalam melakukan transaksi valas. Secara umum, perkembangan ini menunjukkan bahwa sektor penukaran valuta asing mulai kembali menjadi salah satu indikator penting pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat di NTB.

Dari sisi struktur mata uang yang ditransaksikan, Dolar Amerika Serikat (USD) masih menjadi mata uang yang paling banyak dibeli dengan pangsa sebesar 36%, menegaskan dominasi USD sebagai alat tukar internasional, terutama untuk remitansi dan kebutuhan usaha. Di posisi selanjutnya terdapat Ringgit Malaysia (MYR) dengan kontribusi sebesar 21%, yang merefleksikan eratnya koneksi sosial-ekonomi antara NTB dan Malaysia, termasuk keberadaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB di negara tersebut. Euro (EUR) juga menunjukkan

kontribusi yang cukup tinggi sebesar 19%, mengindikasikan adanya peningkatan interaksi dengan negara-negara Eropa, baik dari sisi wisatawan maupun aktivitas ekspor-impor. Sementara itu, Dolar Australia (AUD), Riyal Arab Saudi (SAR), dan Dolar Singapura (SGD) masing-masing menyumbang pangsa lebih kecil, dengan sisanya masuk dalam kategori “lainnya” sebesar 11%. Komposisi ini menunjukkan semakin beragamnya kebutuhan masyarakat NTB terhadap mata uang asing, sejalan dengan makin luasnya cakupan hubungan internasional, baik untuk keperluan bisnis, pendidikan, ibadah, maupun keluarga.

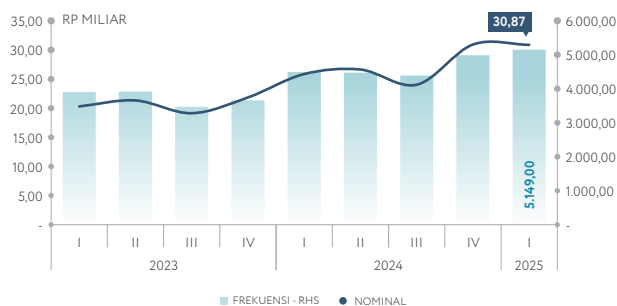
Pola yang relatif serupa juga tampak pada struktur transaksi penjualan valuta asing oleh masyarakat kepada KUPVA BB. USD tetap mendominasi dengan pangsa 36%, diikuti oleh MYR dan EUR masing-masing sebesar 21% dan 19%, mencerminkan stabilitas permintaan dan penawaran terhadap ketiga mata uang utama tersebut. Menariknya, pangsa Dolar Singapura (SGD) pada sisi penjualan meningkat menjadi 10%, lebih tinggi dibandingkan sisi pembelian yang hanya 3%. Hal ini mengindikasikan kemungkinan adanya akumulasi sisa valas dari aktivitas wisata atau perdagangan luar negeri yang kemudian dikonversi kembali ke rupiah. Pangsa AUD dan SAR masing-masing tercatat sebesar 6% dan 4%, sementara kategori lainnya menurun menjadi 4%. Keseimbangan antara struktur beli dan jual ini menandakan bahwa ekosistem penukaran valuta asing di NTB telah berfungsi cukup efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta menunjukkan bahwa KUPVA BB tetap menjadi saluran utama dalam fasilitasi transaksi valas secara legal, aman, dan transparan.

Seperti halnya pengawasan terhadap KUPVA BB, Bank Indonesia juga secara aktif menjalankan fungsi perizinan dan pengawasan terhadap Penyelenggara Jasa Pembayaran untuk Layanan Remitansi (PJP LR). PJP LR merupakan entitas yang berwenang melakukan pengiriman dana atas perintah nasabah, termasuk dalam bentuk remitansi dari luar negeri. Kegiatan ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.14/23/PBI/2021

tentang Transfer Dana, serta diperkuat oleh Surat Edaran Bank Indonesia No.15/23/DASP dan No.16/1/DKSP, yang mengatur penyelenggaraan serta pelaporan kegiatan transfer dana oleh badan usaha berbadan hukum Indonesia yang bukan bank. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, hingga saat ini terdapat satu perusahaan PJP LR berizin.

Sebagian besar transaksi yang dilakukan oleh penyelenggara tersebut merupakan transaksi *incoming*, yakni pengiriman dana dari luar negeri ke dalam negeri, yang umumnya berasal dari Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya yang bekerja di Hongkong. Tren ini mencerminkan pentingnya remitansi sebagai salah satu sumber pendapatan bagi rumah tangga di NTB. Memasuki triwulan I 2025, nilai transaksi remitansi tercatat tetap tinggi di kisaran Rp30,87 miliar, relatif stabil dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai Rp30,93 miliar. Selain itu, jumlah transaksi mengalami kenaikan dari 4.985 menjadi 5.149 transaksi, menandakan meningkatnya akses dan frekuensi pengiriman dana oleh PMI. Stabilitas nominal transaksi serta peningkatan volume pengiriman menunjukkan bahwa peran remitansi terhadap perekonomian daerah tetap signifikan, terutama dalam memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga penerima.

Grafik 5.31 Perkembangan Transaksi PJP LR



Sumber : Bank Indonesia





06

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

- Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) Nusa Tenggara Barat (NTB) menurun dari 3,30% pada Februari 2024 menjadi 3,22% pada Februari 2025 yang dikontribusikan oleh penurunan TPT Perkotaan sebesar -0,46% (ptp).
- Sejalan dengan itu, tingkat kemiskinan di Provinsi NTB mengalami penurunan yang dikontribusi oleh penurunan tingkat kemiskinan di daerah perkotaan dan pedesaan. Tingkat kemiskinan di Provinsi NTB mengalami penurunan dari 12,91% pada Maret 2024 menjadi 11,91% pada September 2024.
- Nilai Tukar Petani pada Maret 2025 meningkat 1,68 (ptp) dari Desember 2024, didorong oleh kenaikan indeks yang diterima petani (it) dan indeks yang dibayar petani (lb). Secara sektoral, peningkatan tersebut didorong oleh kenaikan tanaman hortikultura hingga 38,77 (ptp).

6.1 Ketenagakerjaan

Tabel 6.1 Kondisi Ketenagakerjaan Provinsi NTB (ribu orang)

KEGIATAN	2022		2023		2024		2025
	FEB	AGS	FEB	AGS	FEB	AGS	FEB
Penduduk Usia Kerja	3959,15	3946,55	4028,85	4059,60	4097,07	4133,78	4170,86
Angkatan Kerja	2781,38	2799,18	2867,12	2976,23	3030,47	3192,56	3190,74
Bekerja	2672,31	2718,35	2760,32	2892,98	2930,31	3105,55	3088,11
Pengangguran	109,08	80,83	106,80	83,24	100,15	87,01	102,63
Bukan Angkatan Kerja	1177,77	1147,37	1161,73	1083,38	1066,60	941,22	980,12
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) %	70,25	70,93	71,16	73,31	73,97	77,23	76,50
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) %	3,92	2,89	3,73	2,80	3,30	2,73	3,22
Perkotaan	4,51	3,52	4,71	3,27	4,56	2,91	4,10
Perdesaan	3,41	2,28	2,82	2,32	1,95	2,53	2,21

Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Kondisi ketenagakerjaan NTB menunjukkan perbaikan pada Februari 2025. Perbaikan kondisi ketenagakerjaan NTB tercermin dari pertumbuhan penduduk bekerja yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pengangguran. Lebih lanjut, perbaikan kondisi ketenagakerjaan NTB juga tercermin dari penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang didorong oleh penurunan signifikan TPT daerah perkotaan.

6.1.1. Angkatan Kerja

Pada Februari 2025, jumlah penduduk usia kerja di NTB sebanyak 4,17 juta orang, meningkat 0,07 juta orang dibandingkan Februari tahun sebelumnya (Tabel 6. 1). Peningkatan jumlah penduduk usia kerja dikontribusi oleh kenaikan jumlah angkatan kerja sebesar 5,29% (yoy) dan penurunan bukan angkatan kerja sebesar -8,11% (yoy). Hal tersebut mengindikasikan peningkatan penduduk usia produktif yang aktif secara ekonomi. Lebih lanjut, kenaikan angkatan kerja dikontribusi oleh pertumbuhan jumlah bekerja (5,39%, yoy) yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pengangguran (2,48%,yoy) pada periode laporan.

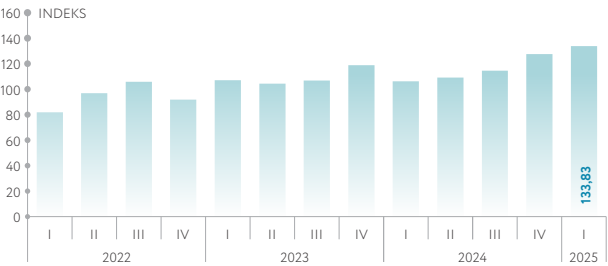
Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) mengalami kenaikan 2,53%(ptp) dan tercatat sebesar 76,50% pada Februari 2025. Hal tersebut sejalan dengan indikator ketenagakerjaan triwulan I 2025 yang menunjukkan peningkatan. Indeks ketersediaan

lapangan kerja terus berada pada level optimis (di atas 100) sejak tahun 2023 (Gambar 6. 1). Indeks ketersediaan lapangan kerja pada triwulan I 2024 berada pada level 133,83 lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 127,50. Sejalan dengan itu, indeks penghasilan mengalami peningkatan dari 157,33 pada triwulan IV 2024 menjadi 159,00 pada triwulan laporan (Gambar 6. 2). Hal tersebut sejalan dengan peningkatan upah minimum provinsi NTB sebesar 6,50% (yoy) dan menjadi Rp2.602.931 pada tahun 2025.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) NTB mengalami penurunan pada Februari 2025. Berdasarkan data Sakernas, TPT pada periode laporan sebesar 3,22% atau menurun 0,08% (ptp) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (Tabel 6. 1). Penurunan tersebut didorong oleh penurunan TPT di perkotaan dari 4,56% pada Februari 2024 menjadi 4,10% pada periode laporan. Adapun TPT perdesaan sedikit mengalami peningkatan (0,26%, ptp) dari 1,95% pada Februari 2024 menjadi 2,21% pada periode laporan.

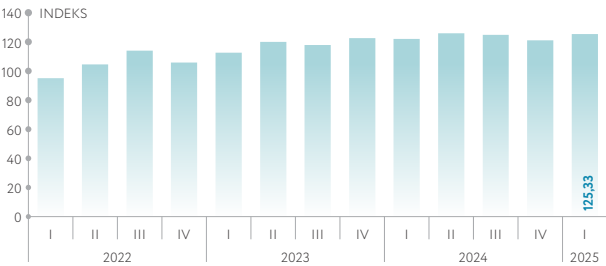
Peningkatan kinerja ketenagakerjaan diperkirakan terus berlanjut hingga pertengahan tahun 2025. Indeks perkiraan ketersediaan lapangan kerja (Gambar 6. 3) dan perkiraan penghasilan 6 bulan mendatang mengalami peningkatan (Gambar 6. 4). Optimisme kondisi ketenagakerjaan juga terkonfirmasi dari saldo bersih tertimbang (SBT) penggunaan

Grafik 6. 1 Indeks Ketersediaan Tenaga Kerja



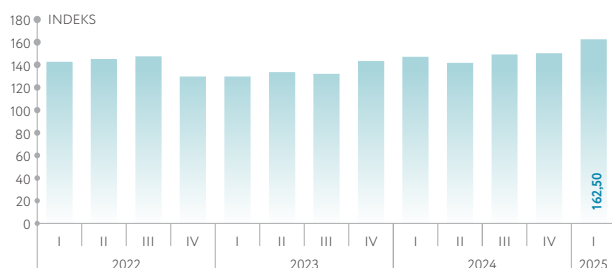
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 6. 2 Indeks Penghasilan



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 6.3 Indeks Perkiraan Ketersediaan Lapangan Kerja



Sumber: Bank Indonesia, diolah

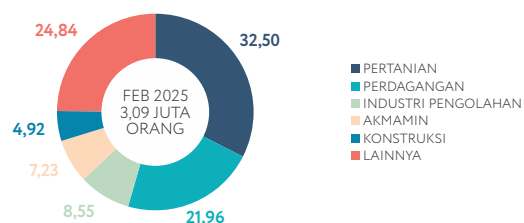
tenaga kerja Survei Kegiatan Dunia Usaha pada triwulan II 2025 yang diprakirakan sebesar 40,19%, meningkat dibandingkan realisasi triwulan laporan sebesar 29,08%.

6.1.2 Penduduk Bekerja

Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), jumlah penduduk bekerja NTB sebanyak 3,09 juta orang pada Februari 2025. Pertanian kembali menjadi lapangan usaha (LU) dengan pangsa penyerapan tenaga kerja (32,50%, Februari 2025) dan pangsa PDRB (23,34%, triwulan I 2025) terbesar di NTB. Jumlah tenaga kerja di LU Pertanian tumbuh mencapai 4,55% (yoy) pada Agustus 2024 (Gambar 6. 5). Peningkatan tersebut sejalan dengan momentum masa panen raya tanaman pangan (padi dan jagung).

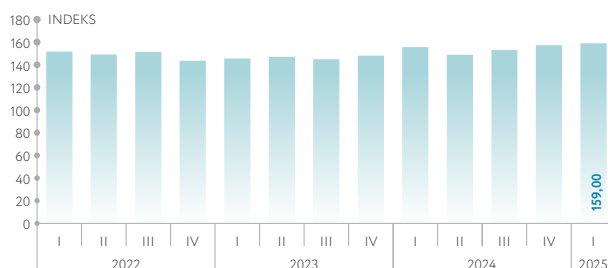
Lebih lanjut, sektor dengan pangsa penyerapan tenaga kerja terbesar kedua adalah LU Perdagangan (21,96%). Pada Februari 2025, tenaga kerja LU Perdagangan mengalami pertumbuhan paling tinggi yakni 12,62% (yoy). Adapun LU Pertambangan yang memiliki pangsa PDRB terbesar kedua (16,00%, triwulan I 2025) setelah pertanian, hanya memiliki pangsa terhadap jumlah penduduk bekerja di NTB sebesar 1,29% pada Februari 2025. Jumlah tenaga kerja LU Pertambangan mengalami penurunan 8,11 ribu orang seiring penurunan target produksi pertambangan tembaga pada tahun 2025. Lebih lanjut, penurunan tersebut tercermin dari penurunan kinerja LU Pertambangan menjadi kontraksi -30,14% (yoy) pada triwulan I 2025.

Grafik 6.5 Pangsa Tenaga Kerja Berdasarkan Lapangan Usaha



Sumber: Sakernas, diolah

Grafik 6.4 Indeks Prakiraan Penghasilan

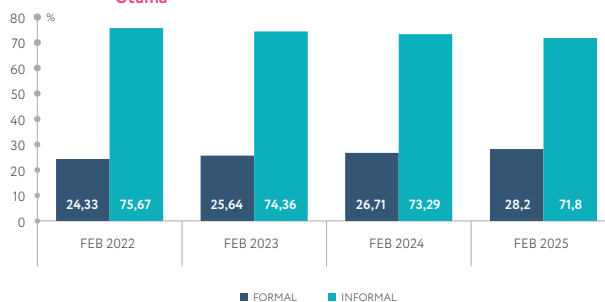


Sumber: Bank Indonesia, diolah

LU industri pengolahan yang padat karya menjadi sektor dengan pangsa penyerapan tenaga kerja tertinggi selanjutnya. Pada Februari 2025, pangsa Industri Pengolahan sebesar 8,55% terhadap seluruh penduduk bekerja di NTB. Pangsa tersebut mengalami penurunan 0,66% (ptp) atau terkontraksi -2,17% (yoy) dibandingkan Februari tahun sebelumnya seiring penurunan kinerja subsektor pengolahan tembakau. Meski demikian, prospek penyerapan tenaga kerja LU Industri Pengolahan diprakirakan akan lebih baik seiring mulai beroperasinya proyek hilirisasi tembaga (*smelter*). Hal tersebut terkonfirmasi dari SBT Penggunaan Tenaga Kerja SKDU LU Industri Pengolahan pada triwulan II 2025 yang diprakirakan sebesar 0,69%, lebih tinggi dari realisasi triwulan sebelumnya yang sebesar 0,34%.

Berdasarkan kegiatan utama, penduduk bekerja di NTB masih didominasi oleh pekerja informal. Meski demikian, pangsa pekerja formal mengalami peningkatan 1,49% (ptp) sehingga menjadi 28,20% pada Februari 2025 (Gambar 6.6). Peningkatan pangsa sektor formal seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang bekerja di sektor formal (11,26%, yoy) yang lebih cepat dibandingkan sektor informal (3,24%, yoy) pada Februari 2025. Peningkatan penduduk yang bekerja di sektor formal sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk yang memiliki status pekerjaan utama sebagai buruh/karyawan/pegawai dan berusaha dibantu buruh tetap/dibayar. Kedua komponen status pekerjaan sektor formal tersebut masing-masing tumbuh positif sebesar 11,80% (yoy) dan 8,51% (yoy) pada Februari 2025 (Gambar 6. 7). Perbaiki kinerja sektor formal tersebut

Grafik 6.6 Perkembangan Pangsa Tenaga Kerja Berdasarkan Kegiatan Utama



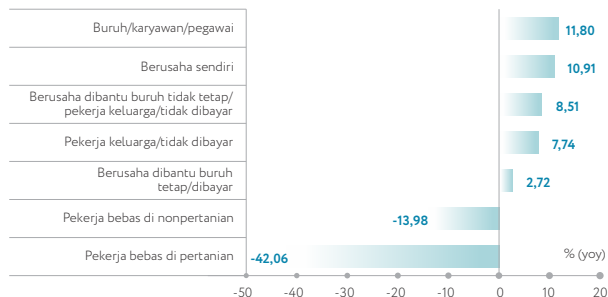
Sumber: Sakernas, diolah

mengkonfirmasi perbaikan kinerja ketenagakerjaan NTB pada Februari 2025.

Perbaikan kinerja ketenagakerjaan juga tercermin dari jumlah penduduk bekerja dengan pendidikan tertinggi Diploma/Universitas tumbuh lebih cepat dibandingkan SMP ke bawah. Hal tersebut menunjukkan lapangan kerja untuk *high skill labour* yang mengalami peningkatan. Pada Februari 2025, penduduk bekerja dengan ijazah Diploma/Universitas tumbuh 25,87% (yoy) (Gambar 6. 8). Adapun penduduk dengan ijazah SMP dan SD ke bawah tumbuh masing-masing sebesar 17,45% (yoy) dan -11,43% (yoy). Meski demikian, pekerja dengan ijazah SD ke bawah masih mendominasi komposisi penduduk bekerja sebesar 38,20%.

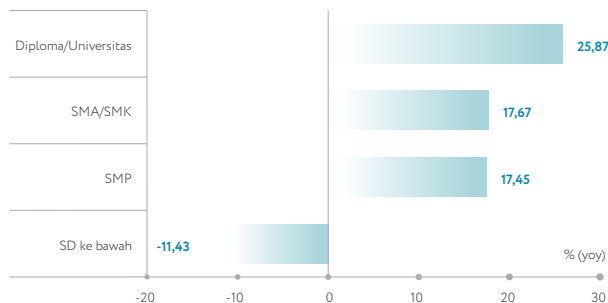
Lebih lanjut, pekerja dengan pendidikan tertinggi SMA/SMK berada di posisi kedua dengan pangsa sebesar 31,62% terhadap jumlah pekerja NTB. Berdasarkan data Sakernas, pekerja dengan pendidikan tertinggi SMA/SMK tumbuh mencapai 17,67% (yoy). Peningkatan didorong oleh perkembangan sektor pariwisata, terutama pengembangan DPSP Mandalika yang banyak menyerap lulusan SMA untuk bekerja di hotel, restoran, dan jasa pariwisata lainnya. Program wajib belajar 12 tahun dan pelatihan vokasi oleh pemerintah juga mendorong peningkatan signifikan jumlah pekerja lulusan SMA/SMK.

Grafik 6.7 Pertumbuhan Jumlah Penduduk Bekerja Berdasarkan Status Pekerjaan Utama (Februari 2025)



Sumber: Sakernas, diolah

Grafik 6.8 Pertumbuhan Jumlah Penduduk Bekerja Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Februari 2025)



Sumber: Sakernas, diolah

6.2 Kesejahteraan

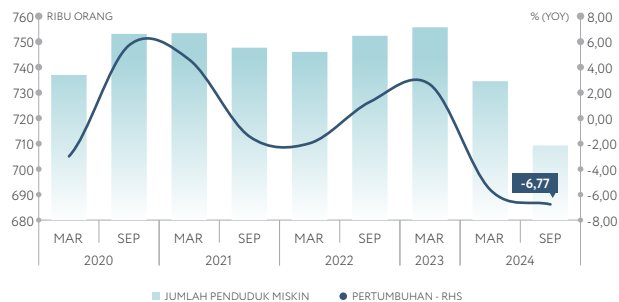
6.2.1. Jumlah Penduduk Miskin

Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami penurunan, baik dari jumlah, pertumbuhan, maupun rasio penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin turun dari 709,01 ribu orang pada Maret 2024 menjadi 658,60 ribu orang pada September 2024 atau terkontraksi -6,77% (yoy) (Gambar 6. 9). Dengan perkembangan itu, rasio penduduk miskin menjadi 11,91% dari total penduduk Provinsi NTB, menurun 1,00% (ptp) dibandingkan periode sebelumnya.

Penurunan kemiskinan di Provinsi NTB diktribusi oleh penurunan tingkat kemiskinan di daerah perkotaan dan pedesaan. Pada September 2024, tingkat kemiskinan di daerah pedesaan mengalami penurunan yang lebih dalam (Gambar 6. 10). Tingkat kemiskinan di daerah pedesaan pada September 2024 tercatat sebesar 11,64%, lebih rendah dari Maret 2024 yang mencapai 12,86% atau menurun 1,22% (ptp). Adapun tingkat kemiskinan di daerah perkotaan menurun -0,74% (ptp) dari 12,95% pada Maret 2024 menjadi 12,21% pada September 2024.

Sejalan dengan tingkat kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Provinsi NTB tercatat mengalami penurunan. Indeks P1 pada

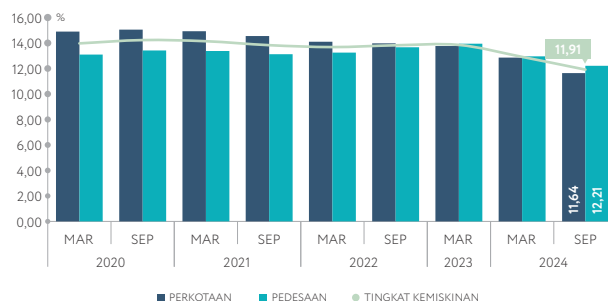
Grafik 6.9 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi NTB



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

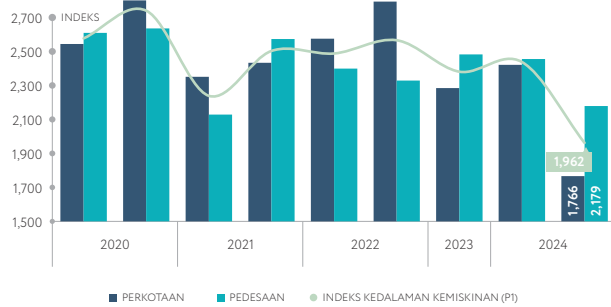
Catatan: Pertumbuhan yoy pada September 2024 menggunakan periode dasar Maret 2024 karena tidak ada rilis data pada September tahun sebelumnya.

Grafik 6.10 Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan



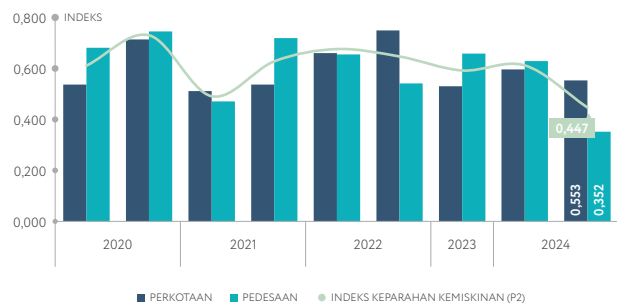
Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 6.11 Indeks Kedalaman Kemiskinan



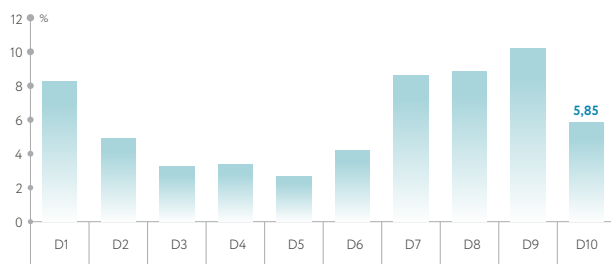
Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 6.12 Indeks Keparahan Kemiskinan



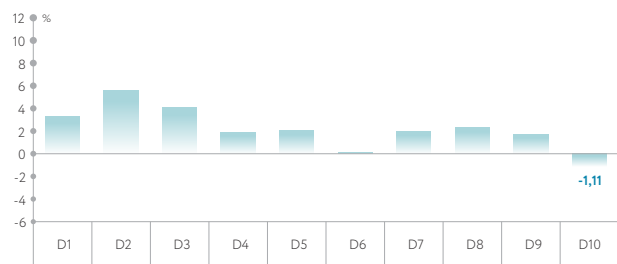
Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 6.13 Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita di Wilayah Perkotaan



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 6.14 Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita di Wilayah Pedesaan



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

September 2024 tercatat 1,962%, lebih rendah dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 2,438% (Gambar 6. 11). Peningkatan Indeks P1 menunjukkan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran masyarakat miskin di Provinsi NTB terhadap garis kemiskinan mengalami penurunan, utamanya di daerah perkotaan.

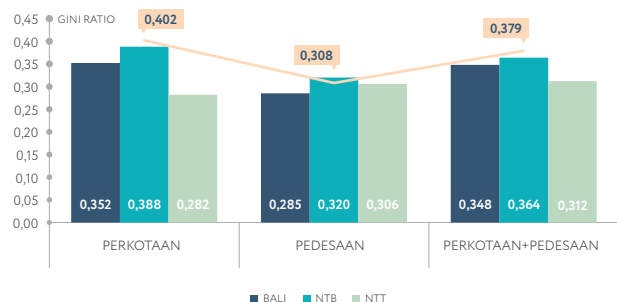
Adapun Indeks P2 mengalami penurunan sebesar -0,165% (ptp) dan mencatatkan angka 0,447% pada September 2024 (Gambar 6. 12). Indeks P2 menunjukkan kesenjangan pengeluaran di antara kelompok masyarakat miskin. Penurunan Indeks P2 di Provinsi NTB juga disebabkan oleh penurunan di daerah pedesaan dari 0,629 pada Maret 2024 menjadi 0,352 pada September 2024. Hal tersebut tercermin dari sebaran desil pengeluaran per kapita daerah pedesaan mengalami penurunan (Gambar 6. 13), utamanya kelompok pengeluaran desil menengah atas (D6 dan D10) (Gambar 6.14).

6.2.2 Tingkat Ketimpangan (Rasio Gini)

Berbeda dengan tingkat kemiskinan, tingkat ketimpangan di Provinsi NTB mengalami peningkatan tetapi masih berada di bawah nasional. Tingkat ketimpangan yang diukur dengan *gini ratio* mengalami peningkatan dari 0,361 pada Maret 2024 menjadi 0,364 pada September 2024 (Gambar 6. 15). Nilai ketimpangan Provinsi NTB tercatat paling tinggi dibandingkan provinsi lain di Balinusra, tetapi masih berada di bawah tingkat ketimpangan nasional yang tercatat sebesar 0,379 pada September 2024.

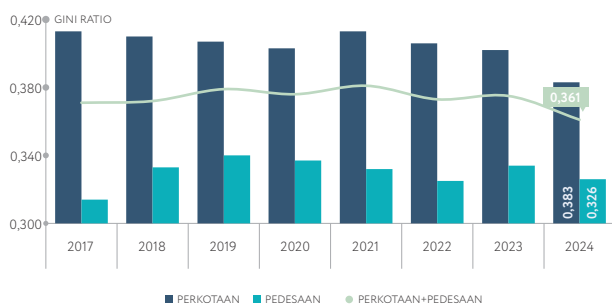
Peningkatan ketimpangan di Nusa Tenggara Barat berkontribusi oleh peningkatan gini ratio di daerah perkotaan. Pada periode September 2024, *gini ratio* daerah perkotaan tercatat pada angka 0,388, lebih tinggi 0,003 poin dibandingkan pada Maret 2024 (Gambar 6. 16). Meski demikian, peningkatan ketimpangan yang lebih dalam tertahan oleh penurunan ketimpangan di daerah pedesaan yang mengalami penurunan 0,006 poin dari 0,326 pada Maret 2024 menjadi 0,320 pada September 2024.

Grafik 6.15 Tingkat Ketimpangan di Balinusra



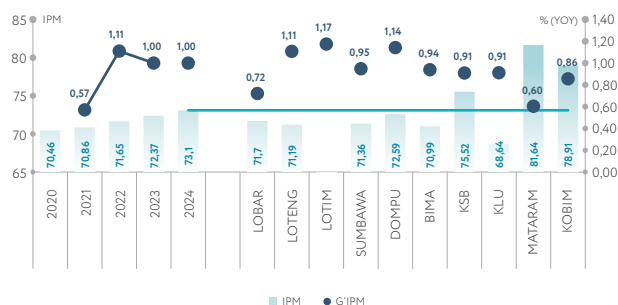
Sumber: BPS dan BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 6.16 Tingkat Ketimpangan Spasial di NTB



Sumber: BPS dan BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 6.17 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi NTB Tahun 2024



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

6.2.3 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB mengalami kemajuan. Sejak tahun 2020, IPM NTB berada di level “tinggi” (IPM 70-80) dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,92% per tahun. Stabilitasnya tingkat IPM ini dapat menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan di NTB sehingga kualitas hidup penduduk tetap terjaga, khususnya terkait standar hidup layak dan pengetahuan.

Pada tahun 2024, IPM NTB tercatat sebesar 73,10 atau meningkat 1,01% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan IPM pada tahun 2024 didorong oleh semua dimensi. Pengeluaran riil per kapita menjadi dimensi dengan pertumbuhan tertinggi yaitu 4,61% (yoy) atau menjadi Rp11.606 pada tahun 2024 (Tabel 6. 2). Selanjutnya pada dimensi pendidikan, Rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS) mengalami peningkatan masing-masing 0,07% (yoy) dan 1,68% (yoy).

Secara spasial, Kota Mataram menjadi wilayah dengan IPM tertinggi di Provinsi NTB. Hal tersebut didukung oleh semua komponen IPM Kota Mataram yang lebih baik dibandingkan

kabupaten/kota lainnya, selain RLS yang masih berada di bawah Kota Bima (10,96) pada tahun 2024 (Tabel 6. 2). IPM Kota Mataram pada periode laporan tercatat sebesar 81,64 atau tumbuh 0,60% (yoy) (Gambar 6. 17). Di sisi lain, Kabupaten Lombok Utara (KLU) menjadi wilayah dengan IPM paling rendah di Provinsi NTB (68,64) pada tahun 2024. Meski demikian, pertumbuhan IPM KLU tercatat tumbuh 0,91% (yoy) yang didorong oleh pertumbuhan pengeluaran riil per kapita sebesar 4,98% (yoy). Hal tersebut sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan di KLU yang mengalami penurunan -1,84% (yoy) dan tercatat sebesar 23,96% pada tahun 2024. Beberapa kebijakan pembangunan yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah KLU antara lain: peningkatan kapabilitas masyarakat, pemberian alat usaha dan pendampingan pemasaran, pembentukan Bumdesa untuk mendorong aktivitas pariwisata di 3 Gili, pengembangan kawasan Teluk Nare, pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin, serta pembangunan infrastruktur (sekolah, instalasi pengolahan air, sistem penyediaan air minum, dan penerangan jalan).

Tabel 6.2 Komponen Indeks Pembangunan Manusia Berdasarkan Kabupaten/Kota di NTB

KABUPATEN/KOTA	UHH			HLS			RLS			Pengeluaran Riil per Kapita		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Lombok Barat	71,94	72,37	72,64	13,96	13,98	13,99	6,60	6,87	6,88	11,75	11,96	12,43
Lombok Tengah	71,02	71,39	71,59	13,86	13,87	13,89	6,44	6,61	6,73	10,47	10,95	11,53
Lombok Timur	71,33	71,72	71,95	14,05	14,06	14,07	7,04	7,12	7,36	9,63	10,15	10,57
Sumbawa	72,03	72,41	72,67	13,23	13,24	13,34	8,21	8,52	8,59	9,60	9,98	10,35
Dompu	71,18	71,54	71,76	13,69	13,83	13,84	8,73	8,97	9,04	9,20	9,40	9,97
Bima	71,28	71,65	71,88	13,58	13,65	13,66	8,17	8,29	8,30	8,70	8,96	9,42
Sumbawa Barat	72,22	72,65	72,97	13,65	13,66	13,68	8,90	9,98	8,99	11,99	12,21	12,84
Lombok Utara	70,84	71,26	71,52	12,77	13,01	13,02	6,30	6,39	6,40	9,43	9,79	10,27
Kota Mataram	74,35	74,65	74,83	15,65	15,67	15,68	9,55	9,56	9,58	15,42	15,89	16,51
Kota Bima	72,65	72,97	73,15	15,05	15,06	15,08	10,94	10,95	10,96	11,40	11,74	12,36
Nusa Tenggara Barat	71,66	72,02	72,25	13,96	13,97	13,98	7,61	7,74	7,87	10,68	11,10	11,61

Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

6.2.4 Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) pada Maret 2025 mengalami peningkatan dibandingkan Desember 2024. Berdasarkan data BPS, NTP Provinsi NTB mengalami peningkatan 1,68% (ptp) dari 123,31 pada Desember 2024 menjadi 124,99 pada periode laporan (Gambar 6. 18). Peningkatan tersebut didorong oleh peningkatan semua komponennya. Indeks yang Diterima Petani (It) mengalami peningkatan dari 148,32 pada Desember 2024 menjadi 152,81 pada periode laporan. Selain itu, Indeks yang Dibayar Petani (Ib) mengalami peningkatan 1,87% (ptp) menjadi 122,26 pada Maret 2025.

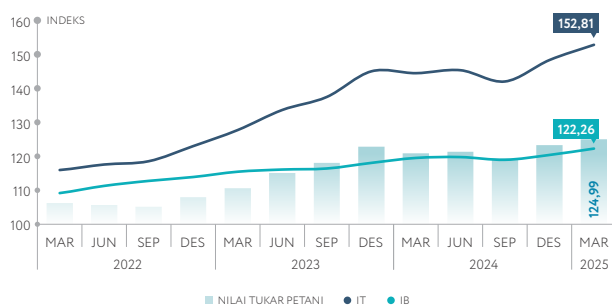
Secara sektoral, peningkatan NTP pada Desember 2024 dikontribusikan oleh peningkatan hortikultura. Tanaman hortikultura menjadi sektor dengan peningkatan terbesar yakni 38,77% (ptp) dan menjadi 219,24 pada periode laporan (Gambar 6. 19). Peningkatan tanaman hortikultura dikontribusikan oleh peningkatan It sebesar 54,19% (ptp) seiring kenaikan harga komoditas cabai dan bawang merah seiring produksi yang terbatas dan belum masuk masa panen.

Meski demikian, peningkatan yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan kinerja semua sektor lainnya. Sektor tanaman

pangan tercatat mengalami penurunan paling tinggi, yakni -3,58% (ptp) dan tercatat sebesar 117,40 pada Maret 2025. Penurunan tersebut dikontribusikan oleh penurunan It sektor tanaman pangan dari 144,85 pada Desember 2024 menjadi 142,93 pada periode laporan. Hal tersebut seiring dengan berlangsungnya masa panen komoditas padi dan jagung.

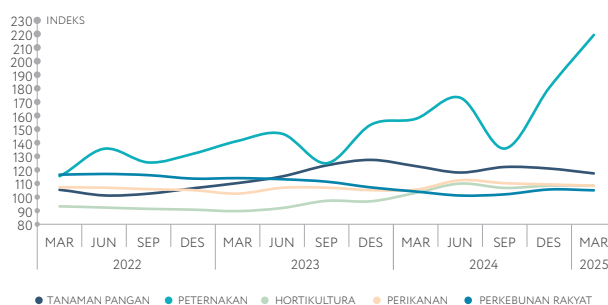
LU Pertanian merupakan salah satu LU dengan pangsa terbesar pada struktur PDRB sehingga perlu dioptimalkan kesejahteraan pelaku usahanya. Pertanian memiliki pangsa sebesar 28,45% terhadap perekonomian Provinsi NTB pada tahun 2024. Melihat tingginya kontribusi LU pertanian sebagai salah satu sektor prioritas yang mendorong perekonomian daerah, diharapkan pemerintah dapat melakukan intervensi kebijakan yang mampu mendukung hilirisasi produk pertanian serta mendorong efisiensi melalui *digital farming* dan pengembangan pupuk organik di tingkat kelompok tani untuk mengatasi masalah ketersediaan pupuk. Hal ini diharapkan dapat menjadi fokus utama untuk dapat meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan petani dalam jangka menengah dan panjang.

Grafik 6.18 Perkembangan Nilai Tukar Petani



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 6.19 Komponen Nilai Tukar Petani



Sumber: BPS Provinsi NTB, diolah

Boks 2 :

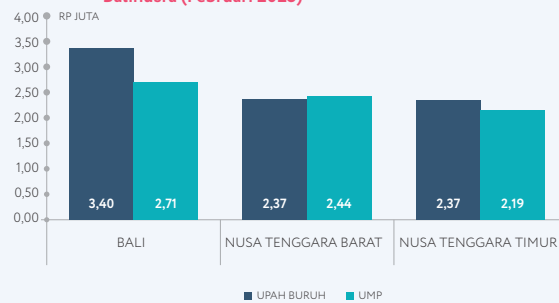
Upah Buruh Rendah: Tantangan Struktural & Jalan Menuju Kesejahteraan Inklusif

Upah buruh merupakan refleksi kualitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Provinsi NTB memiliki upah buruh paling rendah di Indonesia (Grafik 6.1). Pada Agustus 2024, rata-rata upah buruh Provinsi NTB sebesar Rp2,37 juta per bulan atau lebih rendah Rp78.965 dari Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2024. Di Kawasan Balinusra, hanya Provinsi NTB yang memiliki upah buruh lebih rendah dibandingkan UMP (Grafik 6.2).

Sejalan dengan hal tersebut, pekerja *low-skilled* (pendidikan SMP ke bawah) Provinsi NTB mencapai 54,26% pada Februari 2025 (Grafik 6.3). Berdasarkan Hohberg dan Lay (2015)¹, tingginya pekerja *low-skilled* akan menurunkan upah buruh karena terjadi surplus tenaga kerja dan berdampak pada penurunan upah di sektor informal. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan UMP akan cenderung menurunkan permintaan tenaga kerja di sektor formal. Biasanya, tenaga kerja *low-skilled* dengan nilai tambah produktivitas yang lebih rendah daripada peningkatan UMP akan tersingkirkan dari sektor formal. Tenaga kerja yang tidak dapat ditampung di sektor formal tersebut akan memasuki sektor informal sehingga penawaran tenaga kerja di sektor informal akan meningkat dan terjadi penurunan upah buruh di sektor informal untuk menampung peningkatan penawaran tenaga kerja di tengah lapangan kerja yang terbatas. Hal tersebut akan menurunkan rata-rata upah buruh secara keseluruhan meskipun terjadi kenaikan UMP di sektor formal.

Lebih lanjut, sektor informal mendominasi struktur pasar tenaga di Provinsi NTB mencapai 71,80% pada Februari 2025 (Grafik 6.4). Tingginya jumlah pekerja sektor informal cenderung membuat rata-rata upah buruh menurun karena sektor ini tidak terlindungi oleh kebijakan upah minimum. Secara sektoral, terdapat 9 lapangan usaha di NTB yang memiliki rata-rata upah buruh di bawah UMP (Grafik 6.5). Lapangan usaha pertanian, perdagangan, dan industri yang memiliki pangsa tenaga kerja paling besar dengan total mencapai 65,22% justru memiliki rata-rata upah buruh di bawah UMP (Grafik 6.6). Hal tersebut tidak terlepas dari struktur tenaga kerja Provinsi NTB (khususnya di sektor pertanian dan perdagangan) yang masih didominasi oleh pekerja informal.

Grafik 6.2 Perbandingan Upah Buruh dan UMP Provinsi di Kawasan Balinusra (Februari 2025)



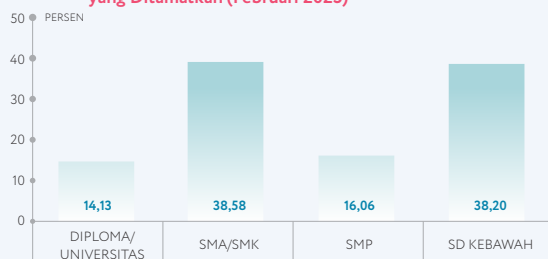
Sumber: BPS dan Kemnaker, diolah

Grafik 6.1 Rata-rata Upah/Gaji Bersih Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan Berdasarkan Provinsi (Agustus 2024)



Sumber: BPS

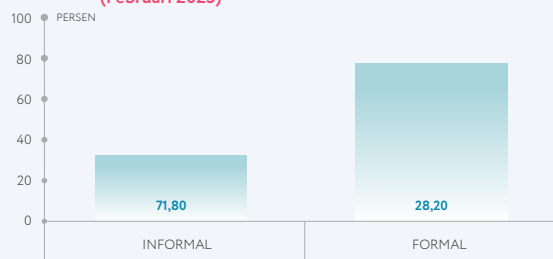
1. Hohberg, M., dan Lay, J. (2015). The impact of minimum wages on informal and formal labor market outcomes: Evidence from Indonesia. *IZA Journal of Labor & Development* 4:14. DOI 10.1186/s40175-015-0036-4.

Grafik 6.3 Distribusi Tenaga Kerja Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Februari 2025)

Sumber: BPS NTB

Untuk mengatasi permasalahan rendahnya upah buruh di Provinsi NTB, diperlukan reformasi struktural di sektor tenaga kerja yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah daerah perlu memperkuat kerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi untuk menciptakan program peningkatan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri lokal. Dengan meningkatkan porsi tenaga kerja yang memiliki keterampilan menengah hingga tinggi, daya tawar buruh dalam pasar kerja dapat meningkat, sehingga mendorong kenaikan upah secara alami melalui peningkatan produktivitas.

Selain itu, upaya formalisasi sektor informal perlu dipercepat melalui kebijakan insentif bagi pelaku usaha kecil dan mikro agar bertransformasi menjadi unit usaha formal. Pemberian kemudahan perizinan, akses

Grafik 6.4 Distribusi Tenaga Kerja Berdasarkan Kegiatan (Februari 2025)

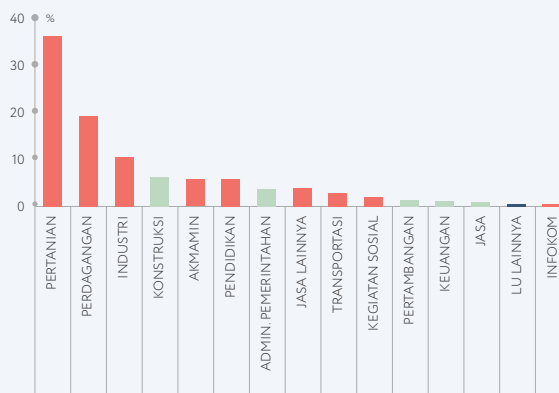
Sumber: BPS NTB

pembiayaan, serta dukungan pendampingan usaha menjadi kunci untuk memperluas cakupan perlindungan ketenagakerjaan, termasuk pengupahan yang sesuai standar minimum. Dengan demikian, pekerja yang saat ini berada di luar jangkauan regulasi upah dapat mulai memperoleh perlindungan yang memadai.

Secara sektoral, penguatan hilirisasi sektor unggulan seperti pertanian dan perikanan dapat menjadi solusi jangka menengah untuk meningkatkan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja formal. Perluasan industri pengolahan berbasis komoditas lokal tidak hanya membuka lapangan kerja baru, tetapi juga menciptakan ekosistem kerja yang lebih terstruktur dan terstandar dalam hal pengupahan. Intervensi ini juga akan mendorong diversifikasi ekonomi dan mengurangi dominasi pekerjaan berupah rendah di sektor hulu.

Grafik 6.5 Rata-rata Upah/Gaji Bersih Buruh/Karyawan/Pegawai per Bulan di Provinsi NTB Berdasarkan Lapangan Usaha (Agustus 2024)

*Bar warna hijau berarti upah buruh sektoral di atas UMP dan merah berarti di bawah UMP
Sumber: BPS, diolah

Grafik 6.6 Distribusi Tenaga kerja Berdasarkan Lapangan Usaha (Agustus 2024)

*Bar warna hijau berarti upah buruh sektoral di atas UMP dan merah berarti di bawah UMP
Sumber: BPS, diolah

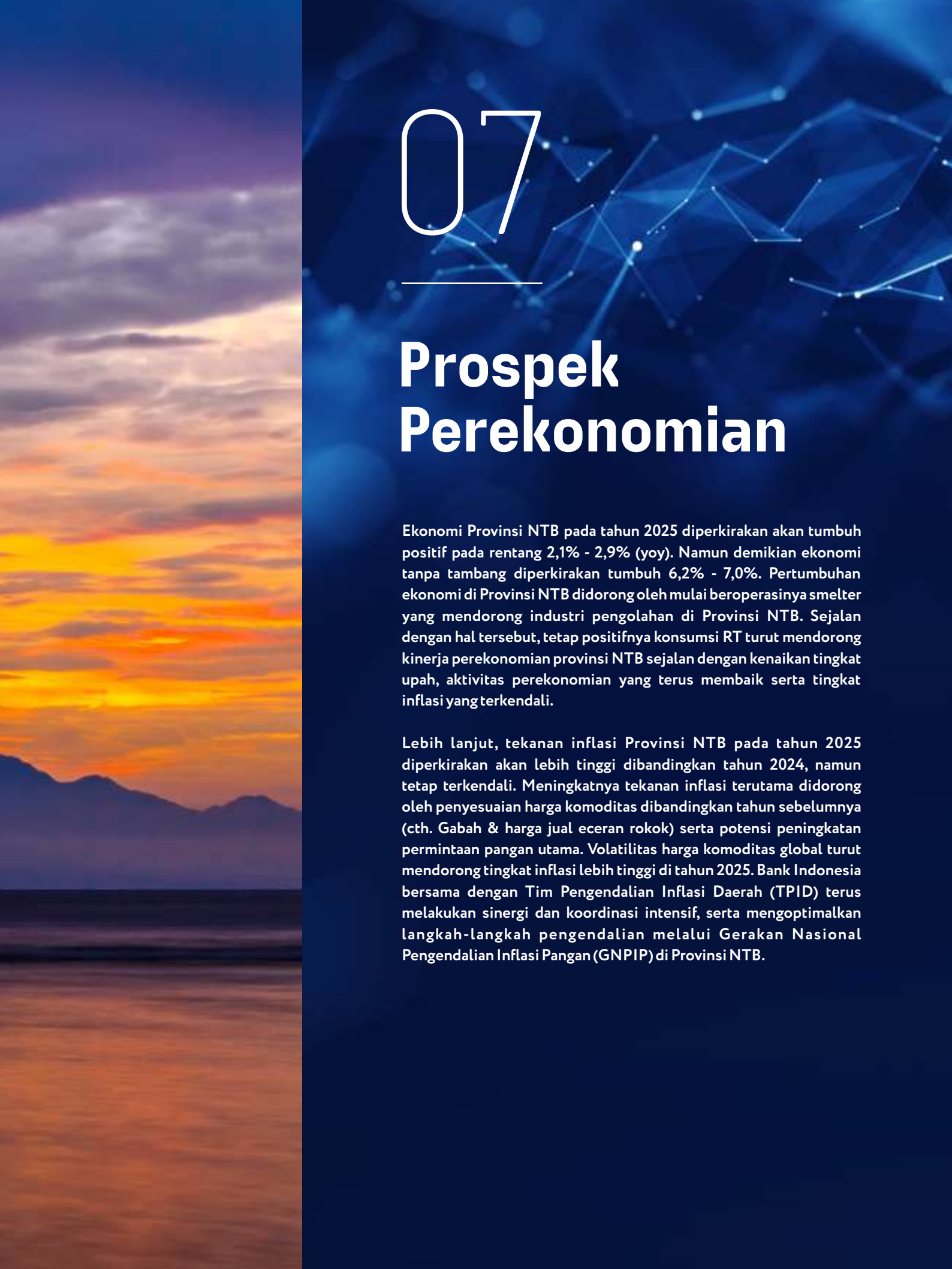


Dalam jangka pendek, pemerintah dapat mempertimbangkan skema subsidi atau insentif upah bagi sektor-sektor padat karya yang bersedia menaikkan upah buruh secara bertahap. Skema ini dapat dikaitkan dengan indikator produktivitas atau keberhasilan pelatihan ulang tenaga kerja. Pendekatan tersebut bertujuan menciptakan ruang transisi yang adil bagi pelaku usaha tanpa menurunkan daya saing, sekaligus meningkatkan kesejahteraan buruh.

Terakhir, penting bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk memperkuat sistem monitoring dan evaluasi ketenagakerjaan, termasuk transparansi data terkait kepatuhan terhadap UMP dan kondisi riil upah sektoral. Data yang akurat dan dapat diakses akan menjadi dasar kebijakan yang lebih responsif dan tepat sasaran. Dengan kolaborasi lintas sektor dan kebijakan berbasis bukti, NTB dapat keluar dari jebakan upah rendah dan mewujudkan kesejahteraan yang lebih inklusif bagi seluruh masyarakat.







07

Prospek Perekonomian

Ekonomi Provinsi NTB pada tahun 2025 diperkirakan akan tumbuh positif pada rentang 2,1% - 2,9% (yoy). Namun demikian ekonomi tanpa tambang diperkirakan tumbuh 6,2% - 7,0%. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTB didorong oleh mulai beroperasinya smelter yang mendorong industri pengolahan di Provinsi NTB. Sejalan dengan hal tersebut, tetap positifnya konsumsi RT turut mendorong kinerja perekonomian provinsi NTB sejalan dengan kenaikan tingkat upah, aktivitas perekonomian yang terus membaik serta tingkat inflasi yang terkendali.

Lebih lanjut, tekanan inflasi Provinsi NTB pada tahun 2025 diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan tahun 2024, namun tetap terkendali. Meningkatnya tekanan inflasi terutama didorong oleh penyesuaian harga komoditas dibandingkan tahun sebelumnya (cth. Gabah & harga jual eceran rokok) serta potensi peningkatan permintaan pangan utama. Volatilitas harga komoditas global turut mendorong tingkat inflasi lebih tinggi di tahun 2025. Bank Indonesia bersama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus melakukan sinergi dan koordinasi intensif, serta mengoptimalkan langkah-langkah pengendalian melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di Provinsi NTB.

7.1 Kondisi Perekonomian Global & Domestik

Fragmentasi ekonomi dunia berlanjut dengan ketidakpastian global yang tetap tinggi. Berdasarkan perkiraan Bank Indonesia (Tabel 7.1) ekonomi global diperkirakan tumbuh sebesar 2,9% (yoy) pada 2025, tumbuh melambat dibandingkan dengan tahun 2024 yang tercatat tumbuh sebesar 3,2% (yoy). Pengumuman kebijakan tarif resiprokal AS awal April 2025, serta langkah retaliasi oleh Tiongkok dan kemungkinan dari sejumlah negara lain meningkatkan fragmentasi ekonomi global dan menurunnya volume perdagangan dunia. Pertumbuhan ekonomi di negara maju dan negara berkembang lainnya juga diperkirakan akan melambat, dipengaruhi dampak langsung dari penurunan ekspor ke AS dan dampak tidak langsung dari penurunan volume perdagangan dengan negara-negara lain. Perang tarif dan dampak negatifnya terhadap penurunan pertumbuhan AS, Tiongkok, dan ekonomi dunia memicu peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global serta mendorong perilaku risk aversion pemilik modal. Yield US Treasury menurun dan indeks mata uang dolar AS terhadap berbagai mata uang dunia (DXY) melemah, di tengah peningkatan ekspektasi penurunan Fed Funds Rate (FFR). Aliran modal dunia bergeser dari AS ke negara dan aset yang dianggap aman (*safe haven asset*), terutama ke aset keuangan di Eropa dan Jepang serta komoditas emas. Sementara itu, aliran keluar modal global dari negara berkembang masih berlanjut sehingga memberikan tekanan terhadap pelemahan mata uangnya.

Di sisi lain, ketidakpastian pasar keuangan global tetap tinggi dipengaruhi kebijakan tarif impor AS yang lebih cepat dan luas dari prakiraan serta arah kebijakan bank sentral AS. Perang tarif dan dampak negatifnya terhadap penurunan pertumbuhan AS, Tiongkok, dan ekonomi dunia memicu peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global serta mendorong perilaku risk aversion pemilik modal. Yield US Treasury menurun dan indeks mata uang dolar AS terhadap berbagai mata uang dunia (DXY) melemah, di tengah peningkatan ekspektasi penurunan Fed Funds Rate (FFR). Aliran modal dunia bergeser dari AS ke negara dan aset yang dianggap aman (*safe haven asset*), terutama ke aset keuangan di Eropa dan Jepang serta komoditas emas.

Tabel 7.1 Pertumbuhan PDB Dunia

	2021	2022	2023	2024	2025*
Dunia	6,3	3,5	3,2	3,2	2,9
Negara Maju	5,7	2,6	1,6	1,7	1,5
Amerika Serikat	5,8	1,9	2,5	2,8	2,0
Kawasan Eropa	5,9	3,4	0,4	0,7	0,9
Jepang	2,6	1,0	1,9	0,1	0,8
Negara Berkembang	7,0	4,1	4,3	4,2	3,8
Tiongkok	8,5	3,0	5,2	5,0	4,0
India	8,3	6,8	7,7	6,7	6,4
ASEAN-5	4,1	5,5	4,1	4,6	4,4
Amerika Latin	7,3	4,2	2,3	1,8	2,0

Sumber: IMF WEO, *Proyeksi Bank Indonesia

Sementara itu, aliran keluar modal global dari negara berkembang masih berlanjut sehingga memberikan tekanan terhadap pelemahan mata uangnya. Memburuknya kondisi global tersebut memerlukan penguatan respons dan koordinasi kebijakan untuk menjaga ketahanan eksternal, mengendalikan stabilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.

Nilai tukar Rupiah tetap terkendali didukung kebijakan stabilisasi Bank Indonesia di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat. Nilai tukar Rupiah pada 27 Maret 2025 tercatat Rp16.560 per dolar AS atau menguat 0,12% (ptp) dibandingkan dengan level akhir Februari 2025. Namun demikian, tekanan kuat terhadap nilai tukar Rupiah terjadi di pasar off-shore (Non Deliverable Forward/NDF) pada saat libur panjang pasar domestik dalam rangka Idulfitri 1446 H, akibat kebijakan tarif resiprokal AS. Bank Indonesia pada 7 April 2025 melakukan intervensi di pasar *off-shore* NDF secara berkesinambungan di pasar Asia, Eropa, dan New York guna stabilisasi nilai tukar Rupiah dari tingginya tekanan global. Respons kebijakan ini memberikan hasil positif, tecermin dari perkembangan Rupiah yang terkendali dan menguat menjadi Rp16.855 per dolar AS pada 22 April 2025, dibandingkan dengan level Rp16.865 per dolar AS pada hari pertama pembukaan pasar domestik pascalibur tanggal 8 April 2025. Pergerakan Rupiah masih sejalan dengan perkembangan mata uang regional dan berada dalam kisaran yang sesuai dengan fundamental ekonomi domestik dalam menjaga stabilitas perekonomian.

Dari sisi domestik, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tetap terjaga di Tengah peningkatan ketidakpastian global. Pada triwulan IV 2024 pertumbuhan tercatat sebesar 5,02% (yoy), sehingga secara keseluruhan tahun 2024 mencapai 5,03% (yoy). Pertumbuhan terutama disumbang oleh permintaan domestik sejalan meningkatnya konsumsi rumah tangga dan tetap baiknya investasi. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), LU Industri Pengolahan dan LU Perdagangan sebagai kontributor utama pertumbuhan juga tumbuh baik, sejalan dengan permintaan domestik yang terjaga. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 diperkirakan tumbuh dalam kisaran 4,6% - 5,4% (yoy). Prospek ini dipengaruhi oleh prakiraan peningkatan investasi, terutama investasi nonbangunan. Sementara itu, konsumsi rumah tangga perlu didorong sehingga dapat makin menopang permintaan domestik. Dari eksternal, berbagai upaya untuk memperkuat ekspor perlu terus ditingkatkan guna memitigasi dampak melambatnya permintaan negara-negara mitra dagang utama.

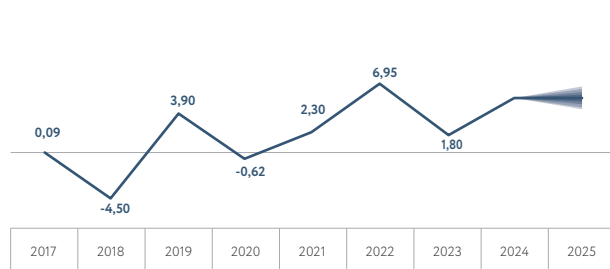
Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) 2025 terjaga dalam kisaran sasarannya 2,5±1%, sejalan inflasi IHK Maret 2025 yang tercatat 1,03% (yoy). IHK pada Maret 2025 mengalami inflasi sebesar sejalan dengan konsistensi suku bunga kebijakan BI (*BI-Rate*) untuk mengarahkan ekspektasi inflasi. Inflasi kelompok *volatile food* (VF) tercatat sebesar 0,37% (yoy) didukung oleh kecukupan pasokan komoditas pangan utama dan eratnya

sinergi pengendalian inflasi oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Sementara itu, kelompok administered prices tercatat deflasi sebesar 3,16% (yoy), tidak sedalam deflasi bulan sebelumnya sebesar 9,02% (yoy), terutama dipengaruhi oleh berakhirnya implementasi kebijakan diskon tarif listrik untuk rumah tangga dengan daya terpasang listrik < 2.200 VA. Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi terkendali dalam sasaran 2,5±1% pada 2025 dan 2026. Inflasi inti diperkirakan terjaga seiring ekspektasi inflasi yang terjangkau dalam sasaran, kapasitas ekonomi yang memadai, imported inflation yang terkendali, dan dampak positif dari digitalisasi. Inflasi VF diperkirakan terkendali didukung oleh sinergi pengendalian inflasi Bank Indonesia dengan Pemerintah Pusat dan Daerah.

7.2 Prospek Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTB Tahun 2025

Mencermati perkembangan terkini, secara keseluruhan tahun ekonomi Provinsi NTB pada tahun 2025 diperkirakan akan melanjutkan pertumbuhan positif dan namun melambat dengan kisaran sebesar 2,1%-2,9% (yoy) (Grafik 7.1). Dari sisi pengeluaran, perlambatan PDRB Provinsi NTB dipengaruhi oleh kinerja Ekspor Luar Negeri yang berkontraksi seiring dengan sudah tidak diberlakukannya lagi ekspor konsentrat tembaga seiring dengan telah selesainya Pembangunan smelter. Selain itu, konsumsi rumah tangga turut mengalami perlambatan meskipun diperkirakan masih mencatatkan kinerja positif pada tahun 2025. Sejalan dengan sisi pengeluaran, sisi lapangan usaha juga dipengaruhi oleh kinerja sektor pertambangan dan perdagangan yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2024. Namun demikian pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB tanpa tambang diperkirakan tumbuh 6,2% - 7,0% (yoy).

Grafik 7.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi NTB



Sumber: Proyeksi Bank Indonesia (Angka Sementara)

Prospek Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTB Sisi Pengeluaran

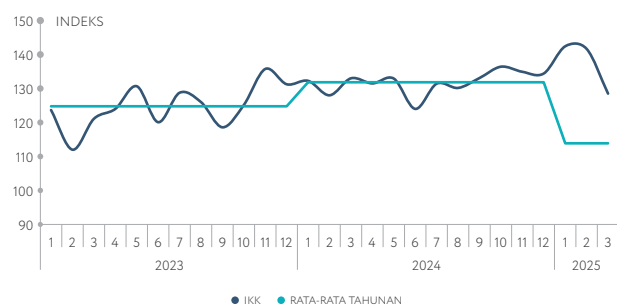
Dari sisi pengeluaran, kinerja ekonomi Provinsi NTB tahun 2025 melambat terutama didorong oleh kinerja ekspor luar negeri yang diperkirakan berkontraksi setelah tahun sebelumnya tumbuh terakselerasi, serta kinerja konsumsi RT yang melambat

(tabel 7.2). Di sisi lain, perlambatan relatif tertahan oleh kinerja investasi yang diperkirakan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Kinerja konsumsi RT pada tahun 2025 diperkirakan tetap tumbuh positif meskipun sedikit melambat. Perlambatan konsumsi RT terutama didorong oleh kenaikan PPn Barang Mewah dan Kendaraan menjadi 12%. Hal ini mendorong Masyarakat cenderung menahan pengeluaran untuk kebutuhan sekunder serta potensi peningkatan inflasi. Di sisi lain, perlambatan lebih dalam tertahan oleh kenaikan UMP NTB di tahun 2025. Berdasarkan hasil Survei Konsumen yang dilakukan, optimism konsumen di Provinsi NTB masih terjaga tercermin dari masih tingginya indeks keyakinan konsumen yang tercatat sebesar 122,92 pada triwulan II 2025, sedikit melandai dibandingkan sebelumnya yang tercatat 137,52 pada triwulan I 2025.

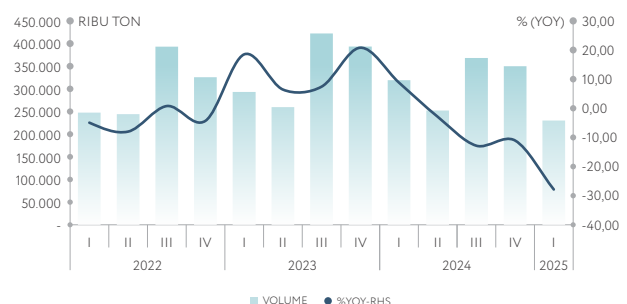
Potensi lebih baiknya kinerja konsumsi RT pada tahun 2025 sejalan dengan adanya kebijakan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 6,5% (yoy), dari Rp2,44 juta menjadi Rp2,60jt. Lebih lanjut, target kunjungan wisatawan Pemerintah Provinsi NTB di tahun 2025 (> 4 juta wisatawan) yang lebih tinggi dari target tahun 2024 (2,5 juta wisatawan) diperkirakan akan turut menopang kinerja konsumsi. Meski demikian, masih relatif tingginya ketegangan geopolitik dan ketidakpastian global, memberikan tekanan pada nilai tukar Rupiah sehingga tetap perlu untuk diwaspadai potensi *imported inflation* dari impor barang-barang konsumsi.

Grafik 7.2 Indeks Keyakinan Konsumen



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 7.3 Realisasi Pengadaan Semen



Sumber: Asosiasi Semen Indonesia

Tabel 7.2 Outlook Pertumbuhan Ekonomi Sisi Penggunaan

PENGELUARAN	2023	2024					2025°
	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL	TOTALP
Konsumsi RT	4,01	5,14	5,05	4,41	3,25	4,45	▼
Konsumsi LNPRT	6,12	18,79	13,69	12,84	1,03	11,26	▼
Konsumsi Pemerintah	1,58	13,21	2,94	1,08	4,43	5,17	▼
PMTB	8,98	7,79	2,32	-0,11	2,78	3,11	▲
Ekspor Luar Negeri	-10,79	1,14	92,20	14,26	-41,43	-10,79	▼
Impor Luar Negeri	-1,65	8,03	24,43	15,54	-23,55	-1,66	▼
PDRB	1,80	4,75	11,06	6,22	-0,50	5,30	▼

Sumber: BPS, P (Proyeksi Bank Indonesia), *Angka Sementara

Kinerja sektor investasi pada tahun 2025 diperkirakan akan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Kinerja positif investasi diperkirakan tetap berlanjut didorong oleh kebijakan tiga juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) oleh Pemerintah guna meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau. Selain itu, pengembangan Kawasan wisata seperti The Mandalika turut meningkatkan kinerja sektor investasi seiring dengan masuknya investasi baik dari luar negeri, maupun dalam negeri yang bernilai signifikan. Di sisi lain, peningkatan lebih tinggi relatif tertahan oleh telah selesainya Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti Smelter yang telah memasuki tahap *commissioning* sejak 1 Juni 2024 serta proyek infrastruktur Pembangkit Listrik (PLTMG Sumbawa & PLTU Lombok) yang memasuki fase akhir Pembangunan. Hal ini tercermin dari penurunan realisasi pengadaan semen (Grafik 7.3) sebagai salah satu indikator pendukung Pembangunan proyek.

Sementara itu dari sisi eksternal, kinerja ekspor Luar Negeri diperkirakan akan berkontraksi. Secara umum, kinerja ekspor luar negeri Provinsi NTB mayoritas berasal dari ekspor konsentrat tembaga yang pangsa mencapai +98%. Namun demikian, kinerja ekspor Luar Negeri Provinsi NTB diperkirakan mengalami kontraksi pada tahun 2025 dibandingkan dengan kinerja tahun 2024 yang tumbuh tinggi sejalan dengan optimalisasi ijin ekspor pada tahun tersebut. Belum terdapatnya relaksasi ekspor di tahun 2025 serta masih terbatasnya operasional smelter menahan kinerja ekspor Luar Negeri.

Prospek Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTB Sisi Lapangan Usaha

Dari sisi lapangan usaha, perlambatan laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTB pada tahun 2025 berasal dari sektor pertambangan dan perdagangan yang mengalami penurunan kinerja dibandingkan dengan tahun 2024 (Tabel 7.3). Meski demikian perlambatan lebih lanjut cenderung tertahan oleh sektor pertanian yang tumbuh meningkat serta tumbuh akselerasinya sektor industri pengolahan sejalan dengan operasional smelter di Kabupaten Sumbawa Barat.

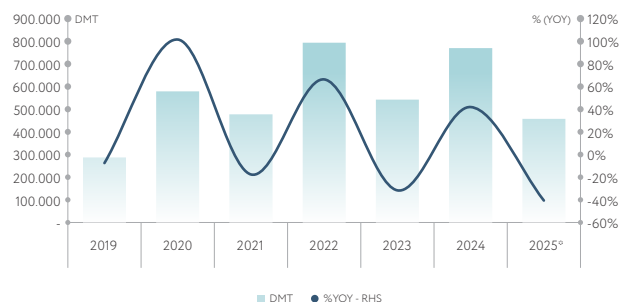
Kinerja sektor pertambangan diperkirakan akan lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu. Hal ini seiring dengan realisasi produksi tembaga yang lebih rendah dibandingkan prakiraan

sebelumnya yang dipengaruhi oleh faktor curah hujan yang lebih tinggi sehingga menyebabkan kendala dalam proses penambangan (Grafik 7.4). Selain itu, berhentinya izin ekspor konsentrat tembaga serta terbatasnya operasional smelter turut berpotensi menahan proses produksi.

Sejalan dengan sektor pertambangan, kinerja sektor perdagangan diperkirakan turut melambat dibandingkan dengan kondisi di tahun 2024. Hal ini seiring dengan pemberlakuan PPN untuk Barang Mewah & Kendaraan menjadi 12% yang berdampak pada permintaan Masyarakat terkait dengan barang sekunder dan berpotensi menekan volume perdagangan. Selain itu, kondisi ekonomi global yang masih fluktuatif turut mempengaruhi pelaku usaha dan konsumen dalam bertransaksi sehingga menjadi lebih konservatif.

Di sisi lain, kinerja sektor pertanian diperkirakan tumbuh lebih tinggi pada tahun 2025. Kondisi tersebut seiring dengan kondisi cuaca yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya serta peningkatan alokasi pupuk bersubsidi yang meningkat sebesar 31,32% (yoy) untuk UREA dan 40,01% (yoy) untuk NPK dibandingkan dengan realisasi penyaluran pupuk pada tahun 2024. Berdasarkan Kerangka Sampel Area (KSA) dari Badan Pusat Statistik, produksi GKG triwulan II 2025 diperkirakan tumbuh 51,48% (yoy), terakselerasi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 24,87% (yoy). Selain itu, adanya kebijakan Pemerintah Daerah terkait dengan perluasan lahan sawah dilindungi yang mencapai 233 ribu hektare diperkirakan turut mendorong kinerja sektor pertanian di 2025.

Grafik 7.4 Produksi Konsentrat Tembaga



Sumber: PT AMNT & Earning Report PT AMMAN, diolah

Tabel 7.3 Outlook Pertumbuhan Ekonomi Sisi Lapangan Usaha

PENGELUARAN	2023	2024					2025*
	TOTAL	I	II	III	IV	TOTAL	TOTALP
Pertanian	2,05	-4,13	5,17	2,28	2,75	1,54	▲
Pertambangan	-10,39	12,48	46,00	18,05	-16,84	11,66	▼
Perdagangan	6,94	9,46	0,12	8,53	6,31	5,87	▼
Konstruksi	10,87	3,79	4,83	-0,35	2,96	2,93	▲
Transportasi	8,14	4,63	4,40	4,57	3,25	4,21	▲
PDRB	1,80	4,75	11,06	6,22	-0,50	5,30	▼

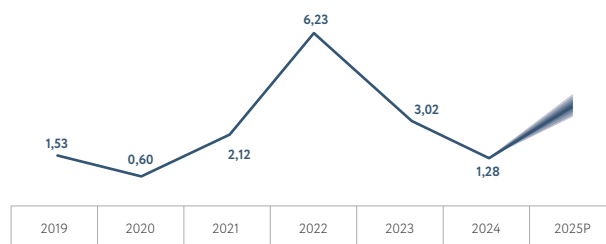
Sumber: BPS, P (Proyeksi Bank Indonesia), *Angka Sementara

Kinerja sektor konstruksi diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi pada tahun 2025. Adapun kondisi tersebut sejalan dengan pembangunan *power plant* di Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa dan Kota Bima dengan nilai investasi Rp2,15 triliun serta pengembangan LNG di Kabupaten Sumbawa Barat sebagai pendukung operasional smelter PT. AMIN yang turut mendorong sektor konstruksi. Selain itu, adanya kebijakan tiga juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dapat menggerakkan sektor konstruksi yang menjadi salah satu komponen pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTB. Di sisi lain, peningkatan pada sektor konstruksi yang lebih tinggi cenderung tertahan oleh berakhirnya proyek smelter yang bernilai signifikan (Rp21,6 triliun) dalam rangka mendukung percepatan hilirisasi tembaga sebagaimana Keputusan Menteri ESDM No. 89 Tahun 2023.

Lebih lanjut, kinerja sektor transportasi diperkirakan tumbuh akselerasi pada tahun 2025. Pertumbuhan positif sektor transportasi antara lain ditopang oleh periode cuti bersama yang lebih panjang di tahun 2025, sehingga akan berdampak pada kunjungan wisatawan yang lebih tinggi. Dari subsektor angkutan udara, terdapat penambahan penerbangan rute Lombok-Palangkaraya dan Lombok-Pontianak sejak Maret 2025, Lombok-Banjarmasin sejak Februari 2025, serta Lombok-Darwin sejak April 2025. Meski demikian, pertumbuhan lebih tinggi relatif tertahan oleh faktor *base effect* di tahun sebelumnya yang telah tumbuh tinggi pasca berakhirnya pandemi, tidak adanya perhelatan *World Superbike* (WSBK) 2024 di Sirkuit Mandalika, serta penambahan jumlah penerbangan yang masih relatif terbatas bila dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi.

7.3 Prospek Inflasi Provinsi NTB Tahun 2025

Inflasi gabungan Provinsi NTB diperkirakan akan lebih tinggi namun tetap terkendali pada tahun 2025 (Grafik 7.5). Secara umum, tekanan inflasi Provinsi NTB pada tahun 2025 diperkirakan meningkat sejalan dengan perkembangan inflasi baik di tingkat global maupun domestik. Inflasi Amerika Serikat (AS) tercatat tinggi yang disebabkan oleh tertahannya proses disinflasi akibat kebijakan tarif. Sementara itu, pada tingkat domestik, inflasi Nasional hingga Januari 2025 terpantau dalam tren menurun namun masih berada dalam rentang sasaran.

Grafik 7.5 Proyeksi Inflasi Provinsi NTB

Sumber: Proyeksi Bank Indonesia (Angka Sementara)

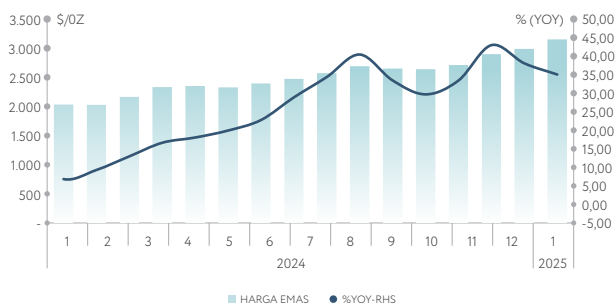
Inflasi di Provinsi NTB tahun 2025 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tekanan inflasi utamanya didorong oleh komoditas sigaret yang mengalami kenaikan sebesar 4-6% sesuai dengan jenisnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 97 tahun 2024 yang berlaku mulai dari 1 Januari 2025. Lebih lanjut, periode cuti bersama yang lebih banyak di tahun 2025 turut berpotensi meningkatkan tekanan inflasi pada komoditas tarif angkutan udara. Lebih lanjut, terdapat pembukaan rute baru pada tahun 2025, yaitu Lombok-Palangkaraya dan Lombok-Pontianak sejak Maret 2025, Lombok-Banjarmasin sejak Februari 2025, serta Lombok-Darwin sejak April 2025 yang berpotensi mendorong tekanan yang lebih tinggi. Namun demikian, pemberian diskon tarif angkutan udara yang diberikan pada momentum HBKN dan liburan berpotensi menahan kenaikan yang lebih lanjut.

Sejalan dengan itu, tekanan inflasi pada kelompok bahan makanan juga diperkirakan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Adanya penyesuaian HPP Gabah dari Rp6.000/kg menjadi Rp6.500/kg, penyesuaian harga jagung pakan dari Rp5.000/kg menjadi Rp5.500/kg, potensi peningkatan permintaan terhadap komoditas pangan utama juga sejalan dengan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi mendorong kenaikan tekanan harga pada kelompok bahan makanan. Meski demikian, inflasi lebih tinggi cenderung tertahan oleh kondisi cuaca di tahun 2025 yang relatif lebih stabil pasca El Nino yang dapat berdampak positif pada produksi padi.

Lebih lanjut, masih relatif tingginya ketidakpastian global dan ketegangan geopolitik mendorong para investor untuk membeli emas yang kemudian memberikan tekanan pada harga emas global sebagai *aset safe-haven* (Grafik 7.6). Fenomena El Nino juga mempengaruhi budidaya kelapa sawit di Indonesia dan dorongan menggunakan lebih banyak minyak sawit untuk produksi biodiesel berpotensi mendorong tekanan harga minyak goreng.

Berdasarkan berbagai faktor di atas, inflasi gabungan di Provinsi NTB pada tahun 2025 diperkirakan lebih tinggi namun masih terkendali. Sesuai mandat, Bank Indonesia akan terus berusaha menjaga capaian target inflasi tersebut melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Untuk itu, koordinasi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi juga perlu terus diperkuat terutama dalam menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi efektif untuk menjaga ekspektasi masyarakat.

Grafik 7.6 Harga Emas Global



Sumber: Bloomberg



Daftar Istilah

PDRB	Produk Domestik Regional Bruto. Pendapatan suatu daerah yang mencerminkan hasil kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah tertentu.
mtm	<i>month to month</i> . Perbandingan antara satu bulan dan bulan sebelumnya.
qtq	<i>quarter to quarter</i> . Perbandingan antara data satu triwulan dengan triwulan sebelumnya.
yoy	<i>year on year</i> . Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya.
Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)	Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi kondisi ekonomi enam bulan mendatang, dengan skala 1-100.
Indeks Harga Konsumen (IHK)	Sebuah indeks yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat pada suatu periode tertentu.
Indeks Kondisi Ekonomi	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini, dengan skala 1-100.
Indeks Ekspektasi Konsumen	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap ekspektasi kondisi ekonomi 6 bulan mendatang, dengan skala 1-100.
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.
Dana Perimbangan Indeks	Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Ukuran kualitas pembangunan manusia yang diukur melalui pencapaian rata-rata 3 (tiga) hal kualitas hidup yaitu : pendidikan, kesehatan dan daya beli.
Inflasi	Kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan bersifat persisten. Perubahan (laju) inflasi umumnya diukur dengan melihat perubahan harga pada sejumlah barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat, seperti tercermin pada perkembangan indeks harga konsumen (IHK). Berdasarkan faktor penyebabnya, inflasi dapat dipengaruhi baik dari penawaran maupun dari permintaan.
<i>Volatile Foods</i>	Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan harganya sangat bergejolak karena faktor-faktor tertentu.
<i>Administered Price</i>	Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan harganya diatur pemerintah.
M1	Disebut sebagai <i>narrow money</i> (uang beredar dalam arti sempit), terdiri dari uang kartal dan uang giral.
M2	Disebut <i>broad money</i> atau uang beredar dalam arti luas, merupakan indikator tingkat likuiditas perekonomian, terdiri dari uang kartal, uang giral dan uang kuasi (tabungan dan deposito baik dalam mata uang rupiah maupun asing).

Mo	Disebut uang primer (<i>base money</i>) merupakan kewajiban otoritas moneter (di dalam neraca bank sentral), terdiri dari uang kartal pada bank umum dan masyarakat ditambah dengan saldo giro bank umum dan masyarakat di bank sentral.
Uang Kartal	Uang kertas dan uang logam yang berlaku, tidak termasuk uang kas pada kas negara (KPKN) dan bank umum.
Uang Giral	Terdiri dari rekening giro masyarakat di bank, kiriman uang, simpanan berjangka dan tabungan yang sudah jatuh tempo yang seluruhnya merupakan simpanan penduduk dalam rupiah pada sistem moneter.
NIM	Singkatan dari <i>Net Interest Margin</i> adalah selisih antara penerimaan bunga yang diperoleh oleh bank dengan biaya bunga yang harus dibayar.
NPLs	Singkatan dari <i>Non Performing Loans</i> disebut juga kredit bermasalah, dengan kolektibilitas kurang lancar (3), diragukan (4) dan macet (5) menurut ketentuan BI.
Restrukturisasi kredit	Upaya yang dilakukan bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya yang dilakukan antara lain dengan melalui : restrukturisasi, <i>rescheduling</i> atau konversi kepemilikan.
UMKM	Singkatan dari Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
UYD	Singkatan dari uang yang diedarkan, adalah uang kartal yang berada di masyarakat ditambah dengan uang yang berada di kas bank.
<i>Inflow</i>	Uang kartal yang masuk ke BI, melalui kegiatan setoran yang dilakukan oleh bank umum.
<i>Outflow</i>	Uang kartal yang keluar dari BI melalui proses penarikan uang tunai bank umum dari giro di BI atau pembayaran tunai melalui BI.
<i>Netflow</i>	Selisih antara <i>outflow</i> dan <i>inflow</i> .
PTTB	Pemberian tanda tidak berharga, adalah bagian dari kegiatan untuk menarik uang yang sudah tidak layak edar, sehingga uang yang disediakan oleh BI tersebut dapat berada dalam kondisi layak dan segar (<i>fit for circulation</i>) untuk bertransaksi.

Sumber Data

Data	Sumber Data
Anggaran Belanja Pendapatan Negara	Kanwil Perbendaharaan Provinsi NTB
Anggaran Belanja Pendapatan Provinsi dan Kab/Kota	Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah Provinsi NTB
Arus Bongkar Muat Barang Pelabuhan	Badan Pusat Statistik Provinsi NTB
Dana Rumah Tangga untuk Membayar Cicilan	Bank Indonesia
Desain Sirkuit MotoGP KEK Mandalika	ITDC
Harga Komoditas Inflasi	Bank Indonesia
Harga Komoditas Pertambangan	Bloomberg
Indikator Bank Perkreditan Rakyat	Bank Indonesia
Indikator Sistem Pembayaran Non-Tunai (Kliring & RTGS)	Bank Indonesia
Indikator Sistem Pembayaran Tunai	Bank Indonesia
Inflasi	Badan Pusat Statistik Provinsi NTB
Inflasi Pedesaan	Badan Pusat Statistik Provinsi NTB
Jumlah Bank dan Jaringan Kantor di Provinsi NTB	Bank Indonesia
Jumlah Kunjungan Wisatawan	Dinas Pariwisata Provinsi NTB
Jumlah Penumpang Pesawat	Badan Pusat Statistik Provinsi NTB
Jumlah Tamu Menginap di Hotel	Badan Pusat Statistik Provinsi NTB
Komoditas Penyumbang Inflasi	Badan Pusat Statistik Provinsi NTB
Komposisi Pengeluaran Rumah Tangga Berdasarkan Pendapatan	Bank Indonesia
Konsumsi Bahan Bakar Rumah Tangga	Pertamina
Langkah Pengendalian Inflasi Daerah	TPID Provinsi NTB
Nilai Tukar Petani	Badan Pusat Statistik Provinsi NTB
Penjualan Ekspor Tembaga	PT. Amman Mineral Nusa Tenggara
Penjualan Kendaraan Bermotor	Dinas Pendapatan Daerah Provinsi NTB
Penjualan Semen	Asosiasi Semen Indonesia
Periode Pelaksanaan HBKN	Kementerian Agama
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	Badan Pusat Statistik Provinsi NTB
Produksi Tanaman Palawija	Dinas Pertanian Provinsi NTB
Proyeksi PDRB dan Inflasi Daerah	Bank Indonesia
Rasio Gini	Badan Pusat Statistik Provinsi NTB
Rata - Rata Lama Menginap Tamu Hotel	Badan Pusat Statistik Provinsi NTB
Realisasi Pembangunan Hunian Tetap	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB
Realisasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu Provinsi NTB
Risiko Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi	Bank Indonesia
Statistik Ekspor Impor Luar Negeri	Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik Provinsi NTB
Statistik Penduduk Miskin	Badan Pusat Statistik Provinsi NTB
Statistik Tenaga Kerja	Badan Pusat Statistik Provinsi NTB
Statistik Perbankan Daerah	Bank Indonesia
Survei Kegiatan Dunia Usaha	Bank Indonesia
Survei Konsumen	Bank Indonesia
Survei Pemantauan Harga	Bank Indonesia
Survei Perdagangan Eceran	Bank Indonesia

**KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jl. Pejanggik No.2 Mataram Nusa Tenggara Barat

Telp. : (0370) 623600

Fax : (0370) 631793

Email : EKMONKPwBINTB@bi.go.id

www.bi.go.id